

**PENGARUH DISTRIBUSI DANA ZIS DI BAZNAS
INDONESIA, PERTUMBUHAN EKONOMI,
TINGKAT INFLASI, BELANJA PENDIDIKAN
DAN BELANJA KESEHATAN
TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA
(Periode 2011 – 2014)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGAI PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI ISLAM
DEPARTEMEN EKONOMI SYARIAH
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**



DIAJUKAN OLEH

**HARYO SETO
NIM :041114050**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**

SKRIPSI

**PENGARUH DISTRIBUSI DANA ZIS DI BAZNAS
INDONESIA, PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT
INFLASI, BELANJA PENDIDIKAN, BELANJA KESEHATAN
DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
KEMISKINAN DI INDONESIA
PERIODE 2011 - 2014**

DIAJUKAN OLEH:

HARYO SETO

041114050

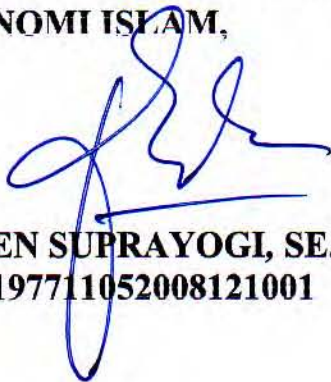
**TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH:
DOSEN PEMBIMBING,**



**Dr. SRI HERIANINGRUM, SE., M.Si.
NIP. 196902072008122001**

TANGGAL 28-10-16

**KOORDINATOR PROGRAM STUDI
EKONOMI ISLAM,**



**NOVEN SUPRAYOGI, SE., M.Si., Ak.
NIP. 197711052008121001**

TANGGAL 28-10-16

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Haryo Seto, 041114050), menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 20 Oktober 2016



Haryo Seto

041114050

DECLARATION

I, (Haryo Seto, 041114050), declare that :

1. My thesis is genuine and truly my own creation, and is not another's person work made under by name, nor piracy or plagiarism. This thesis has never been submitted to obtain an academic degree in Airlangga University or in any other universities/colliages.
2. This thesis does not contain any work or opinion written or published by anyone, unless clearly acknowledged or referred to by quoting the author's name and stated in the references.
3. This statement is true, if on the future this statement is proven to be fraud and dishonest, I agree to receive an academic sanction in the form of removal of the degree obtained through this thesis, and regulations in Airiangga University.

Surabaya, 18 October 2016

Declared by,

Haryo Seto

041114050

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu. Shalawat dan Salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta seluruh pengikutnya hingga hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Distribusi Dana ZIS di BAZNAS Indonesia, Inflasi, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2011 hingga 2014”**. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dalam penyelesaian studi pada Program Strata Satu (S1), Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga Surabaya.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam penyelesaian tugas akhir ini sehingga penulis bisa dengan lancar menyelesaikan tugas ini:

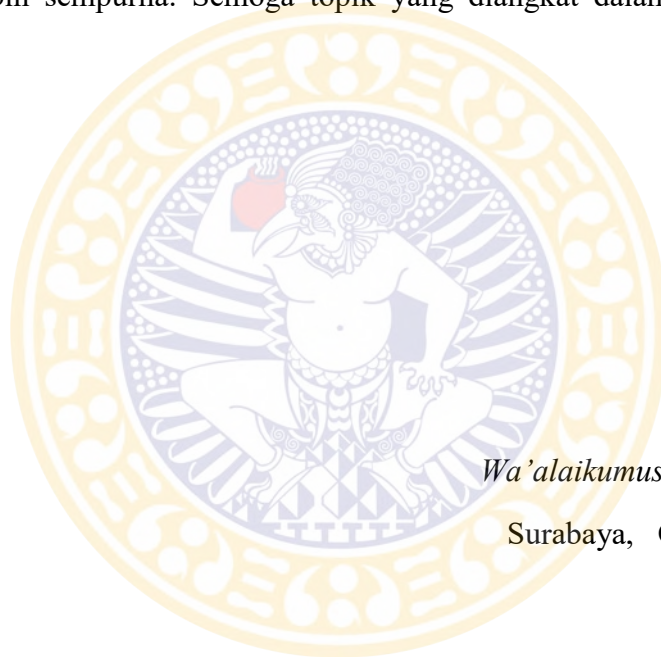
1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Budi Riyanto dan Ibu Djawirotn Nikmah, terimakasih telah menjadi orang tua, motivator dan segala dukungan moral dan materiil sehingga penulis dapat mencapai tahap ini dan adik penulis, Dimas Arganata, yang selalu menjadi motivator dan pendorong semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Dian Agustina, SE., M.Si., Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tahun 2016.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muslich Anshori, SE., M.Si., Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tahun 2011- 2015.
4. Bapak Dr. Raditya Sukmana, SE., MA., selaku Ketua Departemen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
5. Bapak Dr. Muhammad Nafik HR selaku Ketua Departemen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tahun 2010 - 2013 dan Bapak Drs. Ec. H. Suherman Rosyidi, M. Com. Selaku Ketua Departemen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tahun 2013-2014.
6. Bapak Noven Suprayogi, SE., M.Si., Ak., sebagai Ketua Program Studi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
7. Dr. Sri Herianingrum, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini serta memberikan nasihat kepada penulis dalam berbagai hal.
8. Fatin Fadhillah Hasib, SE., M.Si., selaku Dosen Wali yang telah membantu selama proses perkuliahan.
9. Tim penguji proposal Bapak Eko Fajar Cahyono, SE., MM., dan Bapak Raditya Sukmana, SE., MA. yang telah memberikan saran-saran untuk awal penelitian ini.

10. Tim penguji skripsi Bapak Drs. Ec. Karjadi Mintaroem, MS., Bapak Drs. R. Qudsi Fauzy, MM., Bapak Dr. Raditya Sukmana, SE., MA., dan Ibu Ririn Tri Ratnasari, S.E., M.Si., yang telah memberikan saran pada penelitian ini.
11. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, atas ilmu dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
12. Khurin Fijria Nuzula S.Ei., beserta keluarga yang telah memotivasi dan mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala momen dan pengalaman yang telah dibagi dengan penulis.
13. Keluarga bagong regency mama ana, Linda, Lidya, Azka, Ayu, Riza, Mahendra, Fitri, Tara, Priyo, Cuiy, Mas Deri, Elsa, Rofiq, Layka, Rio dan Latifa atas segala momen dan pengalaman yang kalian bagi.
14. Fahmi, vian, Hanifa, Fairuz, Rofi'il Ali yang telah menemani penulis selama perkuliahan.
15. Keluarga rolag Riza, Choi, Afdhal, Ari, Fachri, Fardhan dan Tania sebagai kawan yang saling mendukung dan saling membantu.
16. Teman – teman Gazebo Belakang yang sangat unik yang telah menjadi teman kuliah dan teman selama menulis skripsi. Jangan lupa almamater kalian.
17. Tim Ekis Creative Pak Luthfi, Dama, Ishma, Yanani dan Dhana, terimakasih sudah menjadi partner hebat mewujudkan ide hebat.
18. Tim pengajar mata kuliah Kewirausahaan dan Bisnis Islam program studi Ekonomi Islam, terimakasih telah banyak berkorban untuk menjadikan mahasiswa – mahasiswa anda lebih baik dari sebelumnya.

19. Teman – teman KKN 51 desa sumberkedawung, kecamatan leces, kabupaten Probolinggo, Fikri, Barata, Eko, Gre, Afifah, Lalak, Intan, mbak Rey, Eni dan Venna yang sudah menjadi kawan.

Penulis sangat berterima kasih untuk semua pihak yang telah berjasa dalam kehidupan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan penulis terbuka apabila ada kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini menjadi lebih sempurna. Semoga topik yang diangkat dalam skripsi ini dapat bermanfaat.



Wa'alaikumussalamWr. Wb.

Surabaya, Oktober 2016

Haryo Seto

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI
DAN PERGURUAN TINGGI**

PROGRAM STUDI : EKONOMI ISLAM
DAFTAR No :

ABSTRAKSI
SKRIPSI SARJANA EKONOMI ISLAM

NAMA : HARYO SETO
NIM : 041114050
TAHUN PENYUSUNAN : 2016

JUDUL :

Pengaruh Distribusi Dana ZIS di BAZNAS INDONESIA, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode Januari 2011 hingga Desember 2014.

ISI :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh distribusi dana zis di BAZNAS Indonesia, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, belanja pendidikan dan belanja kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia periode Januari 2011 hingga Desember 2014. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Variabel independennya adalah distribusi dana zis di BAZNAS Indonesia, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, belanja pendidikan dan belanja kesehatan. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda dan persamaannya adalah $Y = -0,004 - 2,2958E-5$ (PENDIDIKAN) – $2,502E-5$ (KESEHATAN) – $0,009$ (PDB) + $0,002$ (INFLASI) – $2,020E-11$ (ZIS).

Berdasarkan uji t nya, dengan nilai signifikansi masing – masing untuk zis sebesar 0,912, inflasi sebesar 0,025, pendidikan sebesar 0,000, kesehatan sebesar 0,059 dan pdb sebesar 0,020 yang dimana hanya variabel distribusi zis yang memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan karena memiliki nilai lebih dari 0,1. Saran bagi pemerintah pusat dan BAZNAS adalah untuk meningkatkan penghimpunan dan distribusi zis serta APBN karena meningkatnya distribusi zis dan apbn akan memberikan kontribusi mengurangi kemiskinan di Indonesia yang dimana sejalan dengan ajaran Islam yang menitik beratkan keadilan dalam distribusi pendapatan. Sebagaimana telah disebutkan dalam surah Al – Humazah ayat 1 – 4 azab pedih bagi orang – orang yang menghambat distribusi.

Kata kunci : Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, PDB, Inflasi, ZIS, Kemiskinan.

**MINISTRY OF RESEARCH, TECHNOLOGY
AND HIGHER EDUCATION**

STUDY PROGRAM : ISLAMIC ECONOMY
LIST No :

ABSTRACT
ISLAMIC ECONOMY GRADUATE THESIS

NAME : HARYO SETO
STUDENT ID : 041114050
YEAR OF WRITING : 2016

Title:

The Effect of ZIS Fund Distribution of BAZNAS INDONESIA, Economic Growth, Inflation Rate, Education Expenditure and Health Expenditure Towards the Poverty in Indonesia in period January 2011 to December 2014.

Content:

This study aims to determine the effect of the distribution of ZIS in BAZNAS Indonesia, economic growth, inflation rate, expenditure on education and health expenditure towards the poverty in Indonesia from January 2011 to December 2014. The method used is quantitative research method. The independent variable is the distribution of ZIS fund of BAZNAS in Indonesia, economic growth, inflation, and the expenditure on education and health. The analysis technique used is the technique of multiple regression analysis and the equation is $Y = -0.004 - 2,2958E-5 (EDUCATION) - 2,502E-5 (HEALTH) - 0.009 (GDP) + 0.002 (INFLATION) - 2,020E-11 (ZIS)$.

Based on the t test, the significant values respectively for zis is 0,912, inflation is 0,025, education is 0,000, health is 0,059 and gdp is 0,020 which only variable of zis distribution has an insignificant influence to the poverty because it has value more than 0,1. Suggestions for the central government and BAZNAS is to improve the collection and distribution of ZIS as well as the state budget due to the increased distribution of ZIS and the state budget will contribute to the poverty alleviation in Indonesia which is in line with Islam's teachings which emphasize fairness in income distribution as explained in surah Al-Humazah verse 1-4 that a painful doom would be given to those who inhibit distribution.

Keywords: Education Expenditure, Health Expenditure, GDP, inflation, ZIS, Poverty.

وزارة البحوث التكنولوجية والتعليم العالية
كلية الاقتصادية و التجارية جامعة إيرلانغا

شعبة :
رقم التسجيل :
: الإقتصاد الإسلامي
:.....

الملخص
بحث علمي خريج الإقتصاد الإسلامي

اسم : هريو سيتو
رقم القيد : ٥٠٦١١٦٠
سنة الإعداد : ٢٠١٢

الموضوع:

تأثير توزيع أموال ز.إ.س. في ب.أ.ز.ن.أ.س. إندونيسيا ونمو الاقتصاد ودرجة التضخم وتسوق التعليم والإنفاق على الرعاية الصحية في الفقر في إندونيسيا فترة يناير ١١٠٢ – ديسمبر ٢٠١٢.

المحتويات:

يهدف البحث إلى معرفة تأثير توزيع أموال ز.إ.س. في ب.أ.ز.ن.أ.س. إندونيسيا ونمو الاقتصاد ودرجة التضخم وتسوق التعليم والإنفاق على الرعاية الصحية في الفقر في إندونيسيا فترة يناير ١١٠٢ – ديسمبر ٢٠١٢. المنهج المستخدم هو المنهج الكمي. العامل المستقل هو توزيع أموال ز.إ.س. في ب.أ.ز.ن.أ.س. إندونيسيا ونمو الاقتصاد ودرجة التضخم وتسوق التعليم والإنفاق على الرعاية الصحية. تقنية التحليل المستخدم هو تحليل الانحدار المتعدد مع دليل المعادلة $Y = 60000 - 8592,2 \text{ (إ.إ.)} - 5 \text{ (التعليم)} - 502,2 \text{ (إ.إ.)} - 5 \text{ (الرعاية الصحية)} - 009,00 \text{ (ب.د.ب.)} + 20000 \text{ (التضخم)} - 020,2 \text{ (إ.إ.)} - 11 \text{ (ز.إ.س.)}$. اعتمادا على اختبارات مع قيمة كبير لـ ز.إ.س. ٢١٩,٠٠ وللتضخم ٥٢٠,٠٠ وللتعليم ٠,٠٠,٠٠ وللرعاية الصحية ٩٥٠,٠٠ ولـ ب.د.ب. ٠,٢٠,٠٠ اللاتي لجميع العوامل المستقلين أثر في العامل التابع فهو الفقر الذي له القيمة أكثر من ١,٠٠. والإقتراحات، أن ترفي الحكومة المركزية و ب.أ.ز.ن.س. في جمع ز.إ.س. و أ.ب.ب.ن. ثم توزيعهما لأنهما ستعطيان الأسهم في تخفيض الفقر في إندونيسيا وذلك الحال وفقا لدين الإسلام الذي يركز صفة العدل في توزيع الدخل كما ذكر في سورة الهمزة آية ١-٦ التي تتضمن عن العذاب الكبير لمن الذين يمنعون التوزيع.

الألفاظ المهمة: تسوق التعليم، الإنفاق على الرعاية الصحية، ب.د.ب. ، التضخم، ز.إ.س.، الفقر

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin. Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

No.	Arab	Latin	Keterangan	No.	Arab	Latin	Keterangan
1.	ا	-	Tidak dilambangkan	16.	ط	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
2.	ب	b	-	17.	ظ	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
3.	ت	t	-	18.	ع	‘	koma terbalik letak di atas
4.	ث	ṡ	s (dengan titik di atasnya)	19.	غ	G	-
5.	ج	j	-	20.	ف	F	-
6.	ح	ḥ	H (dengan titik di bawahnya)	21.	ق	Q	-
7.	خ	kh	-	22.	ك	K	-
8.	د	d	-	23.	ل	L	-
9.	ذ	ẓ	z (dengan titik di atasnya)	24.	م	M	-
10.	ر	r	-	25.	ن	N	-
11.	ز	z	-	26.	و	W	-
12.	س	s	-	27.	ه	H	-
13.	ش	sy	-	28.	ء	‘	Apostrof
14.	ص	ṣ	S (dengan titik dibawahnya)	29.	ي	Y	-
15.	ض	ḍ	d (dengan titik dibawahnya)				

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syiddah* (ّ) ditulis rangkap.

Contoh : الله ditulis *innahu*

3. *Tā'marbūtah* di akhir kata

3.1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: 1. جمعة ditulis *jamā'ah* 2. مكتبة ditulis *maktabah*

3.2. Bila dihidupkan ditulis t

Contoh : مكتبة الجامعة ditulis *maktabatu 'l-jāmi 'ah*

4. Vokal Panjang (*mad*)

Fathah (baris di atas) di tulis ā, *kasrah* (baris di bawah) di tulis ī, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan ū. Misalnya; الناس ditulis *an-nās*, الرحيم ditulis *ar-rahīm* المسلمون ditulis *al-muslimūn*.

5. Vokal pendek yang berurutan dipisahkan dengan tanda pisah (-)

شيء قد ير, ditulis *syai-in qadīr*

6. Kata Sandang Alif+Lam

Bila Alif + lam diikuti oleh huruf-huruf qamariyah, yang terkumpul dalam kata ابغي حرك وجق عقمه alif, b, g, y, h, j, k, w, kh, f, ', q, m, t) ditulis *al*, misalnya; المسلمون ditulis *al-muslimūn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah (huruf hijaiyah selain huruf qamariyah), huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرحمن ditulis *ar-rahmān*.

7. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat, misalnya :

Penghubung antar kata menggunakan tanda petik ('), sedangkan penghubung dalam satu kata menggunakan tanda pisah (-).

بسم الله الرحمن الرحيم dibaca *bismi 'l-Lāhi 'r-rahmāni 'r-rahīm*

DAFTAR ISI

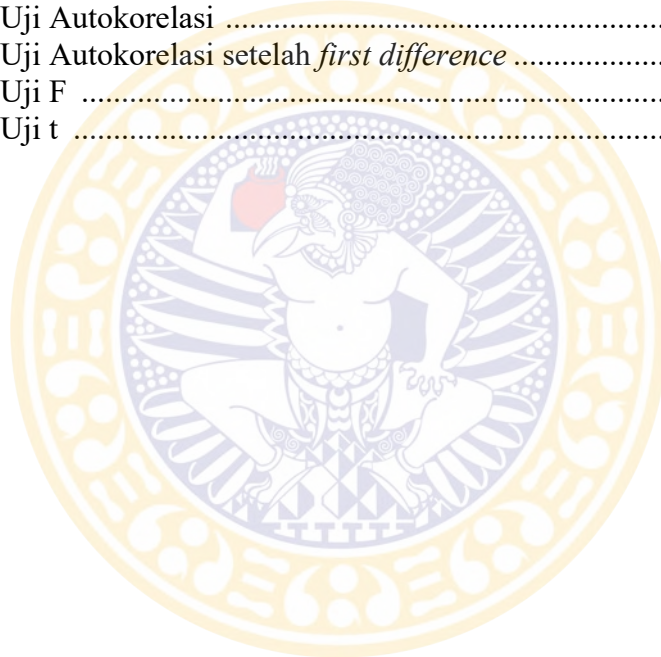
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
DECLARATION	iv
KATA PENGANTAR	v
Abstraksi	ix
Abstract	x
Abstraksi Bahasa Arab	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	 12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Kemiskinan.....	12
2.1.1.1 Kriteria Kemiskinan.....	13
2.1.1.2 Jenis - Jenis Kemiskinan.....	13
2.1.1.3 Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah.....	15
2.1.1.4 Program Pengentasan Kemiskinan BAZNAS.....	16
2.1.2 Distribusi dalam Islam	27
2.1.2.1 Keadilan Dalam Distribusi.....	28
2.1.2.2 Dampak Menghambat Distribusi.....	28
2.1.3 Amil Zakat.....	29
2.1.4 Zakat Infaq Sedekah.....	31
2.1.4.1 Pengertian Zakat.....	31
2.1.4.2 Landasan Hukum Zakat.....	31
2.1.4.3 Sebab Syarat dan Rukun Zakat.....	32
2.1.4.4 Manfaat Zakat.....	33
2.1.4.5 Muzakki dan Mustahiq	34
2.1.4.6 Pengertian Infaq.....	38
2.1.4.7 Pengertian Sedekah.....	39
2.1.5 Inflasi.....	40
2.1.5.1 Pengertian	40
2.1.5.2 Jenis Inflasi	41
2.1.6 Pendidikan	44

2.1.7 Kesehatan	45
2.1.8 Pertumbuhan Ekonomi	47
2.2 Hubungan Antar Variabel	48
2.2.1 Hubungan ZIS terhadap Kemiskinan	48
2.2.2 Hubungan Inflasi terhadap Kemiskinan	49
2.2.3 Hubungan Belanja Pendidikan terhadap Kemiskinan	49
2.2.4 Hubungan Belanja Kesehatan terhadap Kemiskinan	52
2.2.5 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan	52
2.3 Penelitian Terdahulu	54
2.4 Hipotesis	59
2.5 Model Analisis	59
2.6 Kerangka Berfikir	61
BAB 3 METODE PENELITIAN	64
3.1 Pendekatan Penelitian	64
3.2 Identifikasi Variabel	64
3.3 Definisi Operasional	65
3.4 Teknik Pengambilan Sampel	67
3.5 Prosedur Pengumpulan Data	68
3.6 Teknik Analisis Data	68
3.6.1 Statistik Deskriptif	68
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	69
3.6.2.1 Uji Normalitas	69
3.6.2.2 Uji Multikolinieritas	69
3.6.2.3 Uji Autokorelasi	70
3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas	71
3.6.3 Kriteria Statistik Model	72
3.6.3.1 Koefisien Determinasi (R^2) dan Adjusted R^2	72
3.6.3.2 Analisis Regresi Berganda	73
3.6.3.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji T)	73
3.6.3.4 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	74
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
4.1 Gambaran Umum Subyek dan Obyek Penelitian	75
4.1.1 Profil Singkat Lembaga Negara	76
4.1.1.1 Badan Amil Zakat Nasional	76
4.1.1.2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	78
4.1.1.3 Kementerian Kesehatan	82
4.1.1.4 Bank Indonesia	84
4.1.1.5 Kementerian Keuangan	86
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	88
4.2.1 Deskripsi Distribusi Dana Zakat, Infaq, Sedekah	88
4.2.2 Deskripsi Inflasi	91
4.2.3 Deskripsi Belanja Pendidikan	92
4.2.4 Deskripsi Belanja Kesehatan	95
4.2.5 Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi	97

4.2.6 Deskripsi Kemiskinan	99
4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pembuktian Hipotesis	101
4.3.1. Uji Asumsi Klasik	101
4.3.1 Uji Multikolinieritas	101
4.3.2 Uji Autokorelasi	104
4.3.3 Uji Heterokedastisitas	105
4.3.4 Uji Normalitas	108
4.3.2 Analisis Koefisien Determinasi Berganda	110
4.3.3 Analisis Regresi Berganda	110
4.3.4 Pengujian Hipotesis	111
4.3.4.1 Uji F	111
4.3.4.2 Uji t	113
4.4 Pembahasan	115
4.4.1 Pengaruh Distribusi Dana ZIS Badan Amil Zakat Nasional Terhadap Kemiskinan di Indonesia Secara Parsial	115
4.4.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Secara Parsial	117
4.4.3 Pengaruh Belanja Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Indonesia Secara Parsial	117
4.4.4 Pengaruh Belanja Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia Secara Parsial	118
4.4.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Secara Parsial	120
4.4.6 Pengaruh Distribusi Dana ZIS Badan Amil Zakat Nasional, Inflasi, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi Secara Simultan Terhadap Kemiskinan di Indonesia	120
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	122
5.1 Simpulan	122
5.2 Saran	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS Indonesia	5
Tabel 1.2	Presentase Penduduk Miskin di Indonesia	6
Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	57
Tabel 4.1	Distribusi Dana ZIS di BAZNAS Indonesia	89
Tabel 4.2	Tingkat Inflasi di Indonesia	91
Tabel 4.3	Realisasi APBN untuk Pendidikan di Indonesia	93
Tabel 4.4	Realisasi APBN untuk Kesehatan di Indonesia	95
Tabel 4.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran	97
Tabel 4.6	Persentase Penduduk Miskin di Indonesia	99
Tabel 4.7	Uji Multikolinearitas	102
Tabel 4.8	Uji Multikolinearitas setelah <i>first difference</i>	103
Tabel 4.9	Uji Autokorelasi	104
Tabel 4.10	Uji Autokorelasi setelah <i>first difference</i>	105
Tabel 4.11	Uji F	112
Tabel 4.12	Uji t	114



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Catur Daya Program <i>Zakat Community Development</i>	18
Gambar 2.2 Enam Prinsip Program <i>Zakat Community Development</i>	19
Gambar 2.3 Kelompok Rumah Makmur BAZNAS	21
Gambar 2.4 Program Rumah Cerdas Anak Bangsa BAZNAS	23
Gambar 2.5 Rumah Dakwah BAZNAS	25
Gambar 2.6 Skema Program Mobil / Motor Pintar BAZNAS	26
Gambar 2.7 Cost Push Inflation	42
Gambar 2.8 Demand Pull Inflation	43
Gambar 2.9 Segitiga Kemiskinan, Pertumbuhan dan Ketimpangan	53
Gambar 2.10 Model Analisis	60
Gambar 2.11 Kerangka Berpikir	61
Gambar 4.1 Distribusi Dana ZIS di BAZNAS Indonesia	90
Gambar 4.2 Inflasi di Indonesia	92
Gambar 4.3 Realisasi APBN untuk Pendidikan di Indonesia	94
Gambar 4.4 Realisasi APBN untuk Kesehatan di Indonesia	96
Gambar 4.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran	98
Gambar 4.6 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia	100
Gambar 4.7 Uji Heteroskedastisitas	106
Gambar 4.8 Uji Heteroskedastisitas setelah <i>first difference</i>	107
Gambar 4.9 Uji Normalitas	108
Gambar 4.10 Uji Normalitas setelah <i>first difference</i>	109

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Awal	xix
Lampiran 2 Tabulasi Setelah <i>first difference</i>	xx
Lampiran 3 Hasil Running Awal	xxi
Lampiran 4 Hasil Running Setelah <i>first difference</i>	xxii



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATARBELAKANG

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator bagi suatu negara untuk mengukur taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, meningkatkan pertumbuhan ekonomi merupakan upaya yang terstruktur dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Perubahan kondisi perekonomian menuju keadaan yang lebih baik merupakan dambaan bagi setiap pemerintah negara. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari masa ke masa mengalami kenaikan dan juga penurunan. Faktor – faktor makro yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, faktor budaya serta faktor ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi dapat optimal apabila faktor – faktor yang mempengaruhi seharusnya dikelola secara optimal. Dengan optimalnya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan setiap warga negara dapat merata serta pertumbuhan ekonomi yang optimal tersebut dapat dinikmati tidak hanya oleh sebagian warga negara melainkan juga seluruh warga negara.

Problematika saat ini adalah walaupun pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut dapat dikatakan optimal atau telah memenuhi target yang telah

ditentukan, namun yang dapat menikmatinya hanya segelintir warga negara. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti dengan pemerataan hasil pembangunan kepada seluruh lapisan golongan masyarakat, maka hal tersebut kurang ada manfaatnya dalam mengurangi angka kemiskinan.

Faktor selain pertumbuhan ekonomi yang dapat berpengaruh terhadap angka kemiskinan adalah tingkat inflasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan juga distribusi dana ZIS yang terdapat pada Badan Amil Zakat Nasional. Untuk tingkat inflasi, pengaruhnya terhadap angka kemiskinan adalah ketika terjadi inflasi yang tidak terkontrol seperti saat tahun 1998. Pada saat itu harga – harga seluruhnya meningkat drastis dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun bahkan terdapat masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Menurunnya daya beli masyarakat hingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yang disebabkan oleh meningkatnya inflasi juga dapat meningkatkan angka kemiskinan. Dengan semakin menurunnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok maka akan semakin selaras dengan standar seseorang dapat dikatakan miskin oleh United Nation Development Programme (UNDP) yaitu seseorang dikatakan miskin apabila pengeluarannya dibawah 2\$ setiap harinya.

Persentase kemiskinan disaat krisis tahun 1998 meningkat dengan drastis lebih lagi pada saat itu, jumlah orang yang sempat menempuh pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi masih sedikit dibandingkan dengan masyarakat yang hanya dapat menempuh jenjang pendidikan baik sekolah dasar,

menengah pertama maupun menengah atas. Dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih cukup rendah, semakin menyulitkan masyarakat untuk memperbaiki taraf hidupnya. Hal tersebut disebabkan oleh kebutuhan dunia kerja yang mengharuskan calon pekerja telah menempuh jenjang pendidikan yang disyaratkan seperti minimal seorang calon pekerja di sebuah perusahaan multi nasional wajib memiliki ijazah strata satu atau sarjana.

Berdasarkan hal tersebut, maka hanya kalangan tertentu saja yaitu kalangan yang telah menempuh pendidikan hingga strata satu saja yang dapat melamar pada lowongan pekerjaan tersebut. Tidak meratanya akses untuk mendapatkan layanan pendidikan yang dimana biaya untuk menempuh pendidikan yang masih dinilai mahal oleh sebagian masyarakat terutama masyarakat miskin akan semakin membuat masyarakat miskin sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Peran pendidikan dalam mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan sangatlah vital. Peran tersebut antara lain apabila seseorang yang dinilai tidak memiliki pendidikan yang cukup dan orang tersebut berasal dari keluarga yang tidak mampu, akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Apabila dibandingkan dengan seseorang yang sama – sama berasal dari keluarga tidak mampu akan tetapi memiliki pendidikan yang cukup, akan lebih mudah untuk mencari pekerjaan yang layak yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Untuk mewujudkan pemerataan pendidikan, peran dari pemerintah sangat dibutuhkan disini karena pemerintah adalah penyelenggara utama dan penjamin

kualitas pendidikan masyarakatnya. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui sektor pendidikan, pemerintah menggelontorkan sejumlah dana yang wajib digunakan hanya pada sektor pendidikan.

Sektor lain yang tidak kalah penting adalah sektor kesehatan. Karena menurut Setyowati (2014) dengan adanya peningkatan status kesehatan yang lebih baik akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Dengan meningkatnya produktivitas penduduk miskin, maka akan meningkatkan income yang dimana konsumsi penduduk miskin juga akan meningkat. Meningkatnya konsumsi penduduk miskin menjadikan salah satu indikator bahwa taraf kehidupan penduduk miskin juga meningkat menjadi lebih baik.

Untuk mewujudkan peningkatan status kesehatan yang lebih baik, peran pemerintah disini sangat diperlukan. Peran pemerintah disini adalah sebagai penyelenggara utama dan penjamin kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Peran tersebut didukung dengan menyediakan anggaran yang hanya dapat digunakan untuk sektor kesehatan. Harapan dari penyediaan anggaran untuk kesehatan adalah meningkatnya taraf hidup dan produktivitas masyarakat miskin. Jika dalam Islam, kondisi tersebut sama seperti masyarakat yang awalnya *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Masyarakat yang sebelumnya berada pada kondisi menjadi *mustahiq* lantas menjadi seorang *muzakki* memiliki kewajiban dalam membayarkan zakat dan dianjurkan untuk bersedekah. Kewajiban tersebut tidak lain memiliki maksud dan

tujuan agar masyarakat yang masih berada pada posisi menjadi *mustahiq* diharapkan terangkat derajatnya dan menjadi seorang *muzakki*. Oleh sebab itu masyarakat yang memiliki kewajiban membayar zakat mendistribusikan baik dana zakatnya maupun infaq serta sedekahnya kepada lembaga ataupun badan resmi yang terpercaya.

Distribusi dana zakat, infaq maupun sedekah di Indonesia sejatinya telah berlangsung sejak Islam pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh para saudagar. Pada saat itu, kontribusi dana ZIS dalam perekonomian belum memberikan kontribusi yang positif dan konstruktif. Akan tetapi, sejak terbentuknya badan amil zakat yang memiliki wewenang dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan sedekah, kontribusi dana ZIS dalam membangun perekonomian negara menjadi lebih signifikan.

Tabel 1.1
Pengumpulan dan Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS Indonesia
Periode 2004 hingga 2014
Dalam Rupiah

Tahun	Pengumpulan	Penyaluran
2004	3.124.474.105,64	1.721.045.407,00
2005	31.164.839.539,00	15.337.087.242,00
2006	16.724.491.935,00	10.720.460.599,00
2007	10.335.742.653,00	11.340.132.271,00
2008	17.467.803.197,00	8.380.912.180,00
2009	24.119.593.139,00	17.001.532.246,00
2010	26.464.019.958,00	29.036.529.372,00
2011	39.865.101.493,00	37.756.050.334,00
2012	50.313.748.002,00	39.077.122.821,00
2013	59.238.304.066,00	43.230.066.719,00
2014	69.142.908.928,00	42.301.879.072,00

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional. (Email) (Di akses 20 Juni 2016)

Apabila dilihat pada tabel diatas, memang pendistribusian atau penyaluran Zakat, Infaq serta Sedekah mengalami kenaikan dan penurunan mulai periode

tahun 2004 hingga 2009. Pada rentang periode tersebut, terjadi kenaikan penyaluran yang drastis pada tahun 2005 sebesar Rp15.337.087.242,00 dan apabila dibandingkan dengan tahun 2004 hanya sebesar 1.721.045.407,00. Setelah tahun 2005 hingga 2009 hanyalah terjadi kenaikan dan penurunan yang tidak begitu drastis yang mana tidak melebihi angka Rp 5.000.000.000,-. Sedangkan mulai periode tahun 2009 hingga 2013 secara konstan mengalami kenaikan dalam pendistribusian atau penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Indonesia.

Kecenderungan distribusi dana ZIS yang meningkat, diharapkan penghasilan atau income para *mustahiq* juga meningkat. Penyebab meningkatnya kemiskinan di Indonesia salah satunya adalah tidak adanya penghasilan atau income yang masuk karena orang tersebut baik menganggur maupun setengah menganggur. Berikut ini adalah sedikit gambaran mengenai angka kemiskinan di Indonesia.

Tabel 1.2
Presentase Penduduk Miskin
Periode 2011 hingga 2014

Periode	Presentase Penduduk Miskin
	Kota + Desa
Mar – 11	12,49
Sep – 11	12,36
Mar – 12	11,96
Sep – 12	11,66
Mar – 13	11,37
Sep – 13	11,47
Mar – 14	11,25
Sep – 14	10,96

Sumber : Badan Pusat Statistik. *Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin.*

Tahun 2011-2014, (Online), (<http://bps.go.id>, diakses 21 April 2016)

Berdasarkan tabel diatas, persentase kemiskinan di Indonesia mengalami naik dan turun. Naik turunnya persentase kemiskinan berdasarkan tabel diatas tidak terpaut jauh. Sempat menyentuh angka 10,96 persen, persentase kemiskinan kembali meningkat pada periode berikutnya sebesar 11,22 persen. Hal tersebut semakin menjadikan Indonesia memiliki beban kewajiban untuk membebaskan rakyatnya dari belenggu rantai kemiskinan dengan menggunakan instrumen – instrumen yang telah disusun. Instrumen – intrumen tersebut seperti distribusi dana ZIS oleh Badan Amil Zakat Nasional, belanja pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional, belanja kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia serta pengendalian pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Pentingnya akan penekanan kemiskinan di Indonesia melalui distribusi zis oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga negara non struktural yang didukung dengan peraturan perundang - undangan, belanja pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional, belanja kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia serta pengendalian pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk menurunkan angka kemiskinan semakin terbukti karena dapat meratakan pendapatan.

Sejauh mana pengaruh keseluruhan variabel tersebut dalam mengatasi kemiskinan, akan peneliti lakukan sebuah penelitian untuk mengetahuinya. Oleh

karena itu, saya sebagai peneliti ingin mengangkat topik **“Pengaruh Distribusi Dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional, Inflasi, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia”** sebagai topik skripsi saya yang mana studi kasusnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki wewenang dalam hal mengumpulkan, mengelola dan juga mendistribusikan ZIS.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah :

1. Apakah distribusi dana ZIS berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia ?
2. Apakah Inflasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia?
3. Apakah belanja pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia ?
4. Apakah belanja kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia ?
5. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia ?
6. Apakah pdistribusi dana ZIS, inflasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan pertumbuhan ekonomi secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui apakah distribusi dana ZIS berpengaruh signifikan

terhadap kemiskinan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah belanja pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah belanja kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
5. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
6. Untuk mengetahui apakah distribusi dana ZIS, inflasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan secara bersama – sama terhadap kemiskinan di Indonesia.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan akan diperoleh melalui penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah :

1. Bagi pemerintah, dapat memberikan kontribusi pertimbangan dalam menentukan kebijakan dalam mengurangi angka kemiskinan baik dengan melalui menyalurkan dana ZIS maupun apbn secara tepat guna.
2. Bagi masyarakat, agar dapat mengetahui bahwa dengan menyalurkan zakat dan infaq kepada badan amil zakat nasional dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Dan juga agar masyarakat tahu bahwa pemerintah melalui kementerian terkait berusaha untuk membuat rakyatnya sejahtera.

3. Bagi kemajuan ilmu pengetahuan, dapat memberikan kontribusi informasi dalam pengembangan instrumen dalam menghimpun dan menyalurkan tidak hanya zakat dan infaq tetapi juga apbn agar dapat lebih optimal.
4. Bagi penelitian selanjutnya, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pertumbuhan distribusi zakat dan infaq terhadap penurunan angka kemiskinan.

1.5 SISTEMATIKA SKRIPSI

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah yang membahas tentang fenomena dan perkembangan ZIS saat ini, apa saja rumusan masalah dari penelitian ini, tujuan daripada penulisan skripsi ini, manfaat daripada penulisan skripsi ini serta bagaimana sistematika skripsi ini disusun.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori, hipotesis penelitian, hubungan antar variabel dan penelitian sebelumnya. Landasan teori disini membahas mengenai kemiskinan, distribusi dalam islam, ZIS serta inflasi. Tidak hanya itu, dalam bab ini juga dibahas mengenai hubungan antara ZIS dengan kemiskinan dan juga hubungan inflasi dengan kemiskinan.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi dari variabel penelitian, definisi operasional, teknik pengambilan sampel, prosedur pengambilan data penelitian serta teknik

yang digunakan dalam menganalisa data. Dalam subbab definisi operasional akan membahas tentang pertumbuhan ZIS dan inflasi serta penurunan angka kemiskinan.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan tentang subyek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan dari hasil penelitian dan juga pembahasan deskriptif atas pengujian hipotesis yang dilakukan untuk dapat memecahkan masalah dari penelitian tersebut.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan masalah dan tujuan yang diinginkan dari penelitian ini. Selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Kemiskinan

Kemiskinan menurut United Nation Development Programme (UNDP) dalam Amalia (2010) adalah seseorang yang dikategorikan sebagai orang miskin jika memiliki pengeluaran di bawah US\$ 2 per hari. Selain itu UNDP dalam Amalia (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang kehilangan tiga hal utama, yaitu :

a. Kehidupan

Lebih dari 30 persen penduduk negara – negara paling miskin cenderung hidup kurang dari empat puluh tahun.

b. Pendidikan dasar

Diukur dari presentase penduduk dewasa yang buta huruf.

c. Ketetapan ekonomi

Diukur dari presentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dan air bersih ditambah dengan presentase anak-anak di bawah usia lima tahun yang kekurangan berat badan.

Lain UNDP, lain pula pengertian kemiskinan dalam perspektif islam. Menurut mazhab hanafi dalam Amalia (2010), miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari – hari. Sedangkan menurut mazhab syafi'i, hambali dan maliki dalam Amalia (2010) menyebutkan bahwa miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan

layak dalam memenuhi keperluannya dan keperluan orang lain yang menjadi tanggungannya tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.

2.1.1.1. Kriteria Kemiskinan

Kriteria kemiskinan yang digunakan setiap negara tentu berbeda – beda. Perbedaan kriteria kemiskinan tersebut diakibatkan oleh kondisi geografis atau lokasi dari masing – masing negara yang berbeda dan juga standar hidup sebagaimana telah disebutkan Amalia (2010). Di Indonesia, institusi yang meneliti tentang batas kemiskinan atau garis kemiskinan adalah Badan Pusat Statistik (BPS).

Badan Pusat Statistik dalam menentukan garis kemiskinan dalam Amalia (2010) menggunakan besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Sedangkan untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2100 kalori per hari sebagaimana telah disebutkan Amalia (2010).

BPS dalam menentukan garis kemiskinan menggunakan besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan lain halnya dalam perspektif islam. Dalam perspektif Islam sebagaimana disebutkan oleh Ryandono (2008:46) dalam Amalia (2010) seseorang akan menjadi *Muzakki* apabila harta yang dimilikinya telah mencapai nisab dan orang tersebut dikategorikan telah sejahtera.

2.1.1.2. Jenis – jenis Kemiskinan

Menurut Nugroho dalam Amalia (2009:15), secara umum kemiskinan dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Kemiskinan Natural (Alamiah)

Kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terbatas. Akibat dari terbatasnya kualitas daripada kedua sumber daya tersebut adalah dalam operasi produksi tidak dapat berjalan dengan maksimal dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang rendah. Adapun ciri – ciri daripada kemiskinan alamiah adalah masih menggunakan teknologi yang rendah, surplus yang didapatkan dalam kegiatan produksi rendah dan juga wilayahnya mengalami proses keterbelakangan.

2. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan yang mana secara langsung ataupun tidak langsung disebabkan oleh berbagai kebijakan, peraturan dan keputusan dalam proses pembangunan. Kemiskinan jenis ini secara umum memiliki ciri – ciri yaitu terdapat kesenjangan dalam memiliki sumber daya, kesempatan dalam memperoleh sumber daya dan juga faktor – faktor lain yang mempengaruhi

3. Kemiskinan Kultural (Budaya)

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang dipengaruhi oleh kebiasaan bergaya hidup boros, tidak cakap bekerja yang mana dapat berakibat pada rendahnya tabungan masyarakat. Tidak hanya dipengaruhi yang disebutkan sebelumnya, melainkan juga terdapat sifat pasrah terhadap lingkungan kemiskinan sehingga dapat mendorong masyarakat lebih jauh ke dalam lingkungan kemiskinan hingga terjebak didalamnya.

2.1.1.3. Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah

Upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mempercepat penanggulangan kemiskinan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang telah disempurnakan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tersebut berisi tentang apa yang dimaksud dengan penanggulangan kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan, strategi – strategi penanggulangan kemiskinan hingga siapa saja yang terlibat dalam Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Kerangka kerja dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional. Selain itu, strategi yang digunakan oleh TNP2K dalam menanggulangi kemiskinan mulai dari tingkat rumah tangga masyarakat miskin hingga tingkat nasional yang bersinergi dengan TNP2K tingkat Provinsi dan Kota atau Kabupaten. Strategi yang digunakan sebagaimana menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 antara lain mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan penghasilan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil serta mensinergikan kebijakan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

Program percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang telah tertera pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 adalah wajib dilaksanakan oleh anggota TNP2K. Anggota yang termasuk dalam Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan antara lain kementerian atau lembaga pemerintah baik pada tingkat nasional maupun daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha dan lembaga internasional yang juga memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

Program percepatan yang wajib dijalankan oleh anggota TNP2K sebagaimana tertera pada Perpres Nomor 15 Tahun 2010 terdiri dari 4 garis besar yaitu *pertama* kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. *Kedua*, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip – prinsip pemberdayaan masyarakat.

Ketiga, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang memiliki tujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. *Keempat*, program – program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

2.1.1.4. Program Pengentasan Kemiskinan BAZNAS

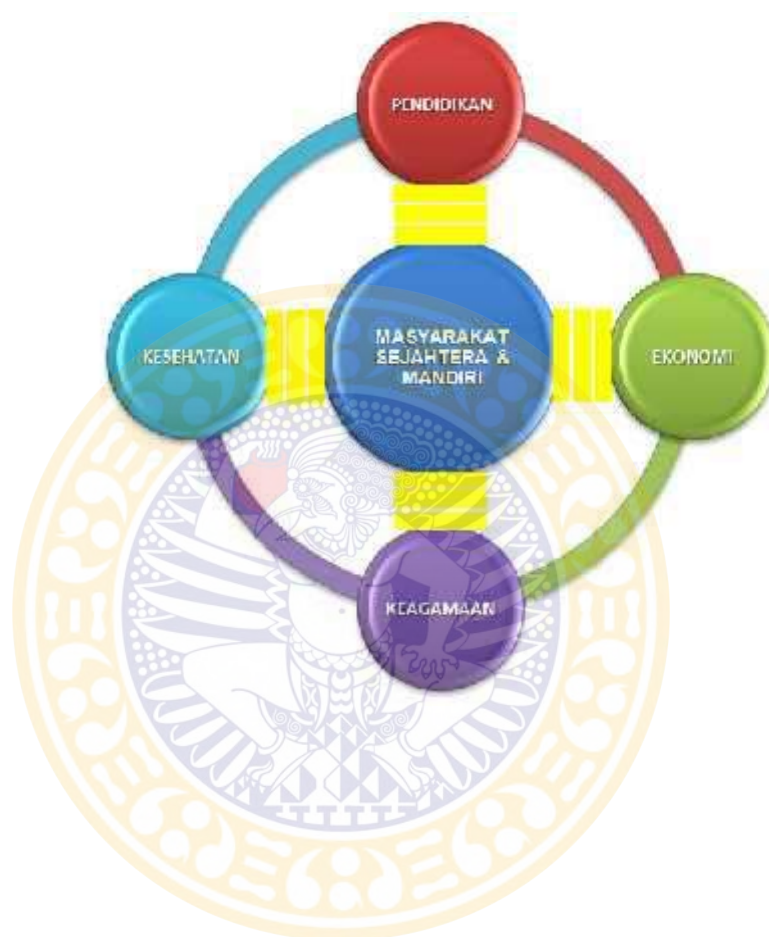
Tidak hanya pemerintah pusat yang memiliki program pengentasan kemiskinan baik melalui kementerian atau lembaga pemerintah secara struktural, melainkan juga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selaku lembaga

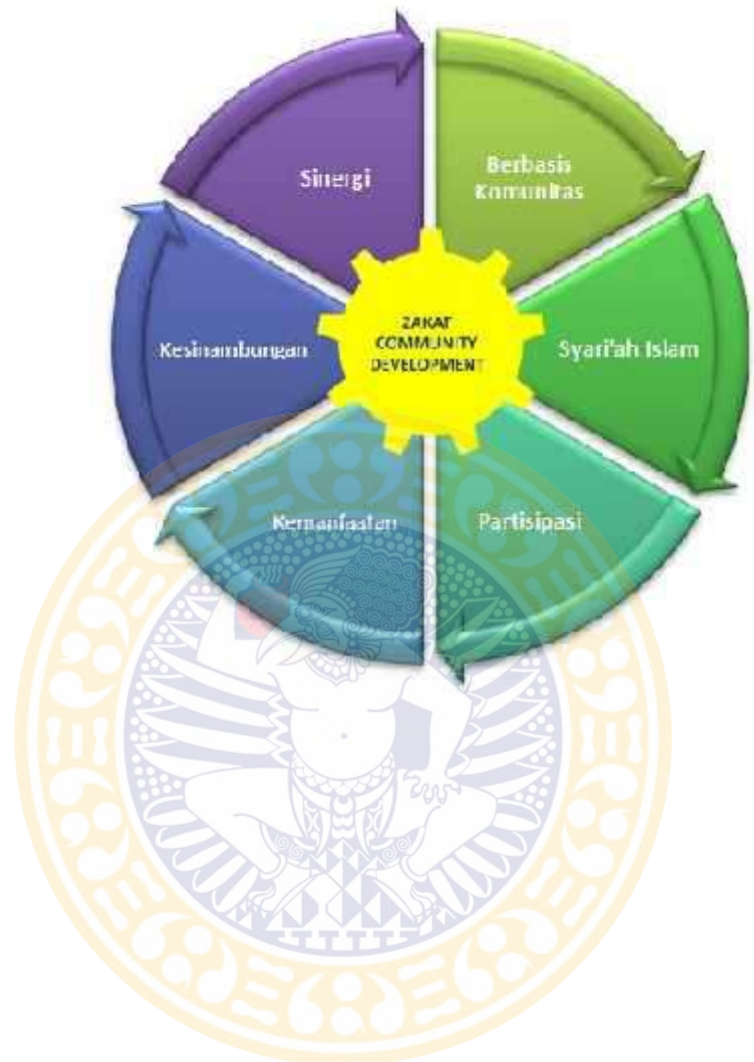
pemerintah resmi non struktural pun juga memiliki program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana tercantum dalam situs resmi BAZNAS, program tersebut antara lain *zakat community development*, rumah sehat BAZNAS, rumah cerdas anak bangsa, rumah makmur BAZNAS, rumah dakwah BAZNAS, konter layanan mustahiq hingga tanggap darurat bencana.

Program BAZNAS *zakat community development* adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri.

Tujuan utama pelaksanaan program *zakat community development* sebagaimana tercantum dalam situs resmi BAZNAS adalah terwujudnya masyarakat sejahtera dan mandiri. Adapun terdapat tujuan khusus dari program tersebut antara lain menumbuhkan kesadaran dan kepedulian *mustahiq* atau penerima manfaat tentang kehidupan yang berkualitas, menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian masyarakat, menumbuhkan jaringan sosial ekonomi kemasyarakatan serta menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Program *zakat community development* agar dapat menentukan apakah program tersebut telah berhasil mencapai tujuan utamanya atau tidak memiliki empat aspek kehidupan yang harus terpenuhi yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan dan keagamaan. Apabila empat aspek tersebut telah terpenuhi maka



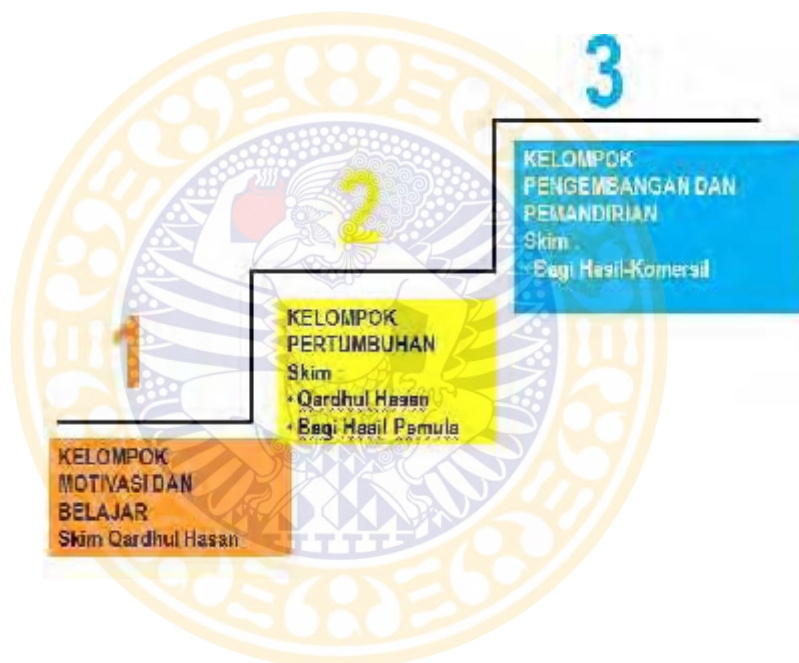


nilai tambah dari program baik kemanfaatan atau nilai tambah berupa materi maupun non materi bagi para *mustahiq*.

Setelah para *mustahiq* menerima nilai tambah dari program, prinsip *kelima* yang tidak dapat dipandang sebelah mata adalah kesinambungan atau keberlanjutan program agar penerima manfaat atau *mustahiq* dapat meningkatkan statusnya sebagai *muzakki*. Prinsip *keenam* yaitu sinergi dari berbagai pihak agar setelah suatu wilayah yang menerima manfaat dari program yang semula hanya menjadi *mustahiq* meningkat menjadi *muzakki* serta dapat meningkatkan kesejahteraan para *mustahiq* dari wilayah lain disekitarnya.

Program pemberdayaan masyarakat melalui bidang ekonomi yang dimiliki oleh BAZNAS tidak hanya *zakat community development* yang memberdayakan ekonomi para *mustahiq* secara kolektif tetapi juga memiliki program bidang ekonomi yang memberdayakan ekonomi masyarakat secara individu yang bernama Rumah Makmur Baznas (RMB). Program Rumah Makmur Baznas disini adalah program yang diperuntukkan khusus bagi para *mustahiq* yang ingin meningkatkan kehidupan ekonominya secara personal. Dalam program ini, BAZNAS mendirikan lembaga mikro syariah berbadan hukum koperasi yang berfungsi untuk menyalurkan ZIS secara produktif baik melalui pinjaman kebajikan (*Al Qardhul Hasan*) maupun dengan pembiayaan berlandaskan syariah kepada para *mustahiq*.

Berdasarkan laman resmi BAZNAS, dalam menjalankan program RMB diatas, BAZNAS mengelompokkan para *mustahiq* menjadi tiga kelompok besar agar memudahkan dalam penentuan bantuan yang tepat kepada *mustahiq* yaitu

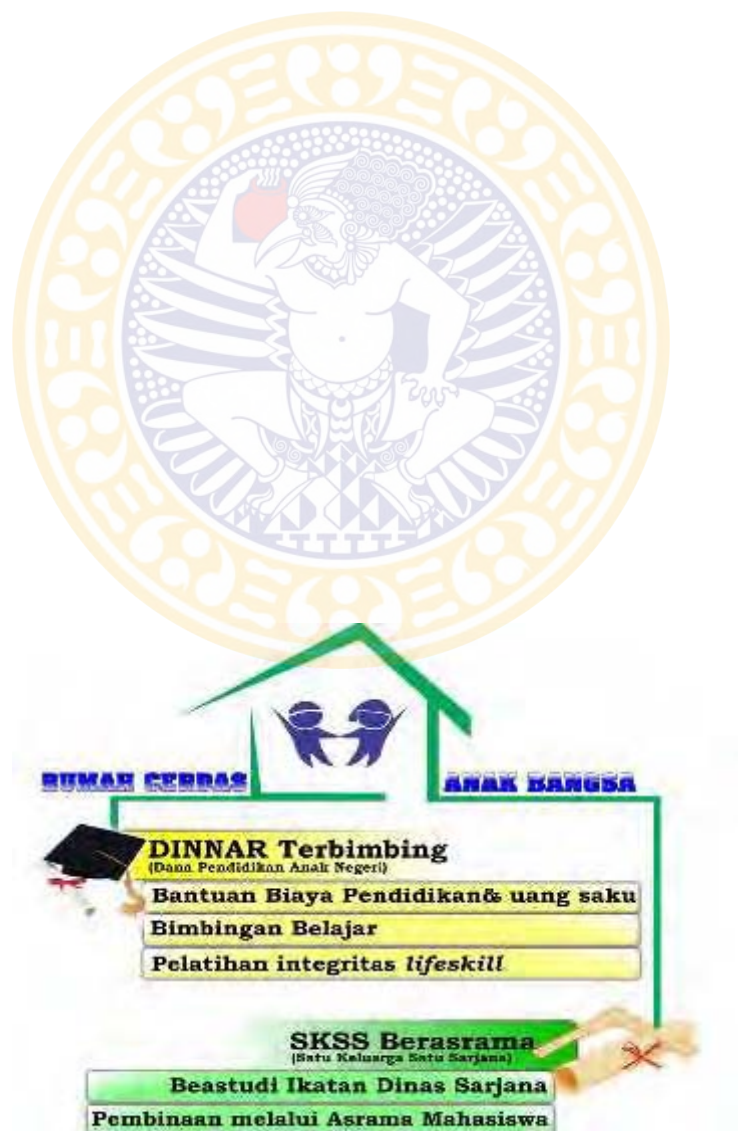


usaha akan nampak aslinya dan akan cenderung konstan pada kondisi tersebut. Dengan kondisi tersebut, RMB memiliki penawaran untuk *mustahiq* dalam menumbuhkan usaha *mustahiq* melalui pemberian pinjaman *Qardhul Hasan* ataupun bagi hasil dengan nisbah yang tidak memberatkan.

Pada kelompok yang ketiga, yang mana dari pihak BAZNAS melalui *baitul maal* tidak lagi memberlakukan pinjaman kebajikan atau *Qardhul Hasan* maupun bagi hasil pemula tetapi akan menggunakan pembiayaan dengan bagi hasil komersil karena telah dianggap berkembang dan dapat mandiri kegiatan ekonomi *mustahiq*.

Apabila program ZCD dan RMB bergerak dalam bidang ekonomi, BAZNAS juga masih memiliki program lain di bidang kesehatan yaitu Rumah Sehat Baznas atau RSB yang masih tersebar di tiga kota besar yaitu Jakarta, Yogyakarta dan Makassar. Maksud dan tujuan pelaksanaan program RSB yaitu agar para *mustahiq* dapat merasakan pelayanan kesehatan secara profesional, humanis dan komprehensif. Adapun bantuan yang akan diperoleh oleh *mustahiq* sebagaimana tercantum dalam situs resmi BAZNAS adalah berupa layanan rawat jalan dan kesehatan spesialis.

Program – program dari BAZNAS untuk mengangkat dan menanggulangi masyarakat dari kemiskinan tidak hanya pemberdayaan ekonomi secara kolektif melalui program ZCD dan RMB serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui RSB tetapi juga tetap memperhatikan sektor pendidikan, keagamaan, konseling bagi *mustahiq* serta sektor situasional atau tanggap darurat bencana.



Adapun program dari Rumah Cerdas Anak Bangsa antara lain beasiswa Dana Pendidikan Anak Negeri atau DINNAR , Satu Keluarga Satu Sarjana, bimbel gratis, rumah pintar serta mobil atau motor pintar. Untuk beasiswa Dana Pendidikan Anak Negeri diberikan kepada kepada anak – anak usia sekolah dari keluarga yang tidak mampu. Bantuan yang diberikan tidak hanya semata dalam bentuk beasiswa dan uang saku melainkan juga dalam bentuk bimbingan belajar agar siswa penerima bantuan tidak kesulitan dalam mengikuti proses belajar dan dapat bersaing dengan kawan – kawannya. Selain akan menerima bantuan biaya pendidikan, uang saku dan bimbingan belajar, para siswa penerima bantuan juga akan menerima pelatihan integritas *lifeskill* baik IQ, EQ dan SQ.

Untuk program bimbingan belajar gratis diperuntukkan bagi anak – anak dari keluarga yang tidak mampu untuk memberikan tambahan belajar di lembaga bimbingan belajar pada umumnya dan terkendala dalam memahami materi saat berada di sekolah dan membutuhkan tambahan belajar. Indikator kesuksesan dari program ini adalah para siswa dapat berprestasi disekolah masing – masing dan juga nilai dari ujian nasional mereka adalah minimal nilai rata – rata di Kota atau Kabupaten siswa berdomisili.

Untuk program Satu Keluarga Satu Sarjana Berasrama atau SKSS Berasrama, bantuan hanya diberikan kepada anak – anak dari keluarga yang tidak mampu yang berusia memasuki jenjang kuliah serta memiliki keinginan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Bantuan yang akan diterima oleh anak – anak tersebut meliputi beasiswa, uang saku serta tempat tinggal di asrama



Skema Program



2.1.2. Distribusi Dalam Islam

Salah satu bidang yang juga memiliki peran penting dalam perekonomian adalah distribusi termasuk juga didalamnya distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan dalam Fauzia (2014:139) adalah menjelaskan bagaimana pembagian kekayaan ataupun pendapatan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi.

Distribusi pendapatan merupakan fokus dari tujuan dasar Islam untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara golongan kurang mampu dengan golongan mampu. Kesenjangan ekonomi dapat berkurang apabila seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya atau jika dalam Islam dapat memenuhi kebutuhan Dharuriyatnya. Perintah Allah Swt agar konsentrasi harta dan peredarannya tidak hanya pada golongan tertentu telah tertuang dalam Surat Al – Hasyr ayat 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا إِلَاتُكُمْ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Ma afa'allāhu 'alā rasulihi min ahlil qura fa lillahi wa lir rasuli wa lizil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil(i), kai la yakuna dulatam bainal agniya'i minkum, wa ma atakumur rasulu fakhuzu wa ma nahakum 'anhu fantahu, wattaqullah(a), innallaha syadidul 'iqab(i).

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hashr : 07).

2.1.2.1 Keadilan Dalam Distribusi

Adanya kesenjangan di antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya menurut Fauzia (2014:159) disebabkan oleh adanya ketidakadilan dalam distribusi. Akibat dari ketidakadilan distribusi dalam Fauzia (2014:88) adalah masyarakat miskin tidak bisa memenuhi kebutuhan yang paling dasar dalam hidupnya. Sehingga tidak mengherankan apabila saat ini masih ada seseorang yang meninggal karena kelaparan yang dideritanya. Oleh karena itu keadilan dalam distribusi harus ditegakkan.

Keadilan bukan berarti harus ada pemerataan. Menurut Fauzia (2014:159) persamaan antara dua bentuk yang berbeda tidak lebih daripada dikotomi antara dua hal yang sama, dan hal ini bukanlah keadilan namun bertentangan dengan kodrat manusia. Keadilan dalam Fauzia (2014:159) adalah keseimbangan antar-individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya.

2.1.2.2. Dampak Menghambat Distribusi

Penimbunan harta dikutuk Islam dengan ancaman siksa yang pedih, karena perputaran harta itu merupakan keharusan. Dalam Chaudry (2012:107) dilarangnya penimbunan harta itu tidak hanya memaksa harta yang tertimbun itu keluar dari peti simpanannya melainkan juga menjamin alirannya ke saluran-saluran investasi sehingga akhirnya akan sampai ke saluran distribusinya yang alami.

Inti dari larangan menimbun harta dalam Chaudry (2012:108) adalah karena kegiatan menimbun harta itu menghalangi dan membuntu beredarnya harta di masyarakat dan menjadikan harta itu terkonsentrasi di tangan sedikit orang. Itu

sama artinya dengan menjadikan harta itu tersia-siakan dan akibatnya menyengsarakan hidup banyak orang. Oleh karena itu hukuman yang diancamkan kepada penimbun harta itu amat pedih sebagaimana telah tertuang dalam surah Al – Humazah ayat 1-4

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝

Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a mālā wa 'addadah. Yahsabu anna mālāhū akhladah. Kallā layumbazanna fil hutamah. Wa mā adrūka mal hutamah. Nārullāhil mūqadah.

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa harta itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam huthamah.” (QS. Al-Humazah : 1-4).

2.1.3. Amil Zakat

Dalam sejarahnya, terbentuknya amil zakat untuk pertama kali adalah ketika pada masa pemerintahan Rasulullah SAW yang mana mengajak kaum muhajirin untuk berhijrah dari mekkah menuju madinah karena tekanan yang begitu kuat dari kaum quraisy di mekkah terhadap Rasulullah SAW serta pengikutnya. Terbentuknya amil zakat ditandai dengan berdirinya *baitul maal* yang mana adalah institusi yang mengelola keuangan negara.

Sebelum mengelola keuangan negara melalui institusi yang bernama *baitul maal*, sebagaimana telah disebutkan oleh P3EI (2008:98) Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dengan anshar terlebih dahulu agar dapat mendorong kerjasama usaha di antara anggota masyarakat sehingga terjadi peningkatan produktivitas. Dengan meningkatnya produktivitas maka sumber

penerimaan negara yaitu baik zakat, infaq maupun sedekah juga akan turut meningkat.

Meningkatnya penerimaan negara terlebih dengan telah diwajibkannya zakat setelah tahun ke – 9 H, maka tugas amil pun juga semakin berat dalam mengelolanya sebagaimana disebutkan dalam P3EI (2008:100). Sebagai amil zakat, tugas untuk mengelola tidak hanya menerima sumber penerimaan negara berupa zakat saja, melainkan juga memiliki kewajiban untuk mengambil zakat dari pihak muzakki sebagaimana tertulis dalam Al – Qur'an surah At-Taubah ayat 103 :

Pada zaman Rasulullah SAW, berbeda dengan zaman sekarang terutama di Indonesia. Di Indonesia, praktik pengelolaan zakat masih dilakukan secara tradisional. Hal itu dapat dilihat dari masih terdapat masyarakat yang langsung memberikan zakat dari muzakki kepada mustahik namun juga ada yang mempercayakan pengelolaan zakat kepada amil (pengurus) oleh muzakki. Untuk praktik yang dilakukan oleh para amil telah tertuang kewajibannya dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Khuz min amwālihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bihā wa salli ‘alaihim inna salātaka sakanul lahum wallāhu sami’un ‘alim.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah : 103).

2.1.4. Zakat Infaq Sedekah

2.1.4.1. Pengertian Zakat

Zakat jika ditinjau dari segi Bahasa sebagaimana dikemukakan oleh Effendi (2008:82) berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Maksud daripada tumbuh disini adalah apabila seseorang yang memiliki harta yang telah mencukupi batas minimum dalam hal jumlah dan syarat – syarat lainnya seperti batas waktu dan sumber dari harta tersebut wajib untuk didistribusikan kepada pihak – pihak yang berhak atasnya.

Mazhab Hanafi dalam Effendi (2008:83) mendefinisikan zakat berarti menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Maksud dari harta yang khusus disini adalah harta yang mana dikembangkan oleh pemiliknya dan dimiliki secara sepenuhnya oleh pemilik dalam jangka waktu minimal satu tahun. Sejalan dengan Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki sebagaimana dalam Effendi (2008:83) yang mana zakat adalah

“mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.”

2.1.4.2. Landasan Hukum

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilakukan karena telah tertera dalam Al-Qur'an secara jelas dan disebutkan bersamaan dengan kewajiban untuk mendirikan shalat sebanyak 82 kali dalam ayat yang berbeda.

Telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 82 kali dan bersamaan dengan perintah mendirikan sholat, yang berarti zakat sama pentingnya dengan sholat.

Kewajiban dalam menunaikan zakat dalam islam wajib bagi seluruh umatnya yang telah memenuhi syarat dalam menunaikannya sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Wa aqimus salāta wa ātuz zakāta warka'ū ma'ar rāki'in.

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS. Al-Baqarah : 43)

2.1.4.3. Sebab, Syarat dan Rukun Zakat

a. Sebab Zakat

Menurut mazhab Hanafi dalam Effendi (2008:95) berpendapat bahwa penyebab zakat ialah adanya harta milik yang mencapai *nishab* dan produktif kendatipun kemampuan produktivitas itu baru perkiraan. Dengan syarat, kepemilikan harta tersebut telah berlangsung selama satu tahun, yakni tahun qamariyah bukan syamsiyah dan pemiliknya tidak memiliki utang yang berkaitan dengan hak manusia. Adapun syarat lainnya adalah harta tersebut melebihi kebutuhan pokoknya.

b. Syarat Zakat

Syarat zakat dalam Effendi (2008:98-114) adalah :

1. Merdeka
2. Islam
3. Baligh dan Berakal
4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

5. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau yang senilai dengannya
6. Harta yang dizakati adalah milik penuh
7. Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariyah
8. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang
9. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

c. Rukun Zakat

Dalam Effendi (2008:97-98) menjelaskan bahwa mengeluarkan sebagian *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat.

2.1.4.4. Manfaat Zakat

Manfaat zakat sebagaimana disebutkan oleh Effendi (2008:87) ialah zakat merupakan pertolongan bagi orang – orang fakir dan orang – orang yang sangat memerlukan bantuan, zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya dan juga bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak.

Tidak hanya memiliki manfaat sebagaimana telah disebutkan diatas, zakat juga bermanfaat untuk menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil sebagaimana disebutkan oleh Effendi (2008:88). Manfaat lain dari zakat sebagaimana disebutkan Effendi (2008:88) adalah dapat melatih seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan.

2.1.4.5. Muzaki dan Mustahiq

Apabila terdapat orang yang berhak menerima zakat maka terdapat orang yang wajib menunaikan zakat. Orang – orang yang termasuk wajib dalam menunaikan zakat sebagaimana disebutkan Qardhawi (1999:96) adalah seorang Muslim dewasa yang waras, merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu pula.

Para ulama dalam Qardhawi (1999:86) juga sependapat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada bukan muslim, oleh karena zakat adalah anggota tubuh Islam yang paling utama, dan karena itu orang kafir tidak mungkin diminta melengkapinya, serta bukan pula merupakan hutang yang harus dibayarkan ketika masuk Islam.

Zakat yang telah terhimpun dari para muzakki di Amil Zakat hendaknya segera disalurkan kepada para *Mustahiq* (penerima zakat) sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja sebagaimana telah disebutkan oleh Hafidhuddin (2008:27-34) dalam Amalia (2010). Dalam menyalurkan zakat, sebagai amil harus memperhatikan dan mematuhi siapa saja pihak yang berhak menerima sebagaimana telah tertulis dalam Al – Qur'an surah At – Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰ ﴾

Innamas sadaqātu lil fuqarā 'i wal masākini wal 'āmilina 'alaihā wal mu'allafati qulūbuhum wa fir riqābi qal gārimina wa fi sabilillāhi wabnis sabil faridatam minallāh wallāhu 'alimun hakim.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah : 60).

1. Fakir

Menurut mazhab Hanafi dalam Qardhawi (1999:512-513) adalah orang yang tidak memiliki apa – apa di bawah nilai nisab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nisab atau lebih, yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang – barang, pakaian, buku – buku sebagai keperluan pokok sehari-hari.

Menurut Imam mazhab yang tiga dalam Qardhawi (1999:513) adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksud adalah sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun untuk mereka yang menjadi tanggungannya.

2. Miskin

Definisi daripada miskin menurut mazhab Hanafi dalam Qardhawi (1999:513) adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Menurut Imam mazhab yang tiga dalam Qardhawi (1999:513) adalah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.

3. Amil Zakat

Sasaran penyaluran zakat yang ketiga yang tidak kalah penting adalah amil zakat. Adapun yang dimaksud dengan amil dalam Qardhawi (1999:545) ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan mereka yang membagi kepada para mustahiqnya.

4. Muallaf

Merupakan mereka yang semula kafir lalu memeluk Islam. Mereka ini juga merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Yang dimaksud dengan golongan muallaf yang berhak menerima zakat dalam Qardhawi (1999:563) antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.

5. Memerdekakan Budak

Kata budak berasal dari Riqab yang mana adalah bentuk jamak dari Raqabah. Istilah ini dalam Al – Qur'an artinya adalah budak belian laki – laki (abid) dan bukan budak belian perempuan (amah). Dalam Qardhawi (1999:587) Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, seolah-olah Quran memberikan isyarat dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belenggu yang mengikatnya.

6. Orang yang berhutang - Gharim

Orang yang berhutang atau al –Gharim menurut mazhab Hanifah dalam Qardhawi (1999:594) adalah orang yang mempunyai utang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya. Tidak jauh berbeda dengan mazhab Hanifah, menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad dalam Qardhawi (1999:594-595) bahwa orang yang mempunyai utang terbagi menjadi dua golongan, masing-masing memiliki hukumnya tersendiri. Pertama, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan kedua, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat.

7. Orang yang berjuang di jalan Allah – Fii Sabilillah

Orang yang termasuk pada golongan ini menurut mazhab Hanafi dalam Qardhawi (1999:611) sukarelawan yang terputus bekalnya yang tidak sanggup bergabung tentara Islam dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan atau hewan tunggangan atau yang lainnya. Dihalalkan kepada mereka zakat, walaupun mereka mampu berusaha. Karena kalau berusaha akan menyebabkan mereka tertinggal dari jihad.

Jihad dalam Qardhawi (1999:632) adalah kadangkala bisa dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau. Kadangkala jihad itu dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. Seluruh jenis jihad ini membutuhkan bantuan dan dorongan materi. Yang paling penting, terwujudnya syarat utama pada semuanya itu, yaitu hendaknya sabilillah itu dimaksudkan untuk membela dan menegakkan kalimat Islam di muka bumi ini.

8. Ibn Sabil

Pendapat Imam Syafi'i tentang Ibnu Sabil dalam Qardhawi (1999:654-655) adalah orang yang terputus bekalnya dan juga termasuk orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, keduanya diberi untuk memenuhi kebutuhan, karena orang yang bermaksud melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat adalah menyerupai orang yang berpergian yang kehabisan bekal.

2.1.4.6. Pengertian Infaq

Kata infaq dalam Latifah (2013) berasal dari kata *anfaqa*, yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat dalam Latifah (2013) infaq adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Dalam mengeluarkan infaq, tidak memerlukan syarat tertentu atau nisab seperti halnya untuk mengeluarkan zakat.

Pengertian infaq cakupannya lebih umum daripada zakat karena setiap orang yang beriman sangat dianjurkan untuk berinfaq atau bershadaqah sunnah baik yang kondisi ekonominya mampu maupun tidak. Ketika kita hendak melakukan infaq, kita tidak dibatasi harus jenis tertentu, jumlah maupun sasaran penerima infaq secara khusus apabila berinfaq dalam bentuk barang.

Pengertian lain daripada infaq menurut sholihin (2010:351) adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Perintah untuk menafkahkan atau menginfakkan sebagian harta telah tertuang dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 34 yakni :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

*Ya ayyuhal lazina a_manu inna kasiram minal ahba_ri war ruhba_ni
laya'kulu_na amwa_lan na_si bil ba_tili wa yasuddu_na 'an sabililla_h(i),
wallazina yaknizu_naz zahaba wal fiddata wa la_yunfiqu_naha_fi sabililla_h(i),
fa basysyirhum bi 'aza_bin alim(iy).*

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah : 34).

2.1.4.7. Pengertian Sedekah

Pengertian dari sedekah yang berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar menurut Gaus (2008:21) dalam Fiqhyany (2014) adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sebagai umat muslim, kita sangat dianjurkan untuk bersedekah meskipun jumlahnya sangat sedikit dan hanya berupa sebuah senyuman.

Sedekah yang baik menurut Muflih (2006:21) adalah sedekah yang diberikan secara sukarela kepada orang – orang yang memerlukan, seperti orang miskin, orang sakit baik yang mampu maupun yang tidak mampu serta anak yatim lebih baik sedekah tersebut diberikan secara langsung tanpa perantara dan diam – diam agar tidak diketahui oleh orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al – Baqarah ayat 271 :

إِنَّ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
 وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٧٢﴾

*'in-tubduṣ-ṣadaqati fani'iman hiya wa'in-tukhfuha watu'tuhal-fuqara'a fahuwa
 khirul-lakum, wayukaffiru 'ankum-min sayyi'atikum, wa-llahu ta'maluna khabir.*

Artinya : “Jika kamu Menampakkan sedekah(mu)[172], Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya[173] dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2.1.5. Inflasi

2.1.5.1. Pengertian

Menurut Murni (2009:196) inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus. Apabila kita menilik kepada pengertian inflasi sebagaimana telah dipaparkan oleh murni, maka suatu kejadian yang dapat dikatakan inflasi ialah ketika kejadian atau peristiwa kenaikan harga tersebut bersifat secara umum dan berlangsung terus menerus. Tidak dapat dikatakan inflasi apabila kenaikan harga tersebut tidak bersifat umum dan tidak berlangsung secara terus menerus.

Menurut Waluyo (2007:167) yang mana menyebutkan bahwa inflasi adalah salah satu penyakit ekonomi yang selalu muncul dan terjadi pada hampir seluruh negara di dunia ini. Dikarenakan inflasi merupakan salah satu penyakit ekonomi yang selalu terjadi di hampir seluruh negara, tidak dapat di pungkiri apabila menanggulangnya merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang biasa kita sebut dengan kebijakan stabilitas harga.

Apabila inflasi tidak ditanggulangi bahkan diatasi dengan baik dan benar, maka laju inflasi akan bertambah cepat dan akan dapat membuat ekonomi tidak stabil, meningkatkan angka kemiskinan hingga mengganggu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena laju inflasi yang cepat tersebut sebagaimana diutarakan oleh Sukirno (2010:15) akan mengurangi tingkat investasi yang produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor sehingga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Dalam mengendalikan inflasi, langkah – langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah ialah salah satunya dapat dengan cara meningkatkan pajak sehingga dalam melakukan pembangunan, harus dilihat seberapa efektifkah dalam mengumpulkan pajak dari para wajib pajak. Karena apabila melakukan pembangunan yang berlebihan akan dapat mempercepat laju inflasi yang disebabkan uang yang beredar juga berlebihan dan menurunkan nilai akan uang itu sendiri.

2.1.5.2. Jenis Inflasi

Inflasi menurut Sukirno (2000:11-13) dalam Arista (2013) berdasarkan kepada sumber penyebabnya dibedakan kepada tiga bentuk, yaitu inflasi tarikan permintaan (*demand pull-inflation*), desakan biaya (*cost push inflation*) dan inflasi diimpor (*imported inflation*).

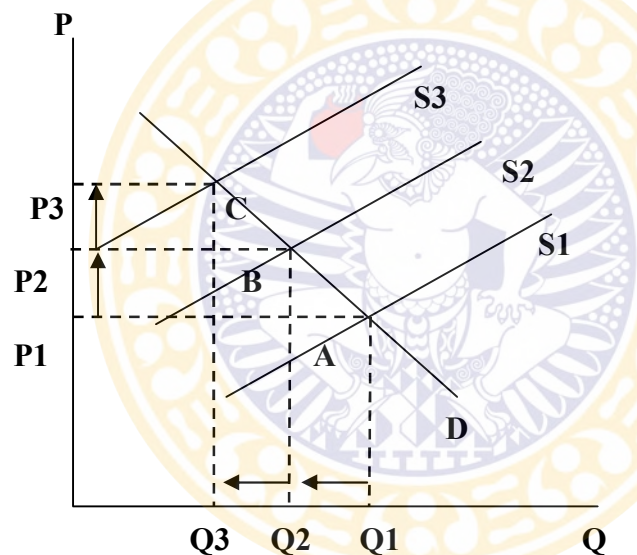
1. Inflasi tarikan permintaan
Ini merupakan bentuk inflasi yang mana disebabkan oleh keadaan yang tidak seimbang antara permintaan dan penawaran produk dalam kegiatan ekonomi. Keadaan yang tidak seimbang tersebut terjadi ketika jumlah penawaran meningkat akan tetapi masyarakat saat itu tidak dapat menambah kapasitas produksi mereka.
2. Inflasi desakan biaya
Inflasi jenis ini biasanya terjadi ketika kegiatan ekonomi telah mencapai pergerakan yang optimal sehingga dapat menyerap tenaga kerja banyak. Tetapi terjadi suatu peristiwa yaitu menurunnya permintaan akan produk sehingga antara biaya dan pemasukan tidak seimbang dan produsen terpaksa menaikkan harga agar tetap efisien dalam menjalankan produksinya.
3. Inflasi diimpor
Inflasi ini mulai populer semenjak tahun 1970-an pada saat ekonomi di dunia dilanda masalah inflasi. Sumber dari masalah tersebut adalah kenaikan harga minyak sebanyak tiga kali lipat pada tahun 1973 – 1974 yang dilakukan oleh negara – negara produsen minyak di Timur Tengah yang pada ketika itu merupakan produsen minyak terbesar di Dunia. Kesimpulannya adalah inflasi impor merupakan inflasi yang disebabkan oleh suatu negara karena negara lain bergantung pada negara tersebut seperti minyak bumi maupun yang lainnya yang tidak dapat diproduksi sendiri didalam negaranya sendiri.

Dalam Arista (2013) dan Sukirno (2000:483) terdapat banyak faktor yang mempengaruhi inflasi antara lain :

Kenaikan harga bahan mentah yang di impor, kenaikan harga bahan bakar, defisit dalam anggaran belanja pemerintah, pinjaman dalam sistem bank yang berlebihan serta perkembangan kegiatan investasi yang sangat pesat. Secara analitis cukuplah apabila faktor – faktor itu dibedakan dan digolongkan kepada dua faktor berikut :

1. Inflasi yang diakibatkan oleh perubahan dalam penawaran agregat
2. Inflasi yang diakibatkan oleh perubahan dalam permintaan agregat

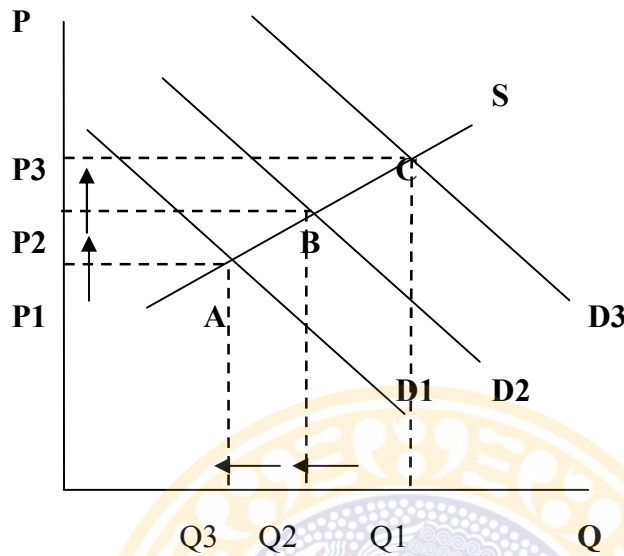
Gambar 2.7
Cost Push Inflation



Sumber : Arista Okky (2013)

Dalam Arista (2013) perbedaan dari kedua jenis inflasi ini terletak pada urutan kenaikan harga yang terjadi. Menurut Boediono (2005:158) dalam Arista (2013) pada *Cost Push Inflation*, harga barang akhir (*output*) mengikuti harga barang – barang faktor produksi (*input*). Sedangkan untuk *Demand Pull Inflation*, kenaikan harga barang akhir (*output*) lah yang mendahului kenaikan harga dari barang – barang (*input*).

Gambar 2.8
Demand Pull Inflation



Menurut Boediono (2005:156) dalam Arista (2013) ada beberapa cara untuk menggolongkan macam – macam inflasi salah satunya adalah dengan melihat seberapa parah inflasi tersebut berimbas kepada kegiatan perekonomian negara yaitu :

1. Inflasi ringan (dibawah 10% setahun)
2. Inflasi sedang (antara 10 – 30% setahun)
3. Inflasi berat (antara 30-100% setahun)
4. Hiperinflasi (di atas 100% setahun)

Menurut Boediono (2005:158) dalam Arista (2013) penggolongan inflasi selain dari seberapa parah efek yang ditimbulkan, dapat juga digolongkan dari asal muasal inflasi tersebut timbul yaitu :

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*)
Inflasi yang penyebab utamanya berasal dari dalam negeri, yang biasanya terkait langsung dengan kebijakan pemerintah atau dapat juga disebabkan distorsi pasar yang dilakukan oleh warga negara tersebut. Contoh dari

kebijakan pemerintah yang dapat menyebabkan inflasi adalah pembangunan yang tidak terukur dan terarah yang mana jumlah uang yang beredar akan tidak terkontrol dan menyebabkan harga – harga meningkat karena tidak diiringi produksi yang meningkat juga.

2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*)

Untuk inflasi yang penyebabnya berasal dari luar negeri, biasanya disebabkan oleh kenaikan harga suatu produk dari suatu negara yang menjadi produsen yang berimbas langsung kepada negara konsumen produk tersebut karena ketidak mampuan dalam memproduksi produk yang sama maka negara konsumen tersebut juga harus menaikkan harga.

2.1.6 Pendidikan

Menurut Soyomukti (2008:29) pendidikan masih dipercaya sebagai proses yang mampu memompa tenaga produktif bangsa kita. Maksud dari tenaga produktif disini masih menurut Soyomukti (2008:31) adalah suatu kemampuan masyarakat untuk menghasilkan suatu bentuk tindakan dan produk – produk baik yang bersifat ekonomis-teknologis maupun intelektualitas. Pada umumnya tenaga produktif masyarakat lebih dikenal sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Soyomukti (2008:31) ketika masyarakat semakin mengalami kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka di dalamnya banyak individu yang mendapat kemudahan hidup, kesejahteraan dan kemudahan untuk mengekspresikan kemanusiaanya.

Kemudahan hidup disini adalah ketika seorang petani yang hanya mengerti baca tulis tanpa pernah belajar hal lain seperti belajar tentang bagaimana menghasilkan hasil panen yang melimpah akan berbeda kehidupannya dengan petani yang bisa baca tulis dan belajar tentang bagaimana menghasilkan hasil panen yang melimpah. Karena dengan belajar tentang bagaimana cara untuk menghasilkan panen yang melimpah, secara tidak langsung petani tersebut belajar

banyak. Mulai dari alat apa saja yang digunakan agar hasil panen melimpah hingga faktor – faktor apa saja yang mendukung dan menghambat hasil panen.

Semakin seorang petani tersebut menguasai bidang pekerjaannya dengan melalui proses pendidikan atau pembelajaran baik yang dilakukan secara otodidak maupun hasil belajar dari orang lain secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan petani tersebut. Kesejahteraan petani tersebut akan tercapai dapat dengan cara petani tersebut membuka kursus mengenai ilmu pertanian dan dia memungut sejumlah biaya ataupun dari hasil penjualan alat – alat penemuannya hasil dari dia belajar tentang ilmu pertanian dan masih banyak lagi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Meningkatnya kesejahteraan seseorang akan tercapai apabila salah satu medianya yaitu pendidikan tidak dimonopoli oleh seseorang atau sekelompok orang saja. Monopoli dalam hal pendidikan akan terjadi apabila orang – orang yang dianggap paling jago dalam mengatasi persoalan kehidupan dan menghadapi tantangan alam dan musuh – musuh di luar suku (komunitas) cenderung diberi kewenangan dan kepercayaan oleh anggota masyarakatnya sebagaimana dalam Soyomukti (2008:10-11). Disinilah peran pemerintah untuk menjamin mutu pendidikan dan agar seluruh masyarakat dapat mengenyam pendidikan hingga ke jenjang yang tinggi.

2.1.7 Kesehatan

Kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam berbagai kegiatan sehari – hari bahkan termasuk kegiatan ekonomi. Dalam melakukan kegiatan apapun, yang dibutuhkan oleh seseorang ialah sehat. Karena dengan

badan yang sehat, maka kegiatan apapun akan lebih mudah diselesaikan. Sebagai contohnya apabila seorang wirausahawan sedang mengalami sakit secara tidak langsung akan mempengaruhi produktivitas dari usahanya, mulai dari libur bekerja untuk sementara waktu bahkan bisa tidak bekerja untuk seterusnya.

Pentingnya kesehatan membuat sebagian orang memandang sebagai sebuah komoditi yang dapat diperjual belikan. Sebagaimana dalam Tjiptoherijanto (1994:26) kesehatan dalam hal ini adalah pelayanan kesehatan merupakan sebuah komoditi. Kesehatan tidak termasuk komoditi karena dalam Tjiptoherijanto (1994:27) kesehatan hanya memiliki *value in use* bukan *value in exchange*. Maksud dari pernyataan diatas adalah, ketika tingkat kesehatan seseorang menurun, maka nilai dari kesehatan akan tampak dan tenaga kesehatan akan bermanfaat dalam memberikan layanan kesehatan.

Untuk memfasilitasi tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat luas perlu adanya campur tangan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Peran dari pemerintah disini adalah sebagai pihak yang menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan dengan mutu yang baik dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pentingnya akses kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yaitu agar produktivitas masyarakat dapat meningkat seiring dengan tingkat kesehatan masyarakat yang semakin membaik.

Agar tingkat kesehatan masyarakat meningkat, pemerintah perlu turun tangan mulai dari merencanakan anggaran hingga mencegah masyarakat agar terhindar dari berbagai penyakit. Pencegahan dimulai dengan melalui pemberian

imunisasi hingga pemberian obat – obatan apabila telah terjangkau serta melakukan berbagai penyuluhan terkait kesehatan di berbagai daerah terutama daerah yang dinilai kesadaran pentingnya kesehatan masih kurang agar taraf kesehatan masyarakat membaik. Namun utamanya disini adalah pemerintah wajib untuk menjamin seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah dan mendapatkan layanan yang baik.

2.1.8 Pertumbuhan Ekonomi

Apabila kita ingin mengetahui kondisi ekonomi dari suatu negara, kita dapat melihat dari Produk Domestik Brutonya (PDB). Karena pada dasarnya Produk Domestik Bruto sebagaimana menurut Arista (2013) adalah jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (*netto*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Untuk melihat Produk Domestik Bruto atau PDB ada dua cara yaitu dengan melihat atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga konstan. Pada Produk Domestik Bruto yang menggunakan atas harga yang berlaku, menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan pada Produk Domestik Bruto yang menggunakan atas harga konstan di hitung dengan menggunakan harga satu tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun dasar. Menurut Widodo (2006:78), perhitungan atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun, dimana faktor perubahan harga telah dikeluarkan.

Untuk menghitung PDB dalam Arista (2013) terdapat tiga pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan produksi disini adalah jumlah nilai atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Nilai tambah merupakan hasil pengurangan antara *output* dan *input*.
- b. Pendekatan pendapatan adalah penghitungan PDB dari jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor – faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji (balas jasa tenaga kerja), sewa tanah (balas jasa tanah) dan nisbah bagi hasil (balas jasa bagi hasil).
- c. Pendekatan pengeluaran dalam penghitungan PDB adalah semua komponen akhir yang meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor *netto*.

2.2 Hubungan antar variabel

2.2.1 Hubungan Zakat Infaq Sedekah terhadap Kemiskinan

Dalam Amalia (2010) menyebutkan bahwa penyaluran zakat kepada mustahiq dapat meningkatkan pendapatan mustahiq. Dengan meningkatnya pendapatan para mustahiq, akan dapat menurunkan angka kemiskinan diantara para mustahiq. Peningkatan pendapatan para mustahiq dapat dilihat dari seberapa jauh mereka berkonsumsi, apakah masih sebatas memenuhi kebutuhan dharuriyat atau bahkan telah dapat memenuhi kebutuhan tahsiniyat mereka.

Dalam Ismifaroh (2012), memang terdapat kesenjangan antara pengumpulan dan pendistribusian pada lembaga amal zakat, akan tetapi dalam pendistribusiannya tepat pada sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahiq. Menurut Al Arif (2010) zakat yang dikelola dengan baik akan mampu memberikan efek pengganda dalam perekonomian, sehingga dapat berpengaruh dalam program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Zakat baik dalam bentuk bantuan konsumtif maupun bantuan produktif berdasarkan mekanisme yang ada telah mampu memberikan pengaruh cukup

signifikan dalam perekonomian melalui mekanisme efek penggandanya. Berdasarkan hal ini, maka zakat harus mampu dikelola dengan baik agar efek penggandanya dapat dirasakan dalam perekonomian.

2.2.2 Hubungan Inflasi terhadap Kemiskinan

Menurut Siregar dan Wahyuniarti (2008) Inflasi maupun populasi penduduk juga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, namun besaran pengaruh masing – masingnya relatif kecil. Tingginya angka inflasi menurut Siregar dan Wahyuniarti (2008) menyebabkan tingkat harga terutama harga barang kebutuhan pokok melonjak drastis. Situasi ini semakin memperparah kemiskinan.

Meningkatnya harga barang terutama barang kebutuhan pokok akan menurunkan daya beli masyarakat. Dengan menurunnya daya beli masyarakat maka produktivitas akan menurun. Menurunnya produktivitas akan turut mempengaruhi tingkat tenaga kerja yang mana juga akan turut menurun. Dengan menurunnya tingkat tenaga kerja maka pengangguran akan meningkat. Meningkatnya pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan. Karena orang – orang yang berada dalam kondisi menganggur tidak memiliki pendapatan atau pendapatannya kurang yang dimana akan menjadikan orang tersebut berada dibawah garis kemiskinan.

2.2.3 Hubungan Belanja Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Salah satu hal yang tidak dapat dipandang sebelah mata untuk membantu mengurangi bahkan menekan angka kemiskinan adalah dengan menyelenggarakan pendidikan yang layak bagi semua golongan. Akan tetapi, sejak zaman penjajahan belanda hingga zaman sekarang masih banyak ditemui anak – anak putus sekolah.

Banyaknya anak putus sekolah sering disebabkan oleh kemiskinan yang di derita oleh keluarga dari anak tersebut dan rendahnya tingkat pendidikan yang pernah di tempuh oleh orang tua mereka.

Rendahnya tingkat pendidikan yang pernah ditempuh oleh orang tua dari keluarga yang tidak mampu sehingga membuat anak – anak mereka juga tidak dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang yang tinggi membuat pemerintah menyusun program untuk mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan masing – masing individu. Dalam menunjang program pemerintah tersebut, di terbitkanlah Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang sistem pendidikan di Indonesia.

Dalam Undang – Undang tersebut telah disebutkan bahwa sistem pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dari uraian diatas telah tersirat betapa pentingnya pendidikan bagi generasi penerus bangsa.

Begitu pentingnya pendidikan membuat pemerintah membentuk lembaga pendidikan formal mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi . tidak hanya itu saja, pemerintah juga memberikan payung hukum bagi warga negara yang ingin membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan pendidikan yang layak namun tetap dalam susunan kurikulum yang telah ditentukan pemerintah.

Keseriusan pemerintah dalam mengentaskan rakyatnya dari jurang kemiskinan nampak dari penyusunan kurikulum yang selalu mencari formula terbaik mulai dari kurikulum 2004, 2008, ktsp dan lain sebagainya. Pencarian formula terbaik tersebut bertujuan agar rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk masa depannya. Pendidikan yang baik sangatlah dibutuhkan mulai dari menjalin kerjasama, dunia usaha hingga menularkan kembali pengetahuan yang dimiliki seseorang kepada orang lain.

Pendidikan yang baik sangat dibutuhkan untuk menunjang produktivitas suatu negara. Dengan pendidikan yang baik, maka dunia industri yang sedang membutuhkan terobosan teknologi baru agar lebih efisien dalam produksinya dapat terpenuhi teknologi yang dibutuhkan berkat sumber daya manusia yang dimiliki memiliki pendidikan yang baik. Tidak hanya sebagai solusi atas kebuntuan yang dihadapi oleh dunia industri, melainkan pendidikan juga telah dianggap sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang untuk mengangkat kesejahteraan rakyat suatu negara.

Investasi jangka panjang tersebut haruslah didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah pusat. Pentingnya investasi jangka panjang dalam bidang pendidikan agar seluruh masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan agar produktivitas meningkat. Sebagaimana menurut Rasidin dan Bonar (2004) dalam Setyowati (2014) menyebutkan bahwa rendahnya produktivitas kaum miskin disebabkan oleh rendahnya akses mereka memperoleh pendidikan. Peran dari pemerintah pusat dalam menentukan arah pendidikan yang diinginkan sangatlah vital. Pemerintah pusat memegang kendali atas seberapa

besar anggaran yang digelontorkan pendidikan rakyatnya agar dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan program yang telah disusun.

2.2.4 Hubungan Belanja Kesehatan terhadap Kemiskinan

Tidak hanya pendidikan yang baik yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya, melainkan juga kesehatan yang baik. Pentingnya kesehatan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat juga wajib diperhatikan. Karena dengan semakin sehatnya masyarakat suatu negara maka akan semakin meningkat. Sebagaimana menurut Lincolin (1992) dalam Setyowati (2014) menjelaskan bahwa untuk memperbaiki kesehatan, peran dari pemerintah juga merupakan suatu hal penting dengan melalui kebijakan anggaran kesehatan untuk mengurangi kemiskinan.

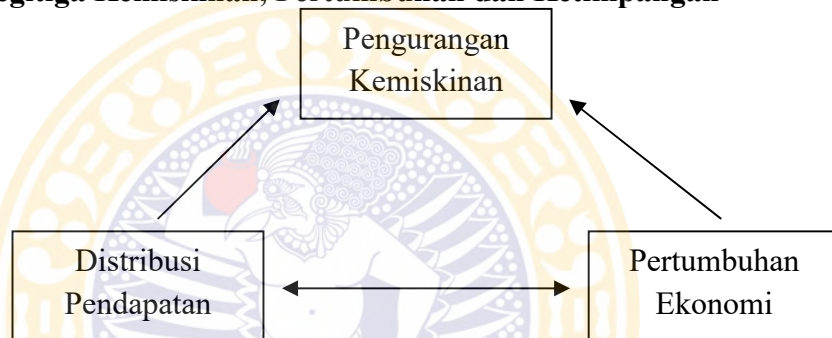
Peran pemerintah dalam memperbaiki serta membangun kesehatan warga negaranya adalah dapat dimulai dari memberikan himbauan, penyuluhan, pelatihan hingga mengalokasikan dana untuk kesehatan melalui kementerian kesehatan agar standar kesehatan warga negaranya dapat meningkat. Dengan adanya peningkatan status kesehatan yang lebih baik sebagaimana menurut Setyowati (2014), akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal tersebut akan lebih memungkinkan bagi penduduk miskin untuk memperoleh penghasilan lebih tinggi dan keluar dari jurang kemiskinan.

2.2.5 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Berdasarkan gambar dibawah ini dapat dijelaskan bahwa pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan melakukan perubahan pada distribusi

pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam Anindiarti (2012), selain melakukan perubahan pada distribusi pendapatan, penekanan angka kemiskinan juga dapat dilakukan dengan cara meningkatkan level pendapatan (melalui mendorong pertumbuhan). Karena pada kelompok dengan pendapatan rendah, akan mendapatkan tambahan pendapatan sehingga bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dan menekan angka kemiskinan.

Gambar 2.9
Segitiga Kemiskinan, Pertumbuhan dan Ketimpangan



Sumber : Henggar Anindiarti (2012)

Dalam Arista (2013) terdapat beberapa kebijakan yang dapat mempengaruhi kemiskinan namun tidak harus memperlambat laju pertumbuhan ekonomi yaitu antara lain dengan meratakan distribusi pendapatan, menghimbau kepada orang – orang kaya untuk menabung dan menginvestasikan harta mereka di negara sendiri, meningkatkan standar hidup masyarakat miskin baik dari pendidikan maupun kesehatan mereka serta mendukung produksi barang maupun jasa buatan lokal.

Meratanya distribusi pendapatan dalam Arista (2013) akan membuat masyarakat miskin menjadi lebih memiliki akses pada pinjaman pada bank maupun non bank untuk melebarkan usahanya serta dapat menghidupi keluarganya dengan lebih baik daripada sebelumnya. Masih dalam Arista (2013),

dengan menghimbau para orang kaya untuk menabung dan berinvestasi di negara sendiri, akan turut membantu dalam mengurangi kemiskinan. Karena dengan investasi dinegara sendiri, masyarakat yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya akan lebih mudah mendapatkan tambahan modal dari orang – orang kaya yang menabung serta investasi di negara sendiri.

Setelah meningkatnya usaha yang dilakukan secara tidak langsung akan membuat standar hidup juga meningkat yang semula tidak memiliki akses untuk layanan kesehatan dan pendidikan yang baik menjadi memiliki akses. Tidak hanya itu, produksi masyarakat akan turut meningkat. Oleh karena produksi dari masyarakat meningkat, patutnya tetap didukung dengan cara membeli atau mengkonsumsi produk – produk lokal yang diproduksi oleh masyarakat itu sendiri.

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh pertumbuhan distribusi zakat dan infaq terhadap penurunan angka kemiskinan. Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam peneitian ini. Penelitian tersebut antara lain :

Berikut ini adalah penjelasan dari ringkasan peneitian terdahulu:

1. Al Arif (2010) membahas mengenai efek pengganda zakat serta implikasinya terhadap program pengentasan kemiskinan. Yang mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa zakat yang dikelola dengan baik akan mampu memberikan efek pengganda dalam perekonomian, sehingga dapat berpengaruh dalam program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh

pemerintah. Zakat baik dalam bentuk bantuan konsumtif maupun bantuan produktif berdasarkan mekanisme yang ada telah mampu memberikan pengaruh cukup signifikan dalam perekonomian melalui mekanisme efek penggandanya. Berdasarkan hal ini, maka zakat harus mampu dikelola dengan baik agar efek penggandanya dapat dirasakan dalam perekonomian.

2. Amalia (2010) membahas mengenai peran lembaga amil zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Yang mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program – program yang dilakukan oleh lembaga amil zakat Dompot Dhuafa mampu memberdayakan ekonomi masyarakat miskin. Keberhasilan daripada program ini ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan mustahiq.
3. Ismifaroh (2012) membahas mengenai analisis kesenjangan jumlah penghimpunan dana zakat dan alokasi pendistribusiannya pada yayasan yatim mandiri dan dompet dhuafa republika. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara jumlah dana zakat yang dihimpun dan pendistribusiannya pada kedua lembaga amil zakat. Dalam penelitian ini, terdapat tiga penyebab terjadinya kesenjangan yaitu input, proses dan juga output.
4. Firmansah (2010) membahas mengenai penentuan penerima zakat pada lembaga amil zakat di Surabaya. Dalam penelitian ini, disebutkan bahwa terdapat lembaga amil zakat yang tidak transparan dalam memberikan informasi penghimpunan dan penyaluran zakat. Selain itu, dalam penelitian ini

menunjukkan bahwa masing – masing lembaga amil zakat mempunyai kriteria yang berbeda dalam mengukur kemiskinan.

5. Arista (2013) membahas mengenai bagaimana produk domestik regional bruto (PDRB), tingkat inflasi dan jumlah pengangguran dapat berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur menurut kabupaten dan kota. Dengan hasil variabel inflasi dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur.
6. Setyowati (2014) meneliti tentang pengaruh alokasi dana program nasional pemberdayaan masyarakat, belanja daerah untuk kesehatan, pendidikan dan pekerjaan umum terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur periode 2008 – 2011 yang menunjukkan bahwa alokasi dana nasional pemberdayaan masyarakat, belanja daerah untuk kesehatan, pendidikan dan pekerjaan umum berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.
7. Anindiarti (2012) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap angka kemiskinan di Indonesia periode 2005 – 2010 yang mana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi angka kemiskinan sebesar 2,3%.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Tahun	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
2010	M. Nur Rianto Al Arif	Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan	Peneliti membahas tentang zakat terhadap kemiskinan secara makro.	Dalam penelitian ini tidak meneliti tentang efek pengganda.
2010	Puspita Demy Amalia	Peran lembaga amil zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin	Peneliti membahas upaya dalam mengurangi kemiskinan.	Dalam penelitian ini tidak membahas mengenai peran amil. Melainkan pengaruh daripada distribusi zakat dan infaq terhadap penurunan kemiskinan.
2012	Muizatul Ismifarah	Analisis kesenjangan jumlah penghimpunan dana zakat dan alokasi pendistribusiannya pada yayasan yatim mandiri dompet dhuafa republika	Peneliti meneliti tentang besaran distribusi zakat yang disalurkan kepada para mustahiq.	Dalam penelitian ini tidak berfokus pada perbedaan atau kesenjangan antara jumlah dana yang terhimpun dengan pendistribusiannya. Melainkan berfokus kepada pertumbuhan distribusinya.
2010	Yayan Firmansah	Penentuan penerima zakat pada lembaga amil zakat di Surabaya	Peneliti menentukan kepada siapa dana zakat akan dibagikan.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian firmansah hanya menentukan mustahiq, namun dalam penelitian ini tidak hanya menentukan siapa saja mustahiq yang berhak menerima juga peran distribusi zakat dan infaq dalam mengurangi angka kemiskinan.

Tahun	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
2013	Okky Arista	Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Inflasi dan Jumlah pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur Menurut Kabupaten dan Kota Periode Tahun 2006 - 2010	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada bagaimana variabel inflasi dapat mempengaruhi angka kemiskinan.	Perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Okky Arista, lingkup penelitian yang diteliti hanyalah Jawa Timur. Sedangkan penelitian ini lingkungannya nasional.
2014	Retno Setyowati	Pengaruh alokasi dana program nasional pemberdayaan masyarakat, belanja daerah untuk kesehatan, pendidikan dan pekerjaan umum terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur periode 2008 - 2011.	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada bagaimana variabel belanja pemerintah dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada.	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Retno dengan penelitian ini adalah lingkup penelitian ini berskala nasional sedangkan milik Retno berskala provinsi dan hanya di penelitian ini terdapat instrumen Islami yaitu zakat, infaq serta sedekah.
2012	Henggar Anindiarti	Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2005 – 2010.	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada bagaimana variabel pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.	Perbedaan dengan penelitian dari Henggar dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel Islam pada penelitian ini serta dalam penelitian ini tidak membahas mengenai ketimpangan pendapatan.

2.4 Hipotesis

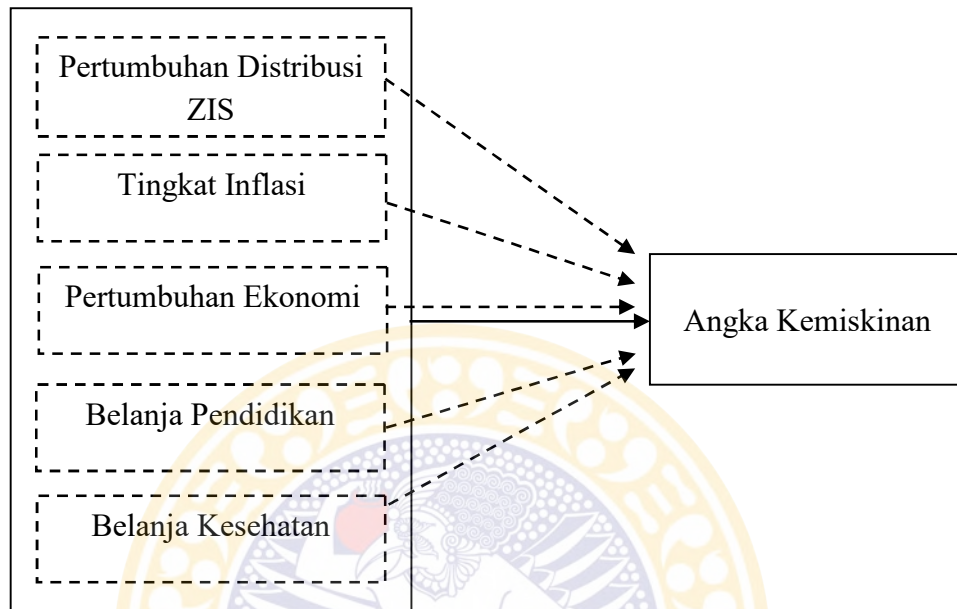
Hipotesis adalah kesimpulan atau jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian yang mana rumusan masalah tersebut dinyatakan dalam pertanyaan. Hipotesis daripada penelitian ini adalah :

- H1 : Pertumbuhan distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia secara parsial signifikan.
- H2 : Inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia secara parsial signifikan.
- H3 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia secara parsial signifikan.
- H4 : Belanja Pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia secara parsial signifikan.
- H5 : Belanja Kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia secara parsial signifikan.
- H6 : Pertumbuhan distribusi ZIS di Badan Amil Zakat Nasional, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia secara simultan signifikan.

2.5 Model Analisis

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan distribusi ZIS, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan berpengaruh baik secara parsial maupun simultan. Seluruh variabel

diatas apabila digambarkan dalam sebuah model analis dapat terlihat sebagai berikut:



Keterangan: — : hubungan simultan - - - : hubungan parsial

Gambar 2.10
Model Analisis

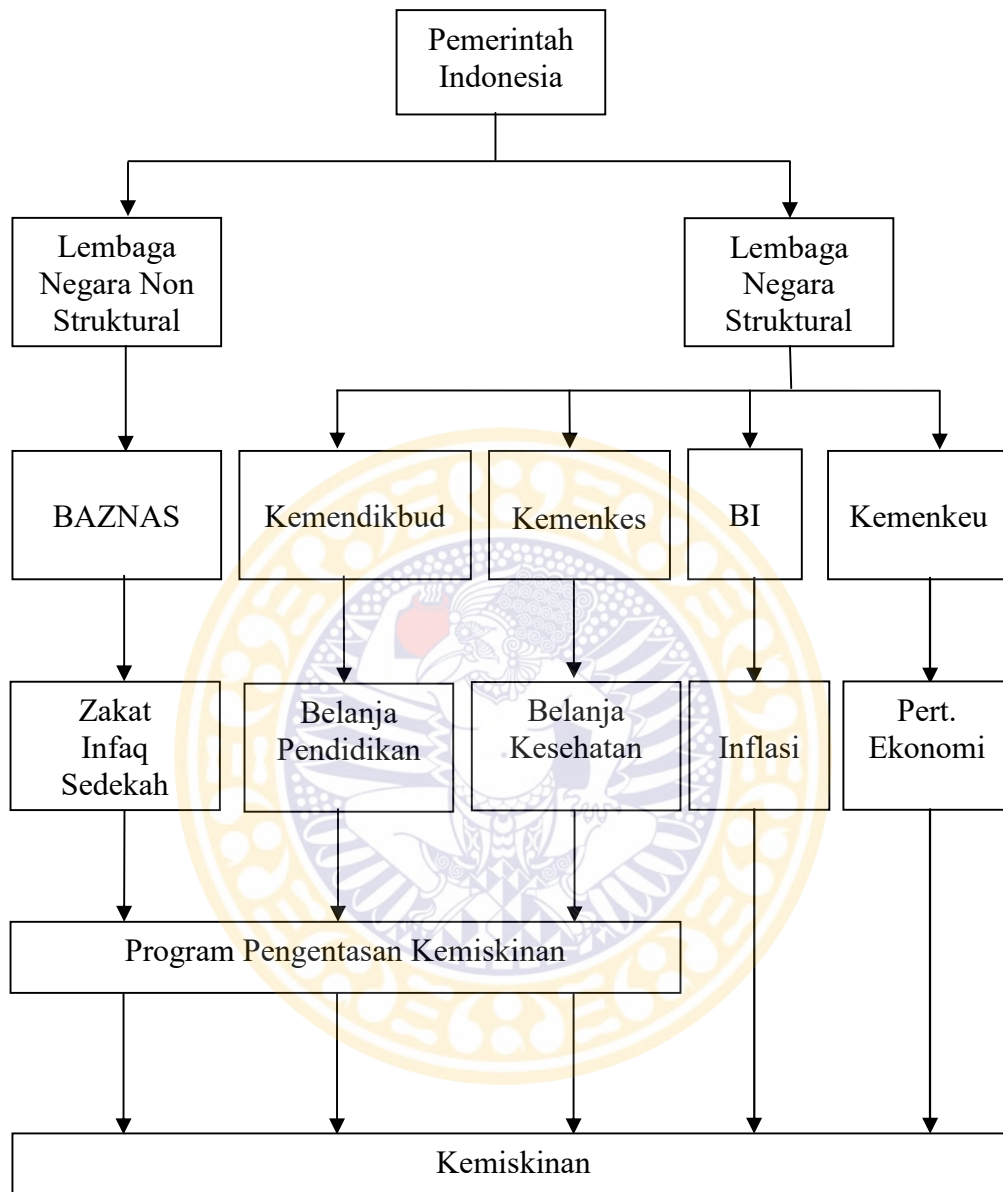
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibuat persamaan regresi:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 \dots\dots\dots (2.1)$$

Keterangan:

Y	= Variabel Kemiskinan
X ₁	= Variabel Distribusi Dana ZIS
X ₂	= Variabel Inflasi
X ₃	= Variabel Pertumbuhan Ekonomi
X ₄	= Variabel Belanja Pendidikan
X ₅	= Variabel Belanja Kesehatan
a	= Konstanta, nilai Y jika X = 0
b ₁ b ₂ b ₃ b ₄ b ₅	= koefisien regresi linier berganda

2.6 Kerangka Berpikir



Gambar 2.11
Kerangka Berpikir

Keterangan : — yang diteliti

Pemerintah Indonesia pada saat tampuk pemerintahan pertama kali dibebankan kepada presiden Soekarno, yang memiliki angan dan tujuan untuk membebaskan masyarakat Indonesia dari jerat kemiskinan yang telah lama membelenggu masyarakat Indonesia. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 paragraf kedua yang disusun oleh Purwantoro (2012) berbunyi *dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.*

Telah tersusunnya landasan bernegara, perlahan namun pasti pemerintah Indonesia memulai kegiatan kenegaraan dengan membentuk lembaga – lembaga negara yang terstruktur. Terbentuknya lembaga – lembaga negara yang terstruktur tidak lain memiliki tujuan untuk mewujudkan kemakmuran di Indonesia. Untuk mencapai kemakmuran tersebut, peran penting lembaga negara dalam berbagai bidang yang masuk dalam struktur pemerintahan juga diperlukan.

Lembaga - lembaga negara tersebut adalah Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan. Bank Indonesia yang merupakan lembaga negara independen sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang No. 06 Tahun 2009. Bank Indonesia memiliki salah satu kewajiban yaitu untuk mengkondisikan perekonomian Indonesia tetap stabil agar tujuan negara untuk memakmurkan warga negaranya dapat tercapai. Untuk menjaga stabilitas ekonomi negara Indonesia, Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen yaitu dengan

pengendalian inflasi, pengaturan suku bunga Bank Indonesia serta jumlah uang beredar.

Lembaga struktural lain yang berperan untuk mengentaskan kemiskinan antara lain Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Peran dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan adalah membantu pemerintah dalam menyelenggarakan negara dengan menyediakan pendidikan yang baik untuk semua golongan. Sedangkan peran dari Kementerian Kesehatan adalah membantu pemerintah dalam menyelenggarakan negara dengan menyediakan layanan kesehatan yang baik yang dapat dijangkau oleh semua golongan. Sedangkan peran dari Kementerian Keuangan adalah membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan negara dalam bidang keuangan dengan menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Seiring dengan berjalannya waktu, dengan melihat potensi zakat, infaq dan sedekah di Indonesia cukup besar dan sempat mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998 pemerintah mulai melirik zakat, infaq dan sedekah sebagai instrumen pendukung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keseriusan pemerintah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia agar lebih optimal, tercermin dalam Keputusan Presiden RI No. 08 Tahun 2001 dengan maksud dan tujuan membentuk lembaga negara resmi non struktural untuk memaksimalkan potensi dari ZIS maka terbentuklah Badan Amil Zakat Nasional. Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional diharapkan mampu berkolaborasi dengan lembaga negara struktural lainnya dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam Sugiyono (2014:7) menerangkan bahwa metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Sugiyono (2014:7) juga berpendapat bahwa metode ini juga disebut sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis.

Pendekatan ini berangkat dari data. Misalnya dalam suatu pabrik, pastilah dibutuhkan bahan baku dan komposisi yang benar agar dapat menghasilkan produk yang diinginkan. Data inilah yang kemudian diproses dan disajikan menjadi informasi yang berharga bagi pihak pengambil keputusan. Pemrosesan dan manipulasi data mentah menjadi informasi yang bermanfaat inilah yang merupakan inti dari analisis kuantitatif. Komputer menjadi alat bantu utama dalam penggunaan analisis kuantitatif.

3.2 Identifikasi Variabel

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2014:38) adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel umumnya dikategorikan menjadi :

- a. Variabel dependen, identik dengan variabel terikat yang dijelaskan atau *dependent variable* yaitu variabel kemiskinan.
- b. Variabel independen, identik dengan variabel bebas yang mana menjadi variabel penjelas atau *independent variable* adalah pertumbuhan distribusi zis, inflasi, pertumbuhan ekonomi, belanja pendidikan dan belanja kesehatan.

3.3 Definisi Operasional Variabel

1. Distribusi Dana ZIS (X_1)

Distribusi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional atas jumlah dana yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas baik melalui instrumen zakat, infaq maupun sedekah. Distribusi dana zis merupakan komponen penting dalam sebuah badan ataupun lembaga amil dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Data distribusi dana zis didapatkan dari laman resmi BAZNAS dan melalui surat permohonan penelitian yang telah diajukan secara resmi dari penulis kepada BAZNAS langsung di kantor pusat.

2. Inflasi (X_2)

Inflasi dalam BPS adalah kenaikan harga barang dan jasa pada umumnya dan berlangsung secara terus menerus. Umumnya inflasi digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menilai keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mengatasi dan menanggulangi kemiskinan yang terjadi. Data inflasi yang digunakan bersumber dari Bank Indonesia yang terjadi di Indonesia dalam rentang waktu periode 2011 hingga 2014.

3. Belanja Pendidikan (X_3)

Belanja pendidikan disini adalah pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk pendidikan melalui kementerian pendidikan nasional. Ukuran belanja pendidikan merupakan alah satu ukuran penting dalam menilai kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan yang terjadi melalui pendidikan yang baik. Data untuk belanja pendidikan didapatkan dari kementerian keuangan pada periode anggaran 2011 – 2014.

4. Belanja Kesehatan (X_4)

Belanja kesehatan adalah pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk kesehatan melalui kementerian kesehatan. Tidak hanya belanja pendidikan yang menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan tetapi juga belanja kesehatan. Belanja kesehatan disini adalah agar seluruh rakyat Indonesia dapat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang ada dan juga agar produktivitas rakyat semakin membaik. Data untuk belanja kesehatan didapatkan dari kementerian keuangan pada periode anggaran 2011 – 2014.

5. Pertumbuhan Ekonomi (X_5)

Pertumbuhan ekonomi dalam Arista (2013) adalah jumlah nilai tambah (*Value Added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha. Apabila suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik maka negara tersebut sedang tumbuh produktivitasnya dan kemampuan konsumsi masyarakatnya juga sedang meningkat. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu indikator penting untuk menilai

keberhasilan kebijakan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Data pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini didapat dari badan pusat statistik yaitu laju pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran periode 2011 - 2014.

6. Kemiskinan (Y)

Pada umumnya, ukuran ini seringkali digunakan menjadi suatu ukuran untuk melihat atau menilai apakah kebijakan – kebijakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan berhasil atau tidak. Angka kemiskinan dalam BPS adalah jumlah dari masyarakat yang dipandang tidak mampu dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran. Data kemiskinan yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia yang terjadi di Indonesia dalam rentang waktu periode 2011 hingga 2014.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari : objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:80). Populasi dari penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014:81). Dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh yaitu sampel yang diambil adalah populasi yang dipakai.

Sampel yang digunakan dari penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Data yang dihimpun dan yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian harus data yang valid. Oleh karena itu prosedur dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Studi pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dari berbagai sumber literatur.
2. Penelitian terdahulu, yaitu dengan meninjau dan memahami permasalahan apa saja yang dihadapi peneliti terdahulu terkait dengan penelitian ini beserta solusinya.
3. Pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional, Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik.

3.6 Teknik Analisis Data

Langkah – langkah yang dilakukan untuk melakukan analisis masalah dalam penelitian ini adalah dengan menguji asumsi klasik terlebih dahulu selanjutnya melakukan kriteria statistik model untuk menguji analisis regresi linier berganda.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran umum sampel penelitian meliputi nilai rata – rata (mean), nilai tengah (median), nilai maksimum, varian (σ^2) dan standar deviasi (σ) dari setiap variabel dalam model. Untuk hasil analisisnya akan disajikan dalam bentuk tabel.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam Suliyanto (2011:69) dilakukan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada sebuah model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal apabila digambarkan dengan menggunakan kurva akan membentuk gambar lonceng yang mana kedua sisinya melebar hingga tidak terhingga.

Untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak menurut Suliyanto (2011:71) dapat dideteksi dengan melihat persebaran data pada sumbu diagonal dan grafik dengan melihat histogram residualnya. Metode ini dapat dikatakan metode *probability plot* yang mana metode probability plot ini akan membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dalam Suliyanto (2011:81) adalah sebuah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi

yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebasnya maka model regresi tersebut mengandung gejala multikolinier.

Dalam suliyanto (2011:81-82) terdapat beberapa cara atau metode untuk mendeteksi ada tidaknya masalah multikolinearitas antara lain dengan melihat nilai R^2 dan nilai t statistik, dengan melihat nilai *Pair Wise Correlation* antar variabel bebas, dengan menggunakan regresi bantuan (*auxiliary regression*), dengan melihat nilai korelasi parsial (*Examination of Partial Correlation*), dengan berdasarkan nilai *eigenvalues* dan Condition Index serta dapat juga dengan menggunakan nilai TOL (*Tolerance*) dan VIF (*Variance Inflation Factor*).

Dalam penelitian ini, untuk melihat ada tidaknya gejala multikolinier dengan menggunakan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai daripada *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 maka model tersebut dinyatakan tidak mengandung multikolinearitas.

3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Menurut Santoso (2012:241) tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Menurut Gujarati dalam Suliyanto (2011:126), ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi yaitu dengan menggunakan metode analisis grafik, Durbin-Watson, metode Lagrange Multiplier (LM Test), metode Breusch-Godfrey (B-G Test) dan metode Run Test.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengujian Durbin-Watson. Menurut Santoso (2012:242) terdapat kriteria dalam pengambilan kesimpulan akan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut :

1. Jika nilai DW terletak dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2. Jika nilai DW terletak diantara -2 hingga +2 berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika nilai DW terletak diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Jika terjadi autokorelasi maka varian tidak lagi memiliki varian yang minimum sehingga menyebabkan perhitungan *standart error* metode OLS tidak bisa lagi dipercaya kebenarannya. Selanjutnya interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi nilai t dan F tidak bisa dipercaya untuk melakukan evaluasi hasil regresi.

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Suliyanto (2011:95) berpendapat bahwa heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan homoskedastisitas. Yang diharapkan peneliti pada model regresi adalah varian variabel yang memiliki nilai yang sama atau homoskedastisitas.

Metode untuk menguji apakah pada model regresi terdapat heteroskedastisitas atau tidak menurut Suliyanto (2011:95-117) terdapat beberapa metode yaitu metode analisis grafik, metode glejser, metode park, metode white, metode rank spearman dan metode bresch-pagan-godfrey (BPG). Dalam penellitian ini, peneliti menggunakan metode rank spearman.

Suliyanto (2011:103) mengungkapkan bahwa gejala heteroskedastisitas ditunjukkan oleh koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya. Jika nilai probabilitas lebih besar daripada nilai alpha ($\text{Sig.} > \alpha$), maka dapat dipastikan model tersebut tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Dalam melakukan sebuah analisis pada pengujian heteroskedastisitas terdapat beberapa dasar dalam menganalisa gejala heteroskedastisitas antara lain :

1. Apabila titik - titik yang terdapat pada grafik membentuk sebuah pola tertentu dan teratur seperti gelombang, melebar kemudian menyempit, maka telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Namun apabila titik - titik yang terdapat pada grafik tidak membentuk sebuah pola maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Model regresi yang telah memenuhi asumsi tersebut yang mana tidak terdapat heteroskedastisitas maka dapat digunakan untuk menganalisis hipotesis.

3.6.3 Kriteria Statistik Model

3.6.3.1 Koefisien Determinasi (R^2) dan Adjusted R^2

Koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya (*goodness of fit*). koefisien determinasi ini mengukur persentase total variasi variabel dependen Y yang telah dijelaskan oleh variabel independen di dalam regresi. Regresi yang baik nilai R^2 semakin mendekati 1 dan bila semakin mendekati 0 garis regresi dapat dikatakan kurang baik.

3.6.3.2 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini distribusi dana zis, inflasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai variabel independen dan kemiskinan sebagai variabel dependen. Teknik analisis regresi digunakan untuk melihat hubungan parsial dan simultan antara dana zis, inflasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Setelah memperoleh data, maka dilakukan regresi linear antara variabel dependen kemiskinan dengan dana zis, inflasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan pertumbuhan ekonomi menggunakan alat bantu SPSS 16. Hasilnya akan terdapat nilai regresi dari setiap variabel di dalam penelitian dan dimasukkan kedalam persamaan regresi linear berganda.

3.6.3.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Suliyanto (2011:62) berpendapat bahwa Uji T digunakan untuk menguji apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung atau tidak. Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti apabila nilai t hitung dari variabel tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel.

Asumsi yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah:

- a. Perbandingan T-Hitung dan T Tabel
 1. Apabila $T\text{-Hitung} > T\text{-Tabel}$ maka H_0 ditolak
 2. Apabila $T\text{-Hitung} < T\text{-Tabel}$ maka H_0 diterima
- b. Probabilitas

1. Prob.(*p-value*) > *significance* level maka H_0 diterima
2. Prob.(*p-value*) < *significance* level maka H_0 ditolak

3.6.3.4 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Suliyanto (2011:61) berpendapat bahwa uji F digunakan untuk menguji ketepatan model (*goodness of fit*). Uji F ini juga sering disebut sebagai uji simultan, yang mana untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung atau tidak. Maksudnya adalah apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan terhadap uji F berdasarkan :

- a. Perbandingan F-Hitung dan F-Tabel
 1. Apabila F-Hitung > $f_{\alpha}(k, n-k-1)$ maka H_0 ditolak
 2. Apabila F-Hitung < $f_{\alpha}(k, n-k-1)$ maka H_0 diterima
- b. Probabilitas
 1. Prob.(*p-value*) > *significance* level maka H_0 diterima
 2. Prob.(*p-value*) < *significance* level maka H_0 ditolak

Langkah-langkah Uji F diantaranya :

1. Merumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1)
2. Menentukan tingkat signifikansi (α) yaitu sebesar 5% dengan derajat kebebasan (df) sebesar $n-k-1$
3. Melakukan keputusan menerima atau menolak H_0

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian pengaruh distribusi dana zis, inflasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia. Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional. Populasi dalam penelitian ini adalah distribusi dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional dan sedangkan untuk sampel penelitian ini adalah distribusi dana ZIS yang diambil dari periode Januari tahun 2011 hingga Desember tahun 2014.

4.1. Gambaran Umum Subyek dan Obyek Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam Sugiyono (2014:7) menerangkan bahwa metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah menjadi tradisi sebagai metode untuk penelitian. Sugiyono (2014:7) juga berpendapat bahwa metode ini juga disebut sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis.

Pendekatan ini berangkat dari data. Misalnya dalam suatu pabrik, pastilah dibutuhkan bahan baku dan komposisi yang benar agar dapat menghasilkan produk yang diinginkan. Data inilah yang kemudian diproses dan disajikan menjadi informasi yang berharga bagi pihak pengambil keputusan. Pemrosesan dan manipulasi data mentah menjadi informasi yang bermanfaat inilah yang

merupakan inti dari analisis kuantitatif. Komputer menjadi alat bantu utama dalam penggunaan analisis kuantitatif.

4.1.1 Profil Singkat Lembaga Negara

4.1.1.1 Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Selama 11 tahun menjalankan amanah sebagai badan zakat nasional, BAZNAS telah meraih pencapaian sebagai berikut:

1. BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di daerah terutama bagi BAZDA baik Provinsi maupun BAZDA Kabupaten/Kota
2. BAZNAS menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR-RI.
3. BAZNAS tercantum sebagai Badan Lainnya selain Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur pertanggung-jawaban yang terklonsolidasi dalam Laporan Kementerian/Lembaga pada kementerian Keuangan RI.

Berbagai penghargaan bagi BAZNAS dalam empat tahun terakhir:

BAZNAS berhasil memperoleh sertifikat ISO selama empat tahun berturut-turut, yaitu:

- a. Tahun 2008 BAZNAS mendapatkan sertifikat ISO 9001:2000
- b. Tahun 2009, 2010 dan 2011 BAZNAS kembali berhasil memperoleh sertifikat ISO, kali ini untuk seri terbarunya, ISO 9001:2008. BAZNAS adalah lembaga

pertama yang memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 untuk kategori seluruh unit kerja pada tahun 2009.

- c. Tahun 2009, BAZNAS juga mendapatkan penghargaan The Best Quality Management dari Karim Business Consulting
- d. BAZNAS berhasil memperoleh predikat Laporan Keuangan Terbaik untuk lembaga non departemen versi Departemen Keuangan RI tahun 2008.
- e. BAZNAS meraih “The Best Innovation Programme ” dan “The Best in Transparency Management” pada IMZ Award 2011.

4.1.1.2 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Awal Kemerdekaan (1945 – 1950)

Pada prakemerdekaan, pendidikan bukan untuk mencerdaskan kaum pribumi, melainkan lebih kepada kepentingan kolonial penjajah. Pada bagian ini, semangat menggelorakan ke-Indonesia-an begitu kental sebagai bagian membangun identitas diri sebagai bangsa merdeka. Tidaklah berlebihan jika instruksi menteri saat itu pun terkait dengan upaya memompa semangat perjuangan dengan mewajibkan bagi sekolah untuk mengibarkan sang merah putih setiap hari di halaman sekolah, menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga menghapuskan nyanyian Jepang Kimigayo.

Organisasi kementrian saat itu masih bernama Kementrian Pengajaran pun masih sangat sederhana. Tetapi kesadaran untuk menyiapkan kurikulum sudah dilakukan. Menteri Pengajaran yang pertama dalam sejarah Republik Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Pada Kabinet Syahrir I, menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Mulia. Mr. Mulia melakukan berbagai langkah seperti

meneruskan kebijakan menteri sebelumnya di bidang kurikulum berwawasan kebangsaan, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta menambah jumlah pengajar.

Pada kabinet Syahrir II, Menteri Pengajaran dijabat oleh MuhammadSjafei sampai tanggal 2 Oktober 1946. Kursi Menteri Pengajaran berikutnya dipercayakan kepada Mr. Soewandi hingga 27 Juni 1947. Pada era kepemimpinan Mr. Soewandhi ini terbentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai Ki Hadjar Dewantara. Panitia ini bertujuan untuk meletakkan dasar – dasar dan susunan pengajaran baru.

Era Demokrasi Liberal (1951 – 1959)

Dapat dikatakan pada masa ini stabilitas politik menjadi sesuatu yang langka, demikian halnya dengan program yang bisa menjadi tonggak, tidak dapat dideskripsikan dengan baik. Selama masa demokrasi liberal, sekitar sembilan tahun, telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Kabinet Natsir yang terbentuk tanggal 6 September 1950, menunjuk Dr. Bahder Johan sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K). Mulai bulan April 1951 Kabinet Natsir digantikan Kabinet Sukiman yang menunjuk Mr. Wongsonegoro sebagai Menteri PP dan K. Selanjutnya digantikan Mr. Mohammad Yamin, RM. Soewandi, Ki Sarino Mangunpranoto dan Prof. Dr. Prijono.

Pada periode ini, kebijakan pendidikan merupakan kelanjutan kebijakan menteri periode sebelumnya. Yang menonjol pada era ini adalah lahirnya payung

hukum legal formal di bidang pendidikan yaitu UU Pokok Pendidikan Nmor 4 Tahun 1950.

Era Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966)

Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri era demokrasi parlementer, digantikan era demokrasi terpimpin. Di era demokrasi terpimpin banyak ujian yang menimpa bangsa Indonesia. Konfrontasi dengan Belanda dalam masalah Irian Barat, sampai peristiwa G30S/PKI menjadi ujian berat bagi bangsa Indonesia.

Dalam Kabinet Kerja I, 10 Juli 1959 – 18 Februari 1960, status kementerian diubah menjadi menteri muda. Kementerian yang mengurus pendidikan dibagi menjadi tiga menteri muda. Menteri Muda Bidang Sosial Kulturil dipegang Dr. Prijono, Menteri muda PP dan K dipegang Sudibjo dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat dipegang Sujono.

Era Orde Baru (1966 – 1998)

Setelah pemberontakan G30S/PKI berhasil dipadamkan, terjadilah peralihan dari demokrasi terpimpin menjadi demokrasi pancasila. Era tersebut dikenal dengan nama Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Kebijakan di bidang pendidikan pada era Orde Baru cukup banyak dan beragam mengingat orde ini memegang kekuasaan cukup lama yaitu 32 tahun. Kebijakan – kebijakan tersebut antara lain kewajiban penataran P\$ bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa,

merintis sekolah pembangunan dan lain – lain. Pada era inilah tepatnya tahun 1978 tahun ajaran baru digeser ke bulan Juni. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga berkembang pesat pada era Orde Baru tersebut.

Menteri pendidikan dan kebudayaan di era Orde Baru antara lain Dr. Daud Joesoef, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, Prof. Dr. Faud Hassan, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro dan Prof. Dr. Wiranto Aris Munandar.

Era Reformasi (1998 – 2011)

Setelah berjaya dengan memenangkan enam kali Pemilu, Orde Baru pada akhirnya sampai pada akhir perjalanannya. Pada tahun 1998, Indonesia diterpa krisis politik dan ekonomi. Demonstrasi besar – besaran di tahun tersebut berhasil memaksa Presiden Soeharto meletakkan jabatannya. Kabinet pertama di era reformasi adalah kabinet hasil pemilu 1999 yang dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional dengan menunjuk Dr. Yahya Muhaimin sebagai Menteri Pendidikan Nasional.

Pada tahun 2001, MPR menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid dalam sidang istimewa MPR dengan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Di era pemerintahan Presiden Megawati, Mendiknas dijabat oleh Prof. Drs. A. Malik Fadjar., M.Sc. Pada pemilihan umum tahun 2004 dan 2009 rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung. Pada dua pemilu tersebut Susilo Bambang Yudhoyono berhasil terpilih menjadi presiden. Selama

kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mendiknas dijabat oleh Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA dan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh.

Pada tahun 2011 istilah departemen diganti menjadi kementerian dan pada tahun 2012 bidang pendidikan dan kebudayaan disatukan kembali menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan pendidikan di era reformasi antara lain lahirnya IKIP menjadi universitas, reformasi undang – undang pendidikan dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, Ujian Nasional (UN), sertifikasi guru dan dosen, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pendidikan karakter dan lain – lain.

Kementerian yang sejak awal zaman kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia memegang peran penting dalam membangun peradaban masyarakat Indonesia ini, memiliki visi yaitu terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif.

Untuk mendukung tercapainya visi tersebut, Kementerian Pendidikan memiliki beberapa program yaitu (1) program pendidikan tinggi; (2) program pendidikan dasar; (3) program pendidikan menengah; (4) program pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal; (5) program pengembangan profesi pendidik tenaga kependidikan dan penjamin mutu pendidikan; dan (6) program pelestarian budaya.

4.1.1.3 Kementerian Kesehatan

Kementerian yang terbentuk sejak tanggal 19 Tahun 1945 ini, memiliki tugas untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan

pemerintahan di bidang kesehatan. Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2016, pasal 3 dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan kefarmasian dan alat kesehatan.
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.
3. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan.
4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.
5. Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan pengelolaan tenaga kesehatan.
6. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah.
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan.
8. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementrian Kesehatan.

Adapun visi dari Kementerian Kesehatan dalam dokumen rencana strategis 2010 – 2014 adalah masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Kesehatan memiliki beberapa misi yaitu

(1) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani; (2) melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan; (3) menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan, dan (4) menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

4.1.1.4 Bank Indonesia

Berdirinya Bank Indonesia atau Bank Sentral satu – satunya di Indonesia memiliki tujuan sebagaimana dalam Undang – Undang Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah itu sendiri terdiri dari dua aspek yaitu kestabilan terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain (kurs). Kestabilan terhadap barang dan jasa tercermin pada perkembangan laju inflasi, sedangkan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain tercermin pada perkembangan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap negara lain.

Untuk mencapai tujuan dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia selaku bank sentral dalam pasal 8 UU No. 23 Tahun 1999 mempunyai 3 (tiga) tugas yaitu :

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
3. Mengatur dan mengawasi bank.

Adapun wewenang yang diberikan oleh undang – undang dalam rangka melaksanakan tugas di atas adalah sebagai berikut.

- a. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter meliputi
 - 1. Menetapkan sasaran – sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi.
 - 2. Melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing.
 - 3. Menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan minimum dan mengatur kredit atau pembiayaan.
- b. Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran meliputi
 - 1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
 - 2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya dan menetapkan alat atau instrumen pembayaran.
- c. Tugas mengatur dan mengawasi bank meliputi
 - 1. Menetapkan peraturan.
 - 2. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank.
 - 3. Mengawasi bank baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan.
 - 4. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pelaksanaan ketiga tugas saling terkait dalam mencapai kestabilan nilai rupiah. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter memerlukan

dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal. Sementara untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal tersebut diperlukan sistem perbankan yang sehat karena sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter sebab pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan. Namun sejak 1 Januari 2014 tugas mengatur dan mengawasi bank, sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK. Tugas tersebut dialihkan dengan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

4.1.1.5 Kementerian Keuangan

Sebagaimana dalam website resmi Kementerian Keuangan Indonesia, di Indonesia, sejarah pengelolaan keuangan pemerintahan sudah ada sejak masa lampau. Tiap pemerintahan, dari zaman kerajaan hingga sekarang, memiliki pengelola keuangan untuk dapat melaksanakan pembangunan perekonomian di pemerintahannya. Pengelolaan keuangan pemerintahan disini meliputi semua milik pemerintah atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintahan. Keuangan yang dikelola berasal dari masyarakat baik berupa upeti, pajak, bea cukai dan lain – lain.

Sebagai bagian dari suatu pemerintahansebagaimana tercantum dalam website resmi Kementrian Keuangan, Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai peran vital didalam suatu negara untuk melakukan pembangunan perekonomian. Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar apabila disertai dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.

Peranan vital Kementerian Keuangan adalah mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara dalam bidang keuangan dan kekayaan negara. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan dapat dikatakan sebagai penjaga keuangan negara (Nagara Dana Raksa).

Sejalan dengan peran vital yang di jalankan, Kementerian Keuangan memiliki visi dan misi demi menunjang peran yang dijalankan yaitu Kementerian Keuangan memiliki visi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan memiliki 5 (lima) misi antara lain :

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat.
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent.
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan resiko minimum.
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif.
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik dikelasnya dengan menawarkan proporsi nilai pegawai yang kompetitif.

Adapun Kementerian Keuangan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi :

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan dan pengelolaan pembiayaan dan resiko.
- b. Perumusan, penetapan dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan.
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
- d. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan.
- e. Pengawasan atas pelaksanaan di lingkungan Kementerian Keuangan.
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah.
- g. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- h. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara
- i. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian Keuangan.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Distribusi Dana Zakat Infaq Sedekah

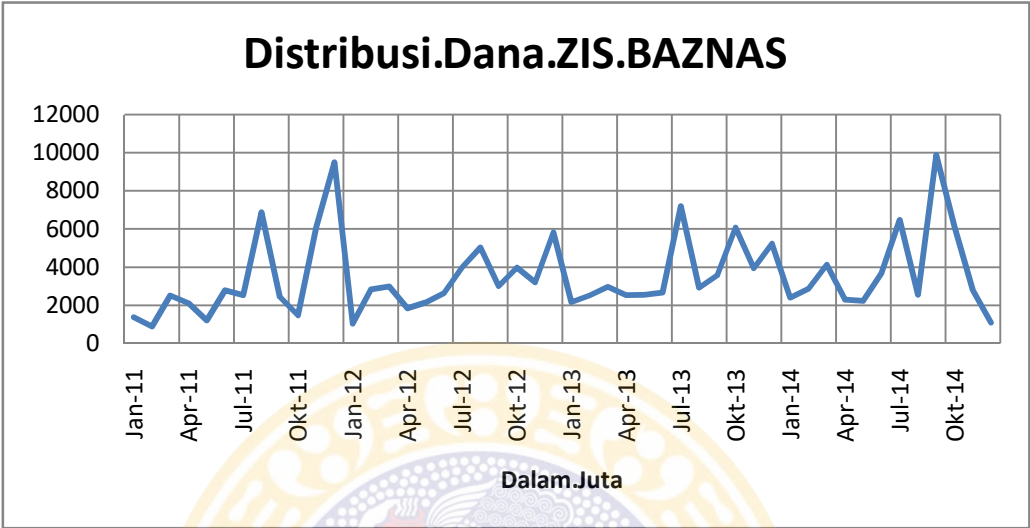
Distribusi Dana Zakat Infaq dan Sedekah merupakan total penyaluran dana ZIS kepada para *mustahiq* yang bertujuan untuk mengentaskan mereka dari jerat kemiskinan dalam satu periode. Total distribusi dana ZIS yang tercatat pada

penelitian ini adalah total distribusi dana ZIS yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS pusat dalam rentang periode Januari 2011 hingga Desember 2014. Distribusi dana ZIS dipilih sebagai salah satu variabel bebas pada penelitian ini. Berikut ini tabel dan gambar yang menunjukkan distribusi dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS dalam rentang periode Januari 2011 hingga Desember 2014.

Tabel 4.1
Distribusi Dana ZIS di BAZNAS Indonesia
Periode Januari 2011 hingga 2014
Dalam Juta Rupiah

Bulan	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Januari	1.380,898	1.050,222	2.160,455	2.398,965
Februari	893,733	2.834,754	2.525,782	2.868,043
Maret	2.519,152	2.985,090	2.975,714	4.131,152
April	2.113,990	1.843,474	2.542,594	2.302,972
Mei	1.207,239	2.145,131	2.560,127	2.240,544
Juni	2.778,764	2.629,141	2.667,951	3.681,385
Juli	2.534,111	3.988,431	7.188,801	6.481,468
Agustus	6.872,460	5.036,217	2.920,366	2.545,271
September	2.445,528	2.998,729	3.580,808	9.874,306
Oktober	1.475,029	3.983,091	6.071,985	6.118,327
November	6.094,664	3.204,890	3.941,130	2.811,557
Desember	9.489,160	5.816,931	5.229,350	10.947,134

Sumber : www.pusat.baznas.go.id



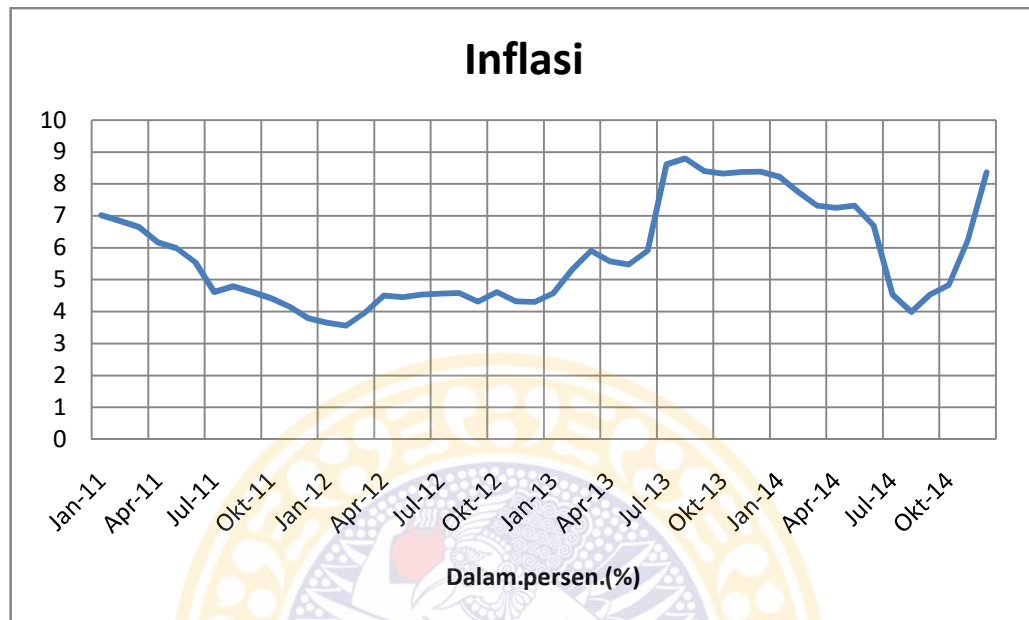
4.2.2 Deskripsi Inflasi

Menurut Murni (2009:196) inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus. Inflasi disini harus terkendali agar dapat mengentaskan kemiskinan. Untuk mendapatkan data tentang inflasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, di unduh dari laman resmi Bank Indonesia pada rentang periode Januari 2011 hingga Desember 2014. Inflasi dipilih sebagai salah satu variabel bebas pada penelitian ini. Berikut adalah tabel dan gambar yang menunjukkan tingkat inflasi dalam rentang periode Januari 2011 hingga Desember 2014.

Tabel 4.2
Tingkat Inflasi di Indonesia
Periode Januari 2011 hingga Desember 2014
Dalam Persen (%)

Bulan	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Januari	7,02	3,65	4,57	8,22
Februari	6,84	3,56	5,31	7,75
Maret	6,65	3,97	5,9	7,32
April	6,16	4,5	5,57	7,25
Mei	5,98	4,45	5,47	7,32
Juni	5,54	4,53	5,9	6,7
Juli	4,61	4,56	8,61	4,53
Agustus	4,79	4,58	8,79	3,99
September	4,61	4,31	8,4	4,53
Oktober	4,42	4,61	8,32	4,83
November	4,15	4,32	8,37	6,23
Desember	3,79	4,3	8,38	8,36

Sumber : www.bi.go.id (Di akses pada 09 September 2016)

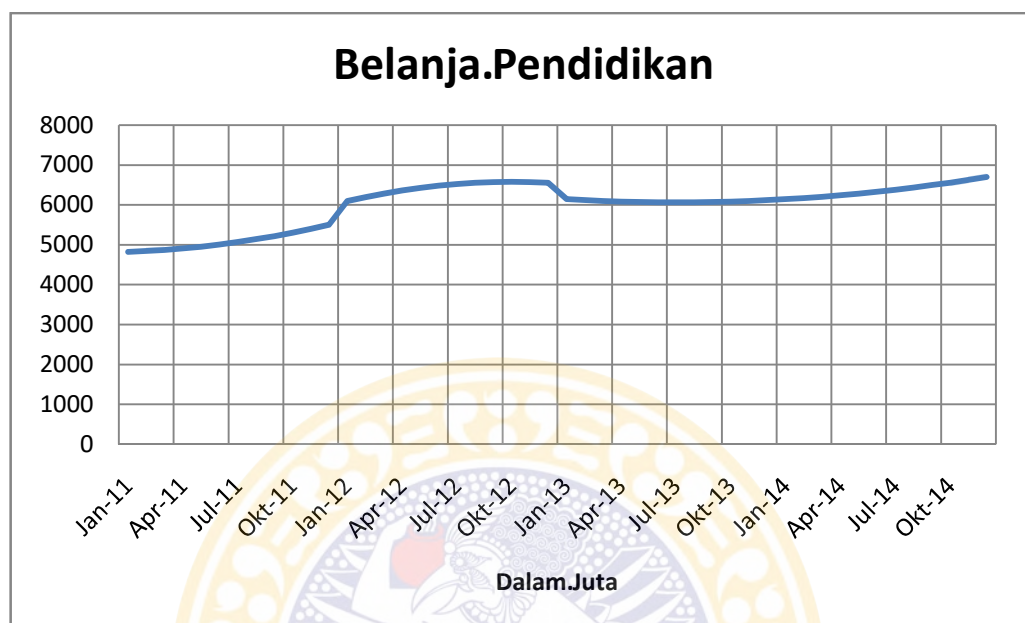


anggaran pada Kemendikbud dalam rentang periode Januari 2011 – Desember 2014. Belanja pendidikan dipilih sebagai salah satu variabel bebas pada penelitian ini. Berikut adalah tabel dan gambar yang akan menjelaskan anggaran bidang pendidikan periode Januari 2011 hingga Desember 2014.

Tabel 4.3
Realisasi APBN untuk Pendidikan di Indonesia
Periode Januari 2011 hingga Desember 2014
Dalam Juta Rupiah

Bulan	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Januari	4.824,260	6.094,750	6.142,620	6.142,967
Februari	4.844,490	6.194,993	6.118,578	6.171,443
Maret	4.873,057	6.283,539	6.098,912	6.204,297
April	4.909,962	6.360,389	6.083,623	6.241,526
Mei	4.955,204	6.425,543	6.072,711	6.283,133
Juni	5.008,783	6.479,000	6.066,175	6.329,115
Juli	5.070,699	6.520,760	6.064,015	6.379,475
Agustus	5.140,953	6.550,824	6.066,233	6.434,211
September	5.219,544	6.569,191	6.072,826	6.493,323
Oktober	5.306,472	6.575,862	6.083,797	6.556,812
November	5.401,737	6.570,836	6.099,143	6.624,678
Desember	5.505,339	6.554,114	6.118,867	6.696,920

Sumber : www.anggaran.depkeu.go.id (Di akses pada 09 September 2016)



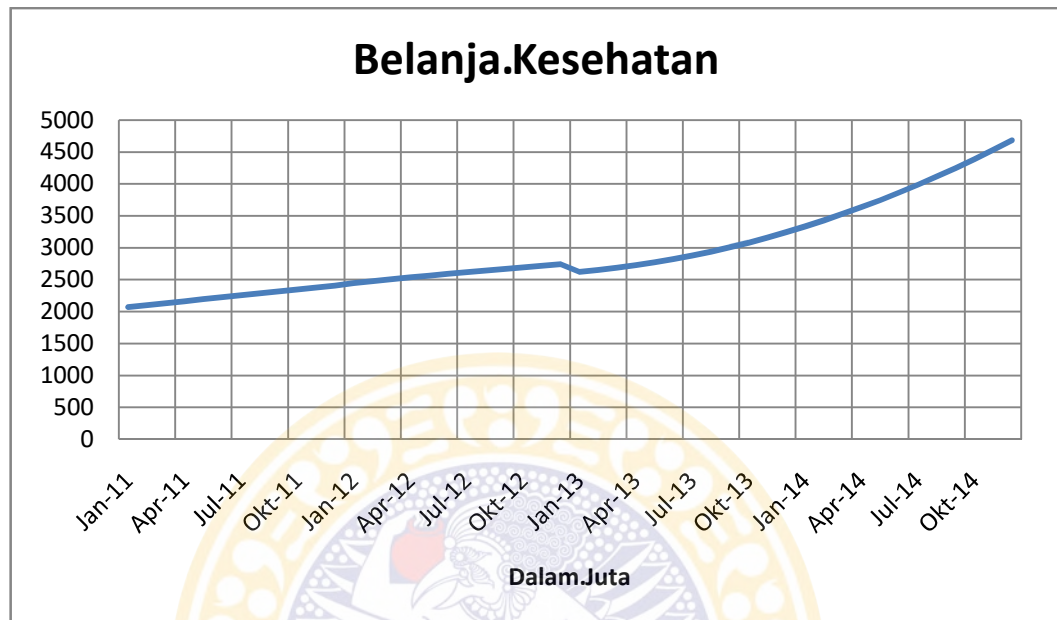
4.2.4 Deskripsi Belanja Kesehatan

Belanja kesehatan merupakan total anggaran belanja bidang kesehatan yang bertujuan untuk membuat rakyat lebih sejahtera melalui kesehatan dan agar terbebas dari jerat kemiskinan dalam satu periode. Total belanja yang tercatat dalam penelitian ini adalah total anggaran belanja yang diperuntukkan kepada kementerian kesehatan dalam rentang periode Januari 2011 hingga Desember 2014. Belanja kesehatan dipilih sebagai salah satu variabel bebas pada penelitian ini. Berikut tabel dan gambar yang menunjukkan anggaran belanja bidang kesehatan dalam rentang periode Januari 2011 hingga Desember 2014.

Tabel 4.4
Realisasi APBN untuk Kesehatan Indonesia
Periode Januari 2011 hingga Desember 2014
Dalam JutaRupiah

Bulan	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Januari	2.071,091	2.448,052	2.621,569	3.332,614
Februari	2.101,882	2.477,591	2.650,531	3.427,667
Maret	2.132,609	2.506,576	2.685,001	3.528,227
April	2.163,273	2.535,009	2.724,979	3.634,295
Mei	2.193,873	2.562,888	2.770,464	3.745,870
Juni	2.224,409	2.590,215	2.821,456	3.862,953
Bulan	2011	2012	2013	2014
Juli	2.254,882	2.616,988	2.877,956	3.985,543
Agustus	2.285,291	2.643,208	2.939,964	4.113,641
September	2.315,637	2.668,875	3.007,479	4.247,246
Oktober	2.345,920	2.693,989	3.080,501	4.386,359
November	2.376,138	2.718,550	3.159,031	4.530,979
Desember	2.406,294	2.742,558	3.243,069	4.681,107

Sumber : www.anggaran.depkeu.go.id (Di akses pada 09 September 2016)



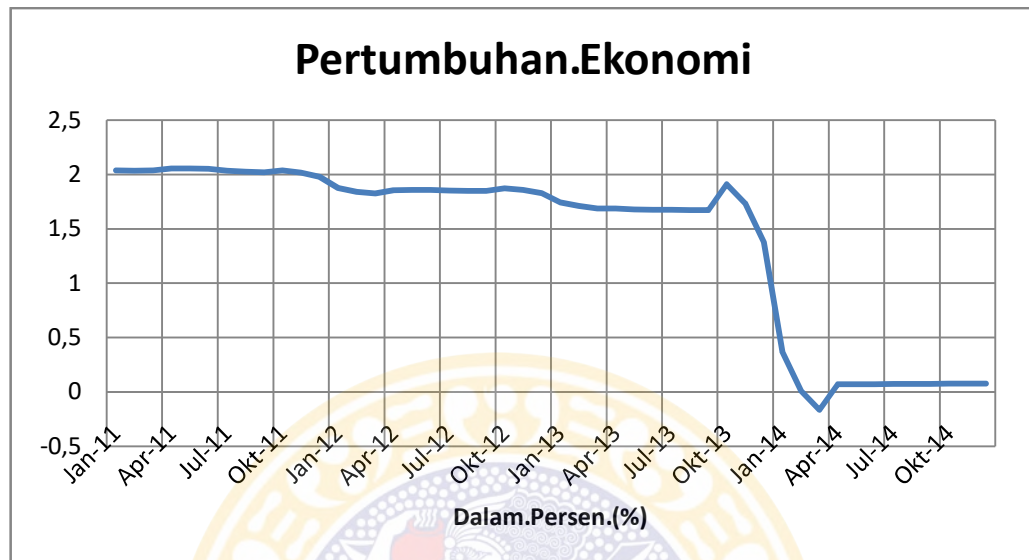
4.2.5 Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Bruto sebagaimana menurut Arista (2013) adalah jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (*netto*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Tabel 4.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran
Periode Januari 2011 hingga Desember 2014
Dalam Satuan Persen (%)

Bulan	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Januari	2,037901	1,875432	1,744198	0,368914
Februari	2,035309	1,840247	1,709383	0,013062
Maret	2,03679	1,824321	1,68642	-0,16498
April	2,054198	1,855802	1,68716	0,071494
Mei	2,054938	1,857284	1,679012	0,071568
Juni	2,050864	1,856914	1,673827	0,071938
Juli	2,034074	1,850741	1,674568	0,072852
Agustus	2,026296	1,84963	1,673086	0,07363
September	2,01963	1,84963	1,672346	0,074519
Oktober	2,037284	1,873457	1,910519	0,075519
November	2,015432	1,858642	1,73263	0,07663
Desember	1,977284	1,827901	1,376852	0,077852

Sumber : www.bps.go.id (Di akses pada 09 September 2016)



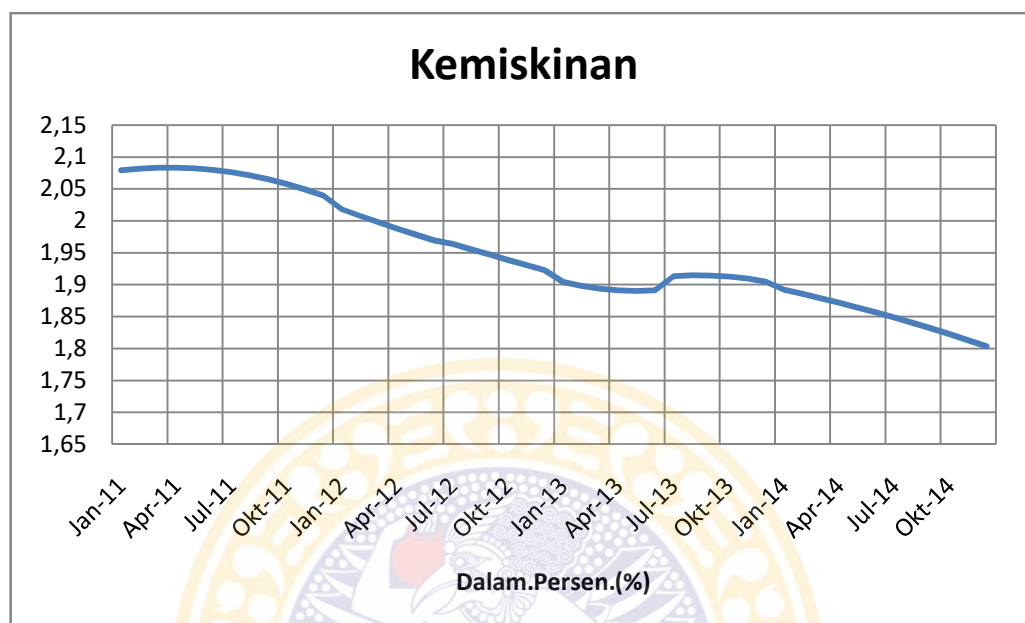
4.2.6 Deskripsi Kemiskinan

Kemiskinan menurut United Nation Development Programme (UNDP) dalam Amalia (2010) adalah seseorang yang dikategorikan sebagai orang miskin jika memiliki pengeluaran di bawah US\$ 2 per hari.

Tabel 4.6
Persentase Penduduk Miskin Di Indonesia
Periode Januari 2011 hingga Desember 2014
Dalam Persen (%)

Bulan	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Januari	2,079236	2,01841	1,904606	1,892168
Februari	2,081875	2,007762	1,898356	1,885733
Maret	2,083264	1,997577	1,893912	1,878974
April	2,083403	1,987855	1,891273	1,87189
Mei	2,082292	1,978596	1,89044	1,864483
Juni	2,079931	1,969799	1,891412	1,856752
Juli	2,076319	1,963897	1,913364	1,848696
Agustus	2,071458	1,95561	1,91466	1,840316
September	2,065347	1,947369	1,914475	1,831613
Oktober	2,057986	1,939174	1,912809	1,822585
November	2,049375	1,931026	1,90966	1,813233
Desember	2,039514	1,922924	1,905031	1,803557

Sumber : www.bps.go.id (Di akses pada 09 September 2016)



4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pembuktian Hipotesis

4.3.1 Uji Asumsi Klasik

4.3.1.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dalam Sulyanto (2011:81) adalah sebuah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebasnya maka model regresi tersebut mengandung gejala multikolinier.

Dalam sulyanto (2011:81-82) terdapat beberapa cara atau metode untuk mendeteksi ada tidaknya masalah multikolinearitas antara lain dengan melihat nilai R^2 dan nilai t statistik, dengan melihat nilai *Pair Wise Correlation* antar variabel bebas, dengan menggunakan regresi bantuan (*auxiliary regression*), dengan melihat nilai korelasi parsial (*Examination of Partial Correlation*), dengan berdasarkan nilai *eigenvalues* dan Condition Index serta dapat juga dengan menggunakan nilai TOL (*Tolerance*) dan VIF (*Variance Inflation Factor*).

Dalam penelitian ini menggunakan VIF (*Variance Inflation Factor*) untuk mendekteksi ada tidaknya masalah multikolinearitas pada variabel – variabel yang digunakan. Jika nilai daripada *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 maka model tersebut dinyatakan tidak mengandung multikolinearitas.berikut ini adalah tabel hasil dari pengolahan data mengenai ada tidaknya multikolinearitas pada penelitian ini.

Tabel 4.7
Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Nilai VIF	Nilai <i>Tolerance</i>	Interpretasi Hasil	Keterangan
Distribusi Dana ZIS	1,141	0,876	Nilai <i>tolerance</i> > 0,1 Nilai VIF < 10	Tidak terjadi Multikolinieritas
Inflasi	1,287	0,777	Nilai <i>tolerance</i> > 0,1 Nilai VIF < 10	Tidak terjadi Multikolinieritas
Belanja Kesehatan	10,092	0,099	Nilai <i>tolerance</i> < 0,1 Nilai VIF > 10	Terjadi Multikolinieritas
Belanja Pendidikan	2,096	0,477	Nilai <i>tolerance</i> > 0,1 Nilai VIF < 10	Tidak terjadi Multikolinieritas
Pertumbuhan Ekonomi	7,126	0,140	Nilai <i>tolerance</i> > 0,1 Nilai VIF < 10	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber : Lampiran 3, Hasil Uji SPSS 16 (data telah diolah)

Berdasarkan tabel 4.7, nilai *tolerance* dari masing – masing variabel adalah untuk ZIS sebesar 0,876, Inflasi sebesar 0,777, Belanja Kesehatan sebesar 0,099, Belanja Pendidikan sebesar 0,477 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,140 sehingga yang mengalami gejala multikolinieritas apabila dengan melihat nilai *tolerance* masing – masing variabel hanya pada variabel belanja kesehatan yang mengalami gejala multikol karena memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1.

Masih dengan melihat tabel 4.7, nilai VIF untuk masing – masing variabel adalah untuk ZIS sebesar 1,141, Inflasi sebesar 1,287, Belanja Kesehatan sebesar 10,092, Belanja Pendidikan sebesar 2,096 serta Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,126. Dengan melihat angka – angka tersebut dan juga parameter VIF, hanya pada variabel Belanja Kesehatan yang mengalami gejala Multikolinieritas karena memiliki nilai sebesar 10,092. Oleh sebab itu gejala multikolinieritas tersebut harus dihilangkan yaitu dengan cara melakukan *first difference* pada data yang akan diolah. Berikut ini adalah data setelah dilakukan *first difference*.

Tabel 4.8
Uji Multikolinieritas Setelah *first difference*

Variabel Bebas	Nilai VIF	Nilai <i>Tolerance</i>	Interpretasi Hasil	Keterangan
Distribusi Dana ZIS	1,105	0,905	Nilai <i>tolerance</i> > 0,1 Nilai VIF < 10	Tidak terjadi Multikolinieritas
Inflasi	1,876	0,533	Nilai <i>tolerance</i> > 0,1 Nilai VIF < 10	Tidak terjadi Multikolinieritas
Belanja Kesehatan	1,388	0,721	Nilai <i>tolerance</i> > 0,1 Nilai VIF < 10	Tidak terjadi Multikolinieritas
Belanja Pendidikan	2,162	0,463	Nilai <i>tolerance</i> > 0,1 Nilai VIF < 10	Tidak terjadi Multikolinieritas
Pertumbuhan Ekonomi	1,520	0,658	Nilai <i>tolerance</i> > 0,1 Nilai VIF < 10	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber : Lampiran 4, Hasil Uji SPSS 16 (data telah diolah)

Berdasarkan tabel 4.10 diatas nilai *tolerance* dari masing – masing variabel antara lain untuk nilai dari ZIS sebesar 0,905, Inflasi sebesar 0,533, Belanja Kesehatan sebesar 0,721, Belanja Pendidikan sebesar 0,463 serta Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,658. Dengan hasil yang telah disebutkan maksudnya adalah seluruh variabel independen tidak mengalami gejala multikolinieritas karena nilai dari *tolerance* setiap variabel independen tidak ada yang dibawah 0,1.

Masih dengan melihat tabel uji multikolinieritas yang telah di *first difference* diatas, nilai VIF dari masing – masing variabel antara lain untuk ZIS sebesar 1,105, Inflasi sebesar 1,876, Belanja Kesehatan sebesar 1,388, Belanja Pendidikan sebesar 2,162 serta nilai VIF untuk Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1,520. Dengan hasil yang telah diolah diatas, seluruh variabel tidak mengalami gejala multikolinieritas dikarenakan seluruh nilai VIF dari masing – masing variabel kurang dari 10.

4.3.1.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam Santoso (2012:241) tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Menurut Gujarati dalam Suliyanto (2011:126), ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi yaitu dengan menggunakan metode analisis grafik, Durbin-Watson, metode Lagrange Multiplier (LM Test), metode Breusch-Godfrey (B-G Test) dan metode Run Test.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengujian Durbin-Watson. Menurut Santoso (2012:242) terdapat kriteria dalam pengambilan kesimpulan akan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut :

1. Jika nilai DW terletak dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2. Jika nilai DW terletak diantara -2 hingga +2 berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika nilai DW terletak diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Tabel 4.9
Uji Autokorelasi

Nilai Durbin Watson	Batas Bebas Autokorelasi	Interpretasi Hasil	Keterangan
0,261	-2 hingga +2	Diantara -2 dan +2	Tidak terdapat autokorelasi

Sumber : Lampiran 3, Hasil Uji SPSS 16 (data telah diolah)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas kita semua dapat mengetahui bahwa data yang digunakan menurut Santoso (2012: 242) tidak mengalami gejala autorelasikarena memiliki nilai Durbin Watson test sebesar 0,261 yang dimana terletak pada wilayah yang tidak memiliki indikasi mengalami gejala autokorelasi karena terletak pada wilayah antara -2 hingga +2. Dikarenakan pada saat

pengolahan data pertama terdapat gejala asumsi klasik yang lain, yaitu multikolinieritas, maka penyakit data tersebut harus dihilangkan. Cara untuk menghilangkan penyakit dari data adalah dengan melakukan *first difference*. Berikut ini adalah pengujian autokorelasi setelah dilakukan *first difference*.

Tabel 4.10
Uji Autokorelasi Setelah *first difference*

Nilai Durbin Watson	Batas Bebas Autokorelasi	Interpretasi Hasil	Keterangan
0,771	-2 hingga +2	Diantara -2 dan +2	Tidak terdapat autokol

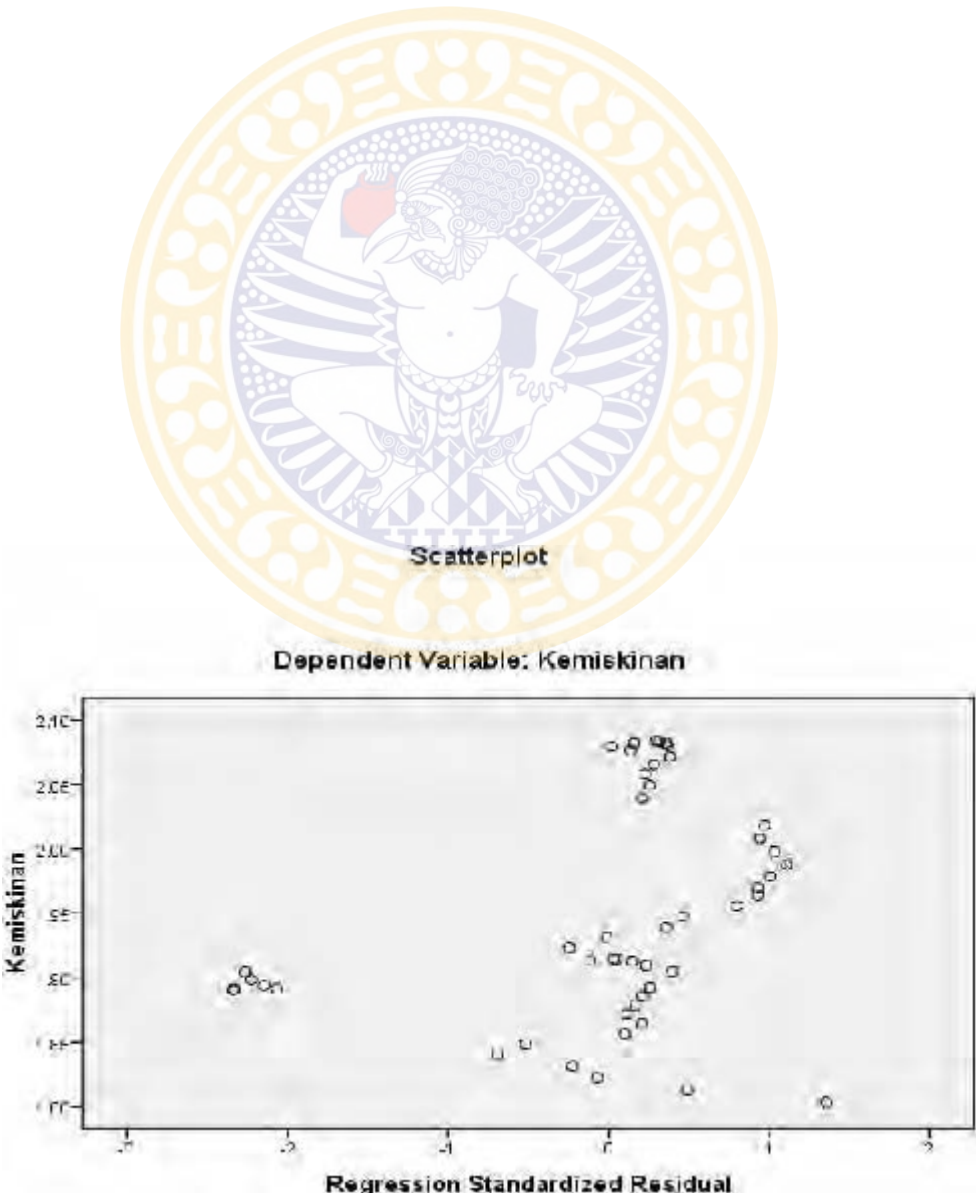
Sumber : Lampiran 4, Hasil Uji SPSS 16 (data telah diolah)

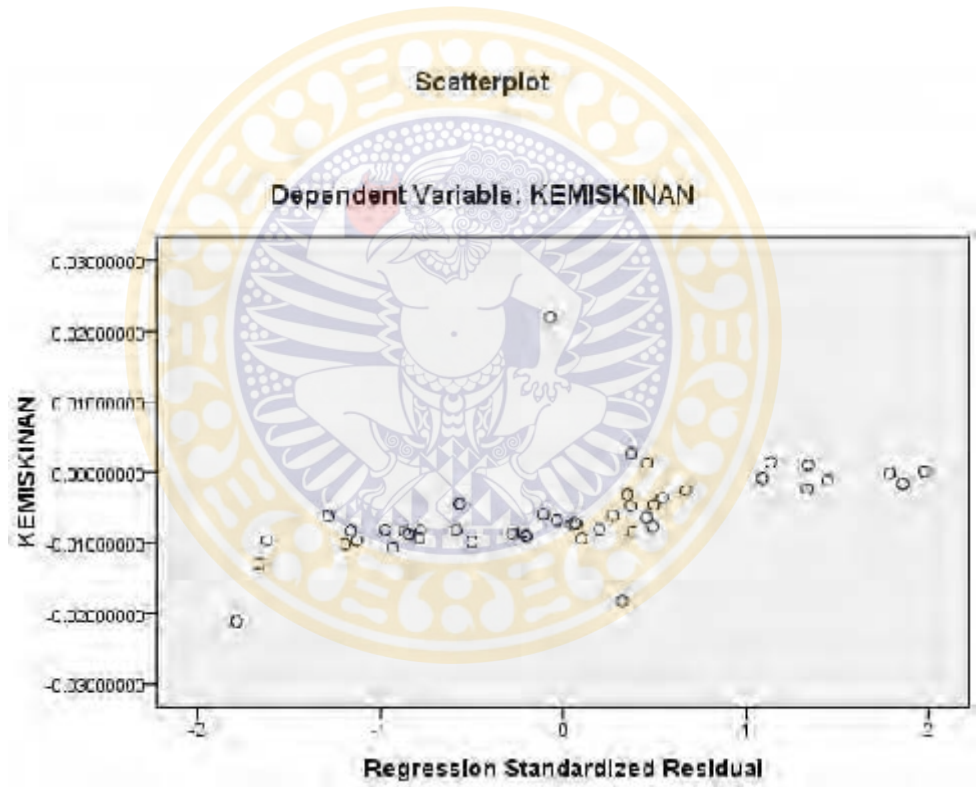
Berdasarkan tabel 4.13 diatas, dapat kita ketahui bahwa nilai Durbin Watson test sebesar 0,771 yang dimana data tersebut menurut Santoso (2012: 242) berada di wilayah yang tidak memiliki gejala autokorelasi yakni berada pada wilayah kurang antara -2 hingga +2.

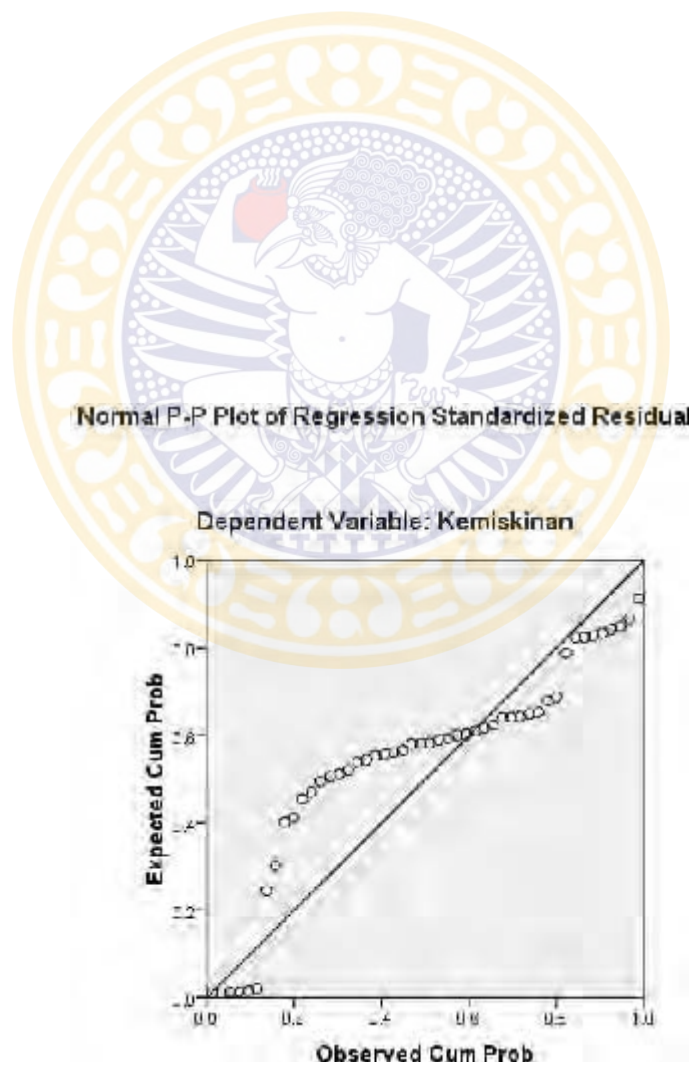
4.3.1.3 Uji Heterokedastisitas

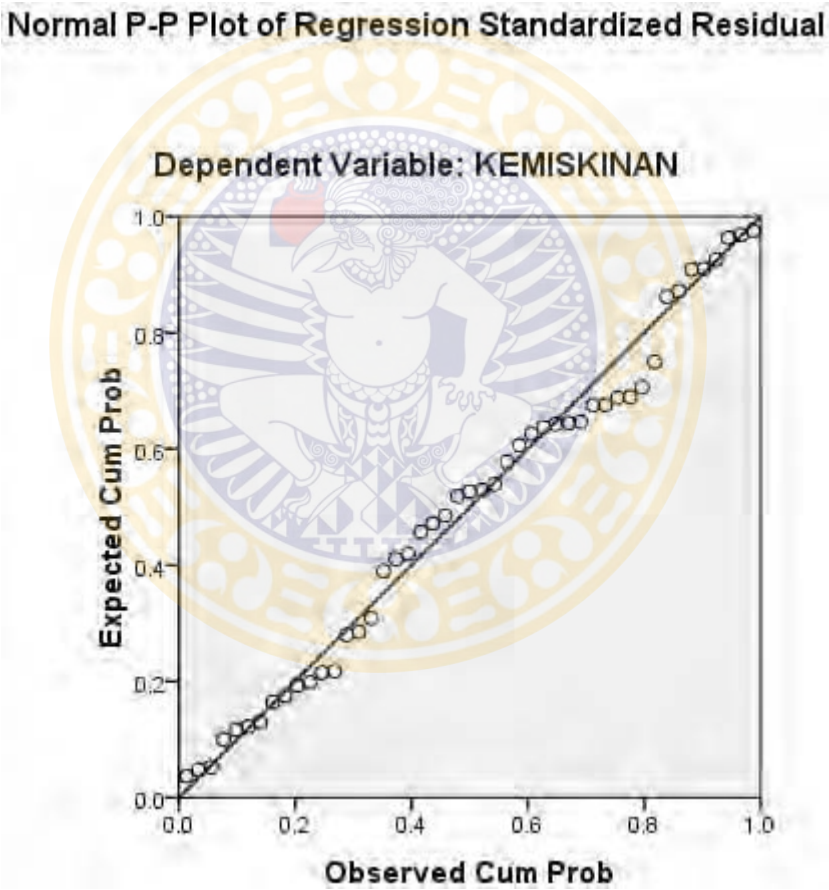
Suliyanto (2011:95) berpendapat bahwa heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan homoskedastisitas. Yang diharapkan peneliti pada model regresi adalah varian variabel yang memiliki nilai yang sama atau homoskedastisitas.

Metode untuk menguji apakah pada model regresi terdapat heteroskedastisitas atau tidak menurut Suliyanto (2011:95-117) terdapat beberapa metode yaitu metode analisis grafik, metode glejser, metode park, metode white, metode rank spearman dan metode bresch-pagan-godfrey (BPG). Dalam penellitian ini, peneliti menggunakan metode glejser.









4.3.2 Analisis Koefisien Determinasi Berganda

Koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya (*goodness of fit*). Koefisien determinasi ini mengukur persentase total variasi variabel dependen Y yang telah dijelaskan oleh variabel independen di dalam regresi. Regresi yang baik nilai R^2 semakin mendekati 1 dan bila semakin mendekati 0 garis regresi dapat dikatakan kurang baik. Dalam penelitian ini, nilai koefisien determinasi berganda sebelum dilakukan *first difference* sebesar 0,906 atau dengan kata lain variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen yaitu variabel kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel zis, inflasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan pertumbuhan ekonomi selaku variabel independen sebesar 90,6 % dan sebesar 9,4 % dijelaskan oleh variabel lain. Sedangkan setelah dilakukan *first difference* sebesar 0,715 atau sebesar 71,5 persen variabel yang mempengaruhi variabel dependen yaitu kemiskinan dapat dijelaskan melalui variabel distribusi dana zis, inflasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan serta pertumbuhan ekonomi.

4.3.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini Distribusi Dana ZIS, Inflasi, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi digunakan sebagai variabel independen dan kemiskinan sebagai variabel dependen. Teknik analisis regresi digunakan untuk melihat hubungan parsial dan simultan antara pertumbuhan distribusi dana zis, inflasi, belanja kesehatan, belanja pendidikan serta pertumbuhan ekonomi terhadap

kemiskinan. Setelah memperoleh data, maka dilakukan regresi linear antara variabel dependen penurunan kemiskinan dengan Distribusi Dana ZIS, inflasi, belanja kesehatan, belanja pendidikan serta pertumbuhan ekonomi menggunakan alat bantu SPSS 16. Hasilnya akan terdapat nilai regresi dari setiap variabel dalam penelitian dan dimasukkan kedalam persamaan regresi linear berganda. Berikut adalah persamaan regresi linier berganda : $Y_{\text{kemiskinan}} = -0,004 - 2,020E-11 (\text{ZIS}) + 0,002 (\text{Inf}) - 2,958E-5 (\text{Pendidikan}) - 2,502E-5 (\text{Kesehatan}) - 0,009 (\text{PDB})$

4.3.4 Pengujian Hipotesis

4.3.4.1 Uji F

Suliyanto (2011:61) berpendapat bahwa uji F digunakan untuk menguji ketepatan model (*goodness of fit*). Uji F ini juga sering disebut sebagai uji simultan, yang mana untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel dependen atau tidak. Maksudnya adalah apakah semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan uji F berdasarkan :

a. Perbandingan F-Hitung dan F-Tabel

1. Apabila $F\text{-Hitung} > f_{\alpha}(k, n-k-1)$ maka H_0 ditolak
2. Apabila $F\text{-Hitung} < f_{\alpha}(k, n-k-1)$ maka H_0 diterima

b. Probabilitas

1. $\text{Prob.}(p\text{-value}) > \text{significance level}$ maka H_0 diterima
2. $\text{Prob.}(p\text{-value}) < \text{significance level}$ maka H_0 ditolak

Langkah-langkah Uji F diantaranya :

1. Merumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1)
2. Menentukan tingkat signifikansi (α) yaitu sebesar 10% dengan derajat kebebasan (df) sebesar $n-k-1$
3. Melakukan keputusan menerima atau menolak H_0

Hipotesis Penelitian :

1. H_0 : Distribusi dana zis, inflasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan.
2. H_1 : Distribusi dana zis, inflasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan.

Tabel 4.11
Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.001	5	.000	20.613	.000 ^a
	Residual	.001	41	.000		
	Total	.002	46			

a. Predictors: (Constant), ZIS, INFLASI, KESEHATAN, PDB, PENDIDIKAN

b. Dependent Variable: KEMISKINAN

Sumber : Lampiran 4, Hasil Uji SPSS 16 (data telah diolah)

Berdasarkan hasil penelitian, dengan melihat tabel 4.11 pada kolom sig, penelitian ini tidak menerima H_0 . Ditolaknya H_0 dikarenakan hasil penelitian menyebutkan bahwa $P - Value < Sig \alpha$ yaitu $0,000 < 0,10$. Tidak hanya itu, F hitung yaitu sebesar 20.613 yang lebih besar dari F tabel sebesar 1,99 juga memperkuat alasan untuk menolak H_0 .

4.3.4.2 Uji t

Suliyanto (2011:62) berpendapat bahwa Uji T digunakan untuk menguji apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung atau tidak. Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti apabila nilai t hitung dari variabel tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel.

Asumsi yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah:

a. Perbandingan T-Hitung dan T Tabel

1. Apabila $T\text{-Hitung} > T\text{-Tabel}$ maka H_0 ditolak
2. Apabila $T\text{-Hitung} < T\text{-Tabel}$ maka H_0 diterima

b. Probabilitas

1. $\text{Prob.}(p\text{-value}) > \text{significance level}$ maka H_0 diterima
2. $\text{Prob.}(p\text{-value}) < \text{significance level}$ maka H_0 ditolak

Hipotesis penelitian :

1. H_0 : Distribusi dana zis berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
 H_1 : Distribusi dana zis berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
2. H_0 : Inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
 H_1 : Inflasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
3. H_0 : Belanja pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

H1 : Belanja pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

4. H₀ : Belanja kesehatan berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

H1 : Belanja kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

5. H₀ : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

H1 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Tabel 4.12
Uji t

Model	T	Sig
(constant)	-3,458	0,001
Pendidikan	-4,255	0,000
Kesehatan	-1,944	0,059
PDB	-2,412	0,020
Inflasi	2,332	0,025
ZIS	-111	0,912

Sumber : Lampiran 4 Hasil Uji SPSS 16 (data telah diolah)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, terdapat beberapa variabel yang H₀ diterima antara lain pada variabel zis dan kesehatan karena nilai dari sig nya lebih besar dari α 10% dengan arah negatif. Sedangkan untuk variabel pendidikan dan pdb untuk H₀ ditolak karena memiliki nilai sig kurang dari α 10% dengan arah negatif. Untuk variabel inflasi dengan memiliki nilai sig kurang dari α 10%, maka H₀ ditolak dengan arah positif.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Distribusi Dana ZIS Badan Amil Zakat Nasional Terhadap Kemiskinan di Indonesia Secara Parsial

Pengaruh distribusi dana ZIS Badan Amil Zakat Nasional secara parsial terhadap kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari hasil uji hipotesis t yang menyatakan bahwa distribusi dana ZIS berpengaruh tidak signifikan dengan arah negatif terhadap kemiskinan di Indonesia periode Januari tahun 2011 hingga Desember tahun 2014. Hal tersebut dapat dibuktikan dari nilai *probability sig* sebesar 0,912 dan nilai t – hitung sebesar -0,111. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan melihat nilai uji t , distribusi dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional berpengaruh tidak signifikan dengan arah negatif secara parsial dalam menurunkan kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2010) dan juga Latifah (2013) yang menyebutkan bahwa penyaluran zakat kepada mustahiq dapat meningkatkan pendapatan mustahiq dan dapat menurunkan angka kemiskinan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Beik (2009) yang meneliti tentang analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan yang memilih studi kasus pada dompet dhuafa republik dengan hasil bahwa zakat mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

Apabila melihat laporan keuangan yang dikeluarkan oleh BAZNAS Indonesia, penyebab distribusi dana ZIS berpengaruh tidak signifikan adalah penyerapan anggaran yang apabila dirata – rata tidak sampai 65% dari total penerimaan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan zaman khalifah yang selalu

menyalurkan sepenuhnya angka sebesar 65% terbilang cukup kecil. Dan juga apabila dibandingkan dengan jumlah APBN yang tersalurkan, jumlah distribusi dana ZIS tidak sampai menyentuh angka 5% dari APBN yang tersalurkan. Dalam penelitian ini juga terdapat temuan baru yaitu BAZNAS Indonesia memiliki program yang fokus dalam memberdayakan masyarakat satu desa atau wilayah dalam bidang ekonomi dan rohaninya.

Landasan distribusi ZIS dalam Islam telah tertuang dalam surah Al An'am ayat 141 yaitu :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝١٤١﴾

Wa Huwa Al-Ladhī 'Ansha'a Jannātin Marūshātin Wa Ghayra Marūshātin Wa An-Nakhla Wa Az-Zara Mukhtaliḡan 'Ukuluhu Wa Az-Zaytūna Wa Ar-Rummāna Mutashābihān Wa Ghayra Mutashābihin Kulū Min Thamarihi 'Idhā 'Athmara Wa 'Ātū Ḥaqqahu Yawma Ḥaṣādihī Wa Lā Tusrifū Innahu Lā Yuḥibbu Al-Musrifīna

Artinya : “dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Berdasarkan arti dari ayat diatas, kita memiliki kewajiban untuk memberikan hak orang yang membutuhkan baik berupa sedekah, infaq maupun zakat. Berdasarkan dari arti dari ayat diatas pula kita tidak boleh berlebih – lebihan, baik dalam konsumsi maupun bersedekah. Dan berdasarkan arti dari ayat

diatas pula kita tidak boleh terlambat dalam menyalurkan hak dari orang yang berhak.

4.4.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Secara Parsial

Pengaruh inflasi secara parsial terhadap kemiskinan di Indonesia berdasarkan uji t yang dilakukan menyatakan bahwa inflasi berpengaruh dengan arah positif secara parsial terhadap kemiskinan di Indonesia periode Januari tahun 2011 hingga Desember 2014. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil uji t sebesar 2,332 dan *probability sig* nya sebesar 0,025 yang mana lebih kecil dari 0,10 sebagaimana dalam Suliyanto (2011:62) hasil pengolahan tersebut berpengaruh. Berdasarkan dari hasil tersebut, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arista (2013) yaitu inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan.

4.4.3 Pengaruh Belanja Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Indonesia Secara Parsial

Berdasarkan dari hasil uji t yang dilakukan, belanja pendidikan secara parsial memiliki pengaruh dengan arah yang negatif terhadap kemiskinan di Indonesia dalam rentang periode Januari tahun 2011 hingga Desember 2014. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil uji t dengan nilai sebesar -4,255 dan nilai *probability sig* sebesar 0,000. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Setyowati (2014) bahwa rendahnya produktivitas kaum miskin disebabkan oleh rendahnya akses mereka memperoleh pendidikan. Dan juga dalam Setyowati (2014) menyebutkan bahwa pendidikan dalam jangka panjang dapat mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan.

Pentingnya pendidikan juga telah dijelaskan dalam Al – Qur'an surah Al – Mujadilah ayat 11 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَاَفْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰتَوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١﴾

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Qīla Lakum Tafassāhū Fī Al-Majālisi Fāfsāhū Yafsaḥi Allāhu Lakum Wa 'Idhā Qīla Anshuzū Fānshuzū Yarfa'i Allāhu Al-Ladhīna 'Āmanū Minkum Wa Al-Ladhīna Ūtū Al-Ilma Darajatin Wa Allāhu Bimā Tamalūna Khabīrun

Artinya : “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan arti dari ayat diatas bahwa Allah akan meninggikan derajat bagi orang – orang yang berilmu. Karena dengan berilmu akan membuat suatu perubahan diantara kaum tersebut. Sebagai contohnya, dengan memiliki ilmu tentang pertanian, maka kaum tersebut dapat meningkatkan produktivitas dalam sektor pertanian. Oleh karena itu, Islam sangat memandang penting soal ilmu.

4.4.4 Pengaruh Belanja Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia Secara Parsial

Pengaruh belanja kesehatan secara parsial terhadap kemiskinan di Indonesia berdasarkan uji t yang dilakukan menyatakan bahwa belanja kesehatan berpengaruh dengan arah negatif secara parsial terhadap kemiskinan di Indonesia periode Januari tahun 2011 hingga Desember 2014. Hal tersebut dapat dibuktikan

dari hasil uji t yang dimana nilai *probability sig* nya sebesar 0,059 atau lebih besar dari α yaitu 0,10 dan nilai uji t sebesar -1,944.

Hasil penelitian ini telah sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setyowati (2014) yaitu dengan adanya peningkatan status kesehatan yang lebih baik akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal tersebut menurut Setyowati (2014) membuat keadaan lebih memungkinkan bagi penduduk miskin untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dan keluar dari jurang kemiskinan.

Islam juga telah memberikan pencerahan terkait baik dengan kesehatan maupun belanja kesehatan yaitu dalam surah Asy - Syuara 78 - 81 :

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾

Al-Ladhī Khalaqanī Fahuwa Yahdīni. Wa Al-Ladhī Huwa Yuṭ'imunī Wa Yasqīni. Wa 'Idhā Marīḍtu Fahuwa Yashfīni. Wa Al-Ladhī Yumīṭunī Thumma Yuḥyīni

Artinya : “(Yaitu Tuhan) yang telah menciptakan Aku, Maka Dialah yang menunjuki Aku, dan Tuhanku, yang Dia memberi Makan dan minum kepadaKu, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku, dan yang akan mematikan Aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali).”

Berdasarkan arti diatas adalah Al – Qur'an adalah obat dari segala macam penyakit bagi orang – orang yang beriman atasnya. Dan hanya atas izin Allah SWT sakit atas kita akan sembuh. Oleh sebab itu kita sebagai umat manusia wajib berusaha dan berdoa. Berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan status kesehatan kita. Dan berdoa hanya kepada Allah SWT agar segera diberikan kesembuhan.

4.4.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Secara Parsial

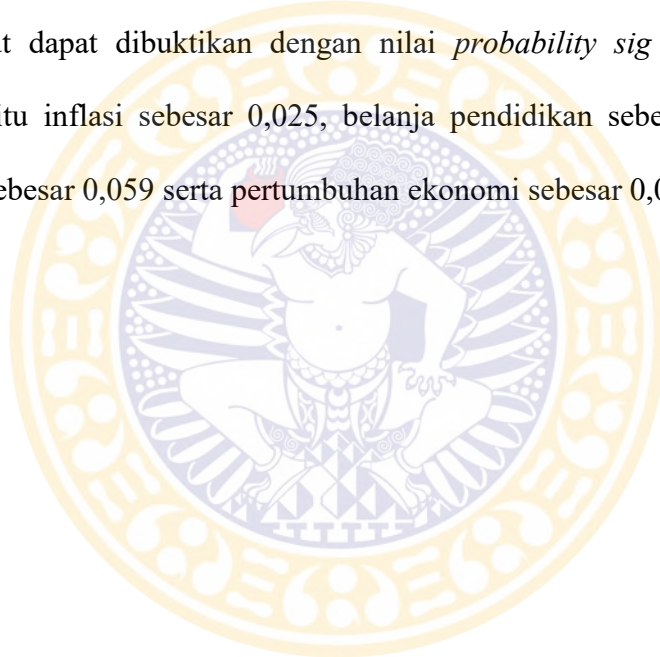
Pengaruh pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap kemiskinan di Indonesia berdasarkan uji t yang dilakukan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomiberpengaruh dengan arah negatif secara parsial terhadap kemiskinan di Indonesia periode Januari tahun 2011 hingga Desember 2014. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil uji t hitungnya sebesar -2,412 dan *probability sig* sebesar 0,020 yang mana lebih kecil dari α sebesar 0,10 menurut Suliyanto (2011:62) memiliki pengaruh. Hasil penelitian ini telah sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anindiarti (2012) yang menyebutkan bahwa selain melakukan perubahan distribusi pendapatan, penekanan angka kemiskinan juga dapat dilakukan dengan cara meningkatkan level pendapatan (pertumbuhan).

4.4.6 Pengaruh Distribusi Dana ZIS Badan Amil Zakat Nasional, Inflasi, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi Secara Simultan Terhadap Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian seluruh variabel independen yaitu distribusi dana zis Badan Amil Zakat Nasional, inflasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap kemiskinan di Indonesia periode Januari tahun 2011 hingga Desember 2014. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil uji f yang dimana *probability sig* bernilai sebesar sebesar 0,000. Menurut Suliyanto (2011:65) jika nilai sig lebih kecil dari α dapat disimpulkan bahwa variabel bebas atau

independen secara simultan mampu menjelaskan perubahan pada variabel dependen atau variabel tergantung.

Pengaruh distribusi dana ZIS, Inflasi, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan terhadap Kemiskinan adalah signifikan. Hal tersebut didukung dengan empat dari lima variabel independen yaitu inflasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan pertumbuhan ekonomi yang juga signifikan berpengaruh secara parsial terhadap kemiskinan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai *probability sig* masing – masing variabel yaitu inflasi sebesar 0,025, belanja pendidikan sebesar 0,000, belanja kesehatan sebesar 0,059 serta pertumbuhan ekonomi sebesar 0,020.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Distribusi dana ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional berpengaruh tidak signifikan dengan arah negatif terhadap kemiskinan di Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0,912.
2. Inflasi berpengaruh signifikan dengan positif terhadap kemiskinan di Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0,025.
3. Belanja pendidikan berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kemiskinan di Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.
4. Belanja kesehatan berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kemiskinan di Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0,059.
5. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kemiskinan di Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0,020.
6. Distribusi dana zis, inflasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk meningkatkan pengumpulan dana zis dengan menggunakan berbagai metode, utamanya mengembangkan metode yang kreatif dan interaktif seperti membuat film pendek tentang manfaat berzakat baik secara langsung dan tidak langsung.
2. Kepada Pemerintah Pusat agar untuk lebih mengembangkan berbagai metode agar penyaluran dan pemanfaatan APBN lebih tepat guna dan tepat sasaran yang diharapkan dapat lebih mengangkat kesejahteraan rakyatnya. Karena masih terdapat temuan – temuan yang tidak tepat sasaran seperti masih terdapat orang kaya yang menerima beasiswa bidikmisi sebagai salah satu produk belanja pendidikan. Selain itu masih terdapat warga yang tidak mampu yang tidak tercakup dalam BPJS kesehatan.
3. Kepada peneliti selanjutnya, apabila ingin mengambil topik penelitian dengan tema zakat, agar lebih fokus pada tiap – tiap daerah atau regional agar dapat dilihat daerah atau regional manakah yang memiliki metode yang ampuh untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Puspita Demy. 2010. *Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin*. Surabaya. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Airlangga Surabaya.
- Anindiarti, Henggar. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2005 – 2010*. Surabaya. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Airlangga Surabaya.
- Arista, Okky. 2013. *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Inflasi dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur Menurut Kabupaten dan Kota Periode Tahun 2006 – 2010*. Surabaya. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Airlangga Surabaya.
- Asfia, Murni. 2006. *Ekonomika Makro*. Jakarta. PT. Refika Aditama.
- Bank Indonesia dan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Beik, Irfan Syauqi. 2009. *Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Studi Kasus Pada Dompot Dhuaqa Republika*. Jurnal Pemikiran dan Gagasan Vol 2.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Grup.
- Effendi, Agus dan Bahrudin Fananny. 2008. *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Grup.
- Firmansah, Yayan. 2010. *Penentuan Penerima Zakat Pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya*. Surabaya. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Airlangga Surabaya.
- Fiqhyany. 2014. *Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha*. Surabaya. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Airlangga Surabaya.

- Ismifaroh, Muizatul. 2012. *Analisis Kesenjangan Jumlah Penghimpunan Dana Zakat dan Alokasi Pendistribusiannya Pada Yayasan Yatim Mandiri dan Dompot Dhuafa Republika*. Surabaya. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Airlangga Surabaya.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2011. *Alquran dan Terjemahan*. Bandung. CV Media Fitrah Rabbani.
- Latifah, Anna Ayyun. 2013. *Pengaruh Promosi Terhadap Loyalitas Donatur Untuk Menyalurkan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Pada Dompot Dhuafa Jawa Timur*. Surabaya. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Airlangga Surabaya.
- Muflih, Muhammad. 2006. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 1999. *Hukum Zakat* (Penerjemah :Harun Salman, Hafidhuddin Didin dan Hasanuddin). Bandung. Mizan dan PT Pustaka Litera AntarNusa. Cetakan ke-5.
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. 2008. *Ekonomi ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf)*. Surabaya. IFDI dan Cenforis.
- Sadono, Sukirno. Makroekonomi. *Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta. PT. Grasindo Persada.
- Santoso, Singgih. 2012. *Analisis SPSS pada Statistik Parametrik*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Setyowati, Retno. 2014. *Pengaruh Alokasi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Belanja Daerah Untuk Kesehatan, Pendidikan dan Pekerjaan Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur 2008 - 2011*. Surabaya. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Airlangga Surabaya.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siregar, Hermanto dan Dwi Wahyuniarti. 2008. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Bogor. Institute Pertanian Bogor.
- Simorangkir, Iskandar. 2014. *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok. PT Raja Grafindo Persada.

Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta. Andi Offset.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. CV Alfabeta.

Soyomukti, Nurani. 2008. *Pendidikan Berperspektif Globalisasi*. Yogyakarta. Ar – Ruzz Media.

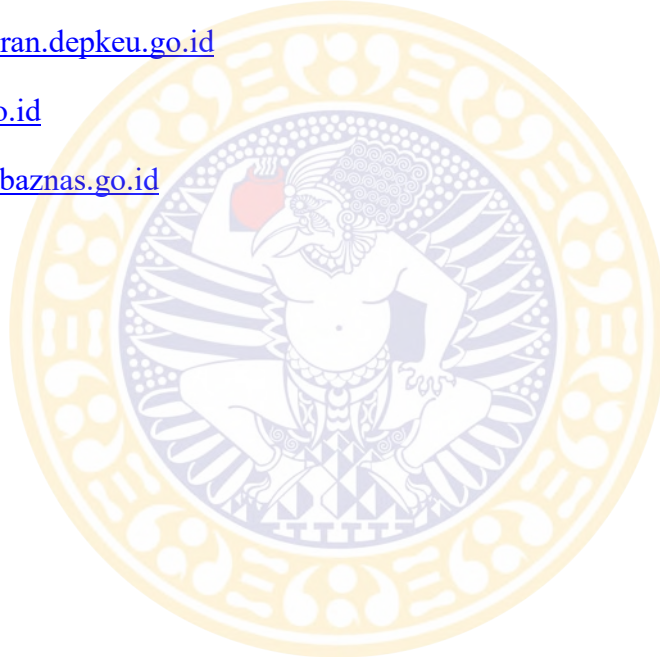
Tjiptoherijanto, Prijono dan Budhi Soesetyo. 1994. *Ekonomi Kesehatan*. Jakarta. PT Rineka Cipta.

Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.

www.anggaran.depkeu.go.id

www.bps.go.id

www.pusat.baznas.go.id



Lampiran 1
Tabulasi Awal

Periode	ZIS	Inflasi	Pendidikan	Kesehatan	PDB	Kemiskinan
2011M01	1380.898	7.02	4824.2597	2071.0915	2.037901	2.0792361
2011M02	893.733	6.84	4844.4899	2101.8821	2.035309	2.081875
2011M03	2519.152	6.65	4873.0574	2132.6092	2.03679	2.0832639
2011M04	2113.99	6.16	4909.9621	2163.2727	2.054198	2.0834028
2011M05	1207.239	5.98	4955.204	2193.8727	2.054938	2.0822917
2011M06	2778.764	5.54	5008.7831	2224.4092	2.050864	2.0799306
2011M07	2534.111	4.61	5070.6994	2254.8821	2.034074	2.0763194
2011M08	6872.46	4.79	5140.953	2285.2915	2.026296	2.0714583
2011M09	2445.528	4.61	5219.5437	2315.6373	2.01963	2.0653472
2011M10	1475.029	4.42	5306.4717	2345.9196	2.037284	2.0579861
2011M11	6094.664	4.15	5401.7368	2376.1384	2.015432	2.049375
2011M12	9489.16	3.79	5505.3392	2406.2936	1.977284	2.0395139
2012M01	1050.222	3.65	6094.7495	2448.0523	1.875432	2.0184105
2012M02	2834.754	3.56	6194.9926	2477.5909	1.840247	2.0077623
2012M03	2985.09	3.97	6283.5391	2506.5764	1.824321	1.9975772
2012M04	1843.474	4.5	6360.3891	2535.0089	1.855802	1.9878549
2012M05	2145.131	4.45	6425.5426	2562.8883	1.857284	1.9785957
2012M06	2629.141	4.53	6479.000	2590.2146	1.856914	1.9697994
2012M07	3988.431	4.56	6520.760	2616.9879	1.850741	1.9638966
2012M08	5036.217	4.58	6550.8238	2643.2081	1.84963	1.9556096
2012M09	2998.729	4.31	6569.1912	2668.8752	1.84963	1.9473688
2012M10	3983.091	4.61	6575.862	2693.9892	1.873457	1.9391744
2012M11	3204.89	4.32	6570.8363	2718.5502	1.858642	1.9310262
2012M12	5816.931	4.3	6554.1141	2742.5582	1.827901	1.9229244
2013M01	2160.455	4.57	6142.620	2621.569	1.744198	1.9046065
2013M02	2525.782	5.31	6118.5779	2650.5313	1.709383	1.8983565
2013M03	2975.714	5.9	6098.9122	2685.0013	1.68642	1.893912
2013M04	2542.594	5.57	6083.6232	2724.9787	1.68716	1.8912731
2013M05	2560.127	5.47	6072.7107	2770.4636	1.679012	1.8904398
2013M06	2667.951	5.9	6066.1747	2821.4561	1.673827	1.891412
2013M07	7188.801	8.61	6064.0154	2877.9561	1.674568	1.9133642
2013M08	2920.366	8.79	6066.2326	2939.9636	1.673086	1.9146605
2013M09	3580.808	8.4	6072.8263	3007.4787	1.672346	1.9144753
2013M10	6071.985	8.32	6083.7966	3080.5013	1.910519	1.9128086
2013M11	3941.13	8.37	6099.1435	3159.0313	1.73263	1.9096605
2013M12	5229.35	8.38	6118.8669	3243.069	1.376852	1.9050309
2014M01	2398.965	8.22	6142.9669	3332.6141	0.368914	1.8921682
2014M02	2868.043	7.75	6171.4435	3427.6668	0.013062	1.885733
2014M03	4131.152	7.32	6204.2966	3528.2269	-0.16498	1.8789738
2014M04	2302.972	7.25	6241.5263	3634.2947	0.071494	1.8718904
2014M05	2240.544	7.32	6283.1326	3745.8699	0.071568	1.864483
2014M06	3681.385	6.7	6329.1154	3862.9526	0.071938	1.8567515
2014M07	6481.468	4.53	6379.4747	3985.5429	0.072852	1.848696
2014M08	2545.271	3.99	6434.2107	4113.6407	0.07363	1.8403164
2014M09	9874.306	4.53	6493.3232	4247.246	0.074519	1.8316127
2014M10	6118.327	4.83	6556.8122	4386.3589	0.075519	1.8225849
2014M11	2811.557	6.23	6624.6779	4530.9793	0.07663	1.813233
2014M12	1094.713	8.36	6696.920	4681.1072	0.077852	1.8035571

Lampiran 2**Tabulasi Setelah First Difference**

Periode	ZIS	Inflasi	Pendidikan	Kesehatan	PDB	Kemiskinan
2011M01						
2011M02	-487.165	-0.18	20.2303	30.7906	-0.0026	0.0026
2011M03	1625.419	-0.19	28.5675	30.7271	0.0015	0.0014
2011M04	-405.162	-0.49	36.9047	30.6635	0.0174	0.0001
2011M05	-906.751	-0.18	45.2419	30.6	0.0007	-0.0011
2011M06	1571.525	-0.44	53.5791	30.5365	-0.0041	-0.0024
2011M07	-244.653	-0.93	61.9163	30.4729	-0.0168	-0.0036
2011M08	4338.349	0.18	70.2535	30.4094	-0.0078	-0.0049
2011M09	-4426.93	-0.18	78.5907	30.3458	-0.0067	-0.0061
2011M10	-970.499	-0.19	86.928	30.2823	0.0177	-0.0074
2011M11	4619.635	-0.27	95.2652	30.2188	-0.0219	-0.0086
2011M12	3394.496	-0.36	103.6024	30.1552	-0.0381	-0.0099
2012M01	-8438.94	-0.14	589.4103	41.7587	-0.1019	-0.0211
2012M02	1784.532	-0.09	100.2431	29.5386	-0.0352	-0.0106
2012M03	150.336	0.41	88.5465	28.9855	-0.0159	-0.0102
2012M04	-1141.62	0.53	76.85	28.4325	0.0315	-0.0097
2012M05	301.657	-0.05	65.1535	27.8794	0.0015	-0.0093
2012M06	484.01	0.08	53.457	27.3263	-0.0004	-0.0088
2012M07	1359.29	0.03	41.760	26.7733	-0.0062	-0.0059
2012M08	1047.786	0.02	30.0639	26.2202	-0.0011	-0.0083
2012M09	-2037.49	-0.27	18.3674	25.6671	0	-0.0082
2012M10	984.362	0.3	6.6708	25.1141	0.0238	-0.0082
2012M11	-778.201	-0.29	-5.0257	24.561	-0.0148	-0.0081
2012M12	2612.041	-0.02	-16.7222	24.0079	-0.0307	-0.0081
2013M01	-3656.48	0.27	-411.494	-120.989	-0.0837	-0.0183
2013M02	365.327	0.74	-24.0422	28.9624	-0.0348	-0.0063
2013M03	449.932	0.59	-19.6656	34.4699	-0.023	-0.0044
2013M04	-433.12	-0.33	-15.2891	39.9774	0.0007	-0.0026
2013M05	17.533	-0.1	-10.9125	45.485	-0.0081	-0.0008
2013M06	107.824	0.43	-6.5359	50.9925	-0.0052	0.001
2013M07	4520.85	2.71	-2.1594	56.5	0.0007	0.022
2013M08	-4268.44	0.18	2.2172	62.0075	-0.0015	0.0013
2013M09	660.442	-0.39	6.5938	67.515	-0.0007	-0.0002
2013M10	2491.177	-0.08	10.9703	73.0226	0.2382	-0.0017
2013M11	-2130.86	0.05	15.3469	78.5301	-0.1779	-0.0031
2013M12	1288.22	0.01	19.7234	84.0376	-0.3558	-0.0046
2014M01	-2830.39	-0.16	24.1	89.5451	-1.0079	-0.0129
2014M02	469.078	-0.47	28.4766	95.0527	-0.3559	-0.0064
2014M03	1263.109	-0.43	32.8531	100.5602	-0.178	-0.0068
2014M04	-1828.18	-0.07	37.2297	106.0677	0.2365	-0.0071
2014M05	-62.428	0.07	41.6063	111.5752	0.0001	-0.0074
2014M06	1440.841	-0.62	45.9828	117.0828	0.0004	-0.0077
2014M07	2800.083	-2.17	50.3594	122.5903	0.0009	-0.0081
2014M08	-3936.2	-0.54	54.7359	128.0978	0.0008	-0.0084
2014M09	7329.035	0.54	59.1125	133.6053	0.0009	-0.0087
2014M10	-3755.98	0.3	63.4891	139.1128	0.001	-0.009
2014M11	-3306.77	1.4	67.8656	144.6204	0.0011	-0.0094
2014M12	-1716.84	2.13	72.242	150.1279	0.0012	-0.0097

Coefficients^a

Lampiran 3
Hasil running awal

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	pdb, zis, Inf, Pendidikan, Kesehatan ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,952 ^a	,906	,895	,02784	,261

a. Predictors: (Constant), pdb, zis, Inf, Pendidikan, Kesehatan

b. Dependent Variable: Kemiskinan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,314	5	,063	80,967	,000 ^b
	Residual	,033	42	,001		
	Total	,346	47			

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), pdb, zis, Inf, Pendidikan, Kesehatan

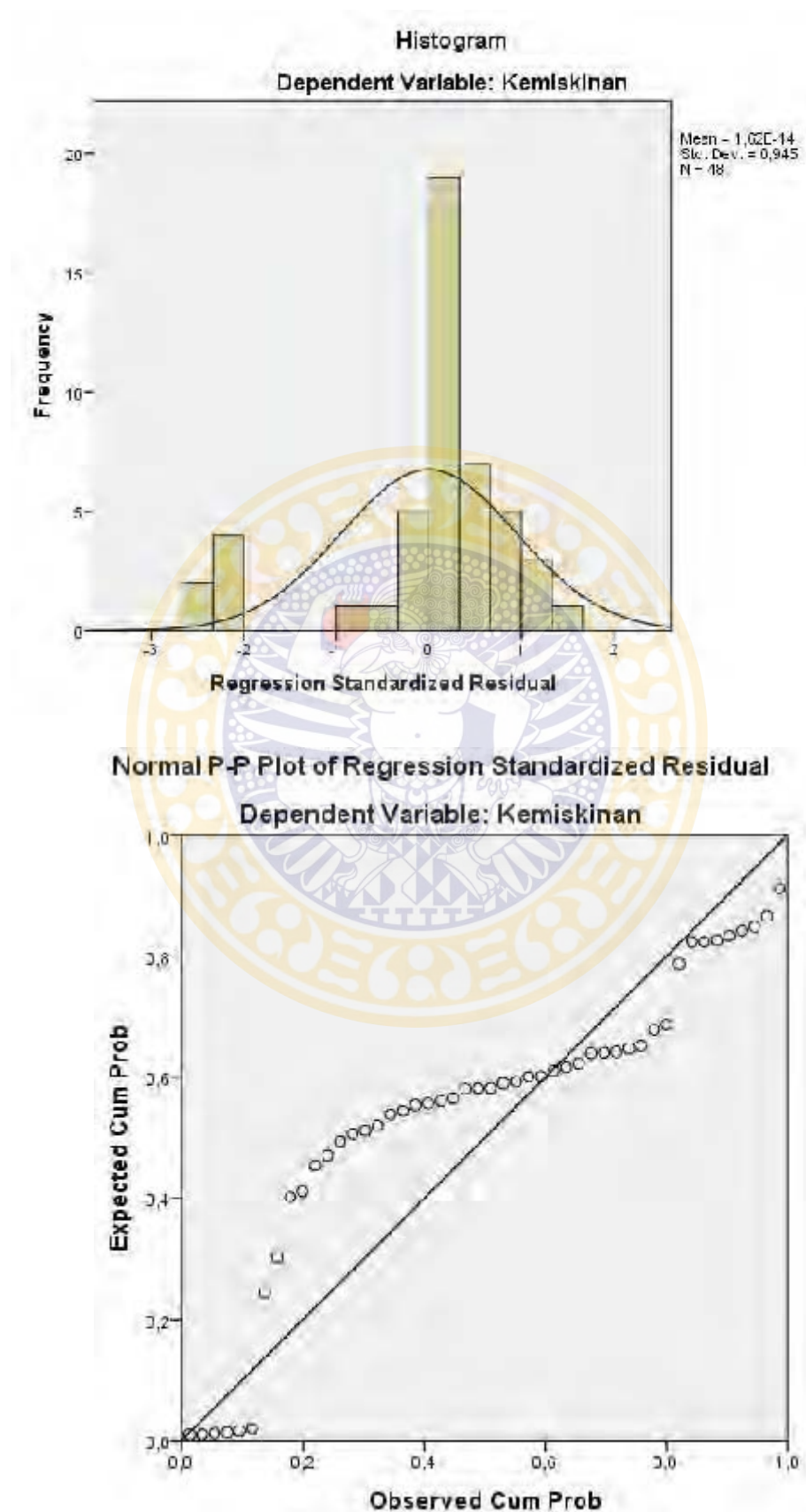
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2,628	,068		38,403	,000		
Pendidikan	-7,814E-5	,000	-,519	-7,578	,000	,477	2,096
Kesehatan	-5,462E-5	,000	-,441	-2,933	,005	,099	10,092
Inf	-,010	,003	-,185	-3,445	,001	,777	1,287
zis	-6,157E-7	,000	-,015	-,292	,772	,876	1,141
pdb	,006	,014	,052	,410	,684	,140	7,126

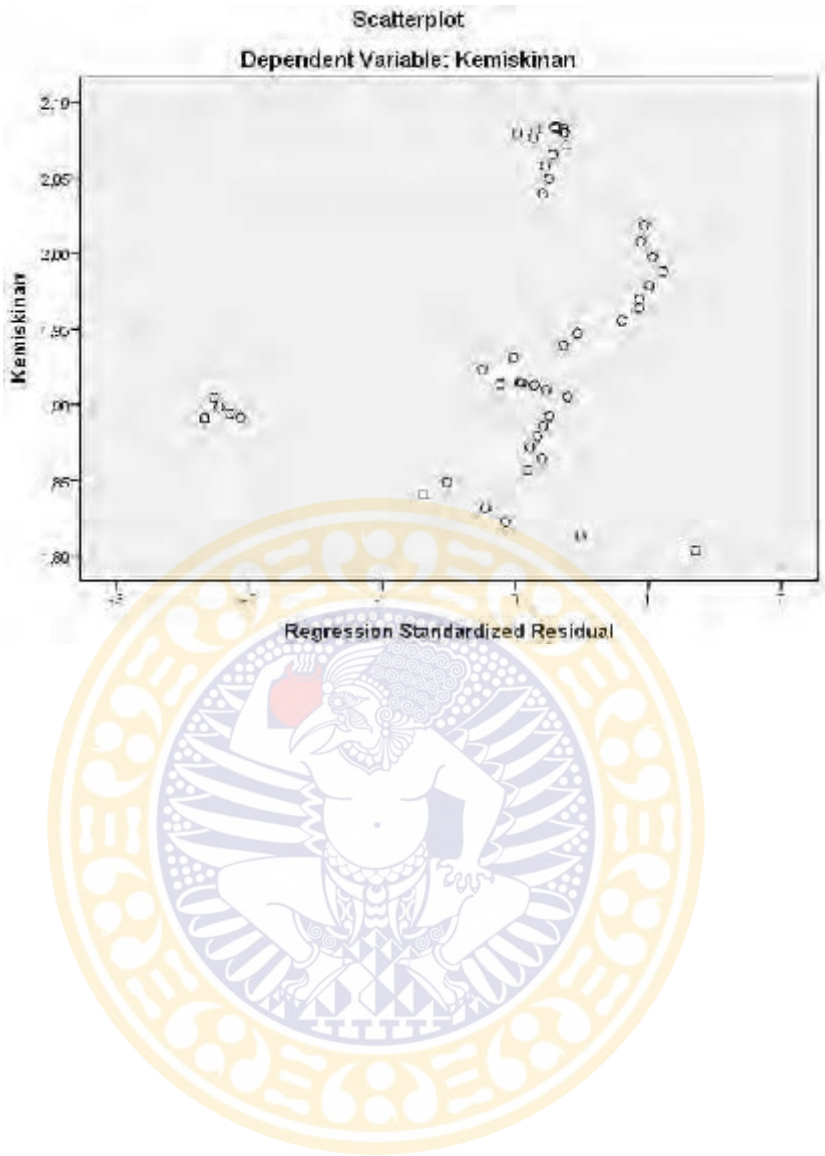
a. Dependent Variable: Kemiskinan

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions					
				(Constant)	Pendidikan	Kesehatan	Inf	zis	pdb
1	1	5,432	1,000	,00	,00	,00	,00	,01	,00
	2	,308	4,199	,00	,00	,00	,00	,10	,08
	3	,207	5,128	,00	,00	,00	,04	,72	,01
	4	,048	10,623	,00	,01	,01	,75	,12	,00
	5	,003	43,813	,08	,51	,96	,08	,05	,72
	6	,003	46,167	,92	,47	,03	,12	,00	,19

a. Dependent Variable: Kemiskinan





Lampiran 4

Hasil running setelah *first difference***Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.846 ^a	.715	.681	.00353527885	.771

a. Predictors: (Constant), ZIS, INFLASI, KESEHATAN, PDB, PENDIDIKAN

b. Dependent Variable: KEMISKINAN

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.001	5	.000	20.613	.000 ^a
	Residual	.001	41	.000		
	Total	.002	46			

a. Predictors: (Constant), ZIS, INFLASI, KESEHATAN, PDB, PENDIDIKAN

b. Dependent Variable: KEMISKINAN

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standar dized Coeffici ents	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero- order	Parti al	Part	Toler ance	VIF
1 (Consta nt)	-.004	.001		- 3.45 8	.001					
PENDI DIKAN	- 2.958E -5	.000	-.521	- 4.25 5	.000	-.705	-.553	-.355	.463	2.16 2
KESEH ATAN	- 2.502E -5	.000	-.191	- 1.94 4	.059	-.033	-.290	-.162	.721	1.38 8
PDB	-.009	.004	-.248	- 2.41 2	.020	-.637	-.353	-.201	.658	1.52 0
INFLAS I	.002	.001	.266	2.33 2	.025	.693	.342	.194	.533	1.87 6
ZIS	- 2.020E -11	.000	-.010	-.111	.912	.067	-.017	-.009	.905	1.10 5

a. Dependent Variable: KEMISKINAN

